



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



Jl. Pulau Bangka Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang
Telp. 0717-439351 Email: pt_babel@yahoo.co.id

PROFIL PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]



KETUA
Pembina Utama (IV/e) / Hakim Utama

H. MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.



WAKIL KETUA
Pembina Utama (IV/e) / Hakim Utama

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

HAKIM TINGGI

<p>Hakim Tinggi Pembina Utama (IV/e)</p>  <p>Pottak Manahan Silalahi, S.H., M.H.</p>	<p>Hakim Tinggi Pembina Utama (IV/e)</p>  <p>Heru Prakosa, S.H., M.H.</p>
<p>Hakim Tinggi Pembina Utama (IV/e)</p>  <p>Sri Widlyastuti, S.H., IKH, M.H.</p>	<p>Hakim Tinggi Pembina Utama (IV/e)</p>  <p>Tirotan Nalnggolan, S.H.</p>
<p>Hakim Tinggi Pembina Utama (IV/e)</p>  <p>Sabarutina Br Ginting, S.H., M.H.</p>	<p>Hakim Tinggi Pembina Utama (IV/e)</p>  <p>Hj. Ristati, S.H.</p>
<p>Hakim Tinggi Pembina Utama (IV/e)</p>  <p>Dr. Erwantoni, S.H., M.H.</p>	<p>Hakim Tinggi Pembina Utama (IV/e)</p>  <p>Wahyu Saktianingsih, S.H., M.H.</p>
<p>Hakim Tinggi Pembina Utama Madya (IV/d)</p>  <p>Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.</p>	<p>Hakim Tinggi Pembina Utama Madya (IV/d)</p>  <p>Yuzlicia Roza Puteri, S.H., M.H.</p>

HAKIM AD HOC

<p>Hakim Ad Hoc</p>  <p>TIMBUL WAHYUDI, S.H., MAP</p>	<p>Hakim Ad Hoc</p>  <p>MOHAMAD UNTUNG PRAMONO, S.H., S.T., M.H.</p>
--	--

PANITERA

Panitera
Pembina Utama Muda/ (IV/c)



Tanwiman Syam, S.H.

PANITERA MUDA

PANITERA MUDA TIPIKOR
HUKUM

Tipikor
Penata Tingkat I (III/d)



Drs. Zulmiadi, S.H.

PANITERA MUDA PERDATA

Penata TK.I (III/d)



Bintar Asli, S.H.

PANITERA MUDA PIDANA

Penata Tingkat I (III/d)



Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Plt.PANITERA MUDA

PENATA Tk.I (III/d)



SURYATI, S.I.P

PANITERA PENGGANTI

PANITERA PENGGANTI
PENATA Tk.I (III/d)



SURYATI, S.I.P

PANITERA PENGGANTI
PENATA (III/c)



YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

STAF KEPANITERAAN

Staf Kepaniteraan Khusus Tipikor
Penata Muda Tingkat I (III/b)



Nur Anggraini, S.H.

Staf Kepaniteraan Hukum
Penata Muda Tingkat I (III/b)



Dessy Triastuti, A.Md

Staf Kepaniteraan Hukum
Pengatur (II/c)



Kurnia Hutami Aisyara, A.Md. S.H.

Staf Kepaniteraan Perdata
Pengatur (II/c)



Erni Novianti, A.Md.A.B

Staf Kepaniteraan Pidana
Penata Muda (III/a)



Nurafni, S.H.

KESEKRETARIATAN

SEKRETARIS
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)



Drs. TAJUDIN NUR, S.H.

KEPALA BAGIAN

KABAG UMUM & KEUANGAN
PEMBINA (IV/a)



MAHFUD WIDI PRIYONO, S.T., M.H.

KABAG PERENCANAAN & KEPEGAWAIAN
PEMBINA (IV/a)



LUKI PUDI ASMARA, S.E., M.H.

KASUBBAG

KASUBBAG TU & RT
PENATA Tk. I (III/d)



YUS YULI, S.H.

KASUBBAG RENPROG & ANGGARAN
PENATA (III/C)



FITRIYANTI UTARI, S.E.

KASUBBAG KEU & PELAPORAN
PENATA Tk.I (III/d)



SITI KOMARI, S.E.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN & TI
PENATA TINGKAT I (III/d)



IRHANSYAH

STAF KESEKRETARIATAN

IT & KEPEGAWAIAN
PENATA MUDA Tk. I (III/b)



WENNY FITRIANI, S.Kom.

IT & KEPEGAWAIAN
PENATA MUDA (III/a)



DANANG SEDAYU, S.IP.

IT & KEPEGAWAIAN
PENGATUR (II/c)



LADYS ELISA PAKPAHAN, A.Md.T.

KEUANGAN & PELAPORAN
PENATA (III/c)



IRVA NOVIANTI, S.Kom.

KEUANGAN & PELAPORAN
PENATA MUDA Tk.I (III/b)



DEWI WULANDARI, S.H.

KEUANGAN & PELAPORAN
PENATA MUDA (III/a)



NYIMAS ZIHNI BADZLINA, S.E.

ANALIS PERENCANA, EVALUASI DAN PELAPORAN
PENATA MUDA (III/a)



MERI KARTIKA SARI, S.I.P.

TU & RUMAH TANGGA
PENGATUR (II/c)



YULIA RESTI NURVANI, A.Md.Ak.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Beserta 5 Pengadilan Negeri Tingkat Pertama :
Pengadilan Negeri Sungailiat, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok,
Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pengadilan Negeri Tanjungpandan

KATA PENGANTAR

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Puji syukur atas rahmat dan karunia-Nya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 secara keseluruhan, yang disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2876/SEK/OT.01.2/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sekaligus dalam mewujudkan good governance dan accountability sehingga tercapai budaya kerja yang transparan, efektif, efisien, dan profesional.

Dalam kesempatan ini perkenankan kami memberi gambaran singkat tentang Pengadilan Tinggi Bangka Belitung beserta permasalahannya yang dihadapi dari kemajuan infrastruktur dan sistem yang dibangun di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai gambaran Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membawahi 5 (Lima) Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan segala keterbatasan, izinkan kami menyampaikan secara lengkap Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 dibidang teknis yudisial, bidang administrasi dan bidang kegiatan lainnya, untuk itu kami sampaikan kiranya menjadi masukan yang berguna untuk pelaksanaan tugas yang akan datang.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERKARA	
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM	
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	9
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	12
B. PENYELESAIAN PERKARA	
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	13
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	15
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	17
4. Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi	20
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi.....	21
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	
1. POS BAKUM.....	21
2. Sidang Keliling	22
3. Perkara Prodeo.....	23
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
A. KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA	24
B. MUTASI	53
C. PROMOSI	56
D. PENSIUN	57
E. DIKLAT	57
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	68
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	73
C. PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	96

BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
A.	AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	109
B.	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	110
C.	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	117
BAB VI	PENGAWASAN	
A.	INTERNAL	142
B.	EVALUASI	145
BAB VII	PENUTUP	
A.	KESIMPULAN	146
B.	REKOMENDASI / SARAN	147

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1. 8 (Delapan) Area Arah Perubahan	5
TABEL 1.2. Indikator Kinerja Utama	7
TABEL 2.1. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum PT Bangka Belitung Tahun 2022	10
TABEL 2.2. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2021	13
TABEL 2.3. Perbandingan Keadaan Perkara Tahun 2021 dan 2022	13
TABEL 2.4. Sisa Perkara Tahun 2021	14
TABEL 2.5. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	15
TABEL 2.6. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	15
TABEL 2.7. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	18
TABEL 2.8. Perkara yang Berhasil di Mediasi	20
TABEL 2.9. Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	21
TABEL 2.10. Realisasi Anggaran Pos Bakum Tahun 2021	22
TABEL 3.1. Jumlah Pegawai Pengadilan Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	25
TABEL 3.2. Rincian Tugas Pokok Sub Bagian Kepegawaian	25
TABEL 3.3. Matriks Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	27
TABEL 3.4. Matriks Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pangkalpinang	30
TABEL 3.5. Matriks Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sungailiat	35
TABEL 3.6. Matriks Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tanjungpandan	40
TABEL 3.7. Matriks Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Koba.....	45
TABEL 3.8. Matriks Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Mentok.....	50
TABEL 3.9. Tabel Kebutuhan SDM Pengadilan Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	52
TABEL 3.10. Mutasi Masuk Pengadilan Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	53
TABEL 3.11. Mutasi Keluar Pengadilan Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	54

TABEL 3.12. Tabel Promosi Pengadilan Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	56
TABEL 3.13. Tabel Pensiun Pengadilan Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	57
TABEL 3.14. Data Diklat Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	58
TABEL 3.15. Data Sertifikasi Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang	59
TABEL 3.16. Data Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Negeri Pangkalpinang	59
TABEL 3.17. Data Pelatihan Teknis Umum Pengadilan Negeri Pangkalpinang	60
TABEL 3.18. Data Diklat Pengadilan Negeri Sungailiat	60
TABEL 3.19. Data Diklat Pengadilan Negeri Tanjungpandan	63
TABEL 3.20. Data Sertifikasi Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan	64
TABEL 3.21. Data Diklat Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tanjungpandan	64
TABEL 3.22. Data Diklat Administrasi Manajemen Pengadilan Negeri Tanjungpandan	65
TABEL 3.23. Data Hakim dan Pegawai Yang Telah Mengikuti Teknis/Non Fungsional Pengadilan Negeri Koba	65
TABEL 3.24. Data Pelatihan Online Oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Mentok	66
TABEL 3.25. Pelatihan Teknis Fungsional Pengadilan Negeri Mentok	67
TABEL 3.26. Data Diklat Teknis dan Manjemen Pengadilan Negeri Mentok	67
TABEL 4.1. Anggaran yang dikelola Pengadilan Se-Wilayah Bangka Belitung	69
TABEL 4.2. Realisasi Anggaran DIPA 01 Se-Wilayah PT Bangka Belitung	70
TABEL 4.3. Realisasi Anggaran DIPA 03 Se-Wilayah PT Bangka Belitung	72
TABEL 4.4. Realisasi PNBPN Se-Wilayah PT Bangka Belitung	73
TABEL 4.5. Aset Tanah Se-Wilayah PT Bangka Belitung	74
TABEL 4.6. Aset Gedung dan Bangunan Se-Wilayah PT Bangka Belitung	76
TABEL 4.7. Aset Kendaraan Dinas Se-Wilayah PT Bangka Belitung.....	78
TABEL 4.8. Fasilitas Gedung Kantor Se-Wilayah PT Bangka Belitung.....	80
TABEL 4.9. Fasilitas Perkantoran Se-Wilayah PT Bangka Belitung	88
TABEL 4.10. Daftar Verifikasi Advokat pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	99
TABEL 4.11. Perkara yang didaftarkan melalui E-Court pada PN Pangkalpinang	99
TABEL 4.12. Tabel Perangkat Keras Pendukung SIPP	100
TABEL 4.13. Rincian Spesifikasi Serves Penunjang SIPP Pengadila Koba	102
TABEL 4.14. Rekapitulasi Penerimaan dan Penanganan Perkara e-Court Pada Pengadilan Negeri Mentok Tahun 2022	103

TABEL 4.15. Register Surat Masuk dan Surat Keluar PT. Bangka Belitung	105
TABEL 4.16. Rincian Spesifikasi Server Penunjang SIPP Pada Pengadilan Negeri Koba...	107
TABEL 5.1. Nilai Akreditasi se-Wilayah PT Bangka Belitung	110
TABEL 5.2. Register Surat Masuk dan Keluar PT Bangka Belitung	111
TABEL 5.3. Laporan Evaluasi Register Aplikasi PTSP PN Pangkalpinang	113
TABEL 6.1. Jadwal Pengawasan Ke Pengadilan negeri Se-Wilayah Bangka Beltung	144

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Perkara	12
GAMBAR 4.1. Gambar e-Court Pengadilan Negeri Sungailiat.....	99
GAMBAR 4.2. Gambar e-Court Pengadilan Negeri Tanjungpandan	100
GAMBAR 4.3. SIPP Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	104
GAMBAR 4.4. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN	105
GAMBAR 4.5. Sistem Informasi Pembiayaan Administrasi Peradilan Umum.....	105
GAMBAR 4.6. Evaluasi SIPP Tanjungpandan.....	106
GAMBAR 4.7. SIPP Tanjungpandan versi 5.1.0. PN Mentok.....	108
GAMBAR 5.1. Meja Pelayanan Terpadu Saru Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ..	111
GAMBAR 5.2. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Sungai Liat	114
GAMBAR 5.3. Gambar Meja Pendaftaran Sidang	114
GAMBAR 5.4. Gambar Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Tanjung Pandan	115
GAMBAR 5.5. Gambar Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Koba.....	115
GAMBAR 5.6. Gambar Kompensasi PTSP Pengadilan Negeri Koba	116
GAMBAR 5.7. Aplikasi Literal Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	111
GAMBAR 5.8 Aplikasi Silayang.....	118
GAMBAR 5.9 Aplikasi E-Peta	118
GAMBAR 5.10 Aplikasi SIREPA	119
GAMBAR 5.11 Aplikasi E-Silka	120
GAMBAR 5.12 Aplikasi E-Wasbid	120
GAMBAR 5.13 Aplikasi E-Babel Oke	120
GAMBAR 5.14 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Disabilitas.....	120
GAMBAR 5.15 Pelatihan Layanan Disabilitas bagi Petugas PTSP PT Babel.....	121
GAMBAR 5.16 Video Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	122
GAMBAR 5.17 Video Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	122
GAMBAR 5.18 Video Si Timah Keren Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	122
GAMBAR 5.19 Brosur Inovasi Pelayanan Publik PELIHARA PN Pangkalpinang.....	123

GAMBAR 5.20 Penggunaan Inovasi Lantik PN Pangkalpinang	123
GAMBAR 5.21 Gambar Tampilan Aplikas E-SUKA	124
GAMBAR 5.23 Pelayanan PETALING PN Pangkalpinang	125
GAMBAR 5.24 Tampilan Aplikasi Pengalaman PN Pangkalpinang	125
GAMBAR 5.25 Aplikasi SiNONA PN Sungai Liat	126
GAMBAR 5.26 Aplikasi SITAMI PN Sungai Liat	126
GAMBAR 5.27 CMS BRI PN Sungai Liat.....	126
GAMBAR 5.28 Portal Sistem Informasi Linktree berbasis Website PN Sungai Liat.....	127
GAMBAR 5.29 WA Centre Pojok E-Court PN Sungai Liat.....	127
GAMBAR 5.30 Meja Antrian Persidangan PN Sungai Liat	127
GAMBAR 5.31 Meja Pelayanan Perbaikan PN Sungai Liat	127
GAMBAR 5.32 BRI Point PN Sungai Liat.....	128
GAMBAR 5.33 Klinik Kesehatan PN Sungai Liat.....	128
GAMBAR 5.34 Aksesibilitas Difabel Di Website PN Tanjungpandan.....	129
GAMBAR 5.35 Aplikasi E-Sigap PN Tanjungpandan	129
GAMBAR 5.36 Aplikasi SIPP PN Tanjungpandan	130
GAMBAR 5.37 Pengadilan Menyapa Radio PEMDA	130
GAMBAR 5.38 PTSP Online PN Tanjungpandan	131
GAMBAR 5.39 Publikasi Perkara (One Day Publish).....	131
GAMBAR 5.40 Menu Antrian Direktori Putusan Aplikasi SIPP	132
GAMBAR 5.41 Aplikasi E-SIGAP	132
GAMBAR 5.42 Aplikasi SIMADE.....	133
GAMBAR 5.43 Aplikasi SPEISCIPIK	134
GAMBAR 5.44 Aplikasi ERATERANG	134
GAMBAR 5.45 Aplikasi SI-PANDANG	135
GAMBAR 5.46 Aplikasi AKSI SIJAKA	135
GAMBAR 5.47 Aplikasi PANGSID	136
GAMBAR 5.48 Nomor Layanan Whatsapp SI SELAWANG.....	136
GAMBAR 5.49 Aplikasi BANK DATA APM	136
GAMBAR 5.50 Aplikasi E-Court.....	137
GAMBAR 5.51 Aplikasi SMS Gateway	137
GAMBAR 5.52 Aplikasi Whatsapp Gateway	138
GAMBAR 5.53 Website PN Mentok.....	140

GAMBAR 5.54 Media Sosial PN Mentok	140
GAMBAR 5.55 Aplikasi SIJATI PN Mentok	141
GAMBAR 5.56 Aplikasi SIPERIA PN Mentok	141
GAMBAR 5.57 Aplikasi Do-Entry PN Mentok	141

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

Semangat perubahan menuju "Peradilan Yang Agung" dengan skenario "Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035", telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung RI, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sebuah visi besar menuju cita-cita "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG". Visi Badan peradilan yang berhasil dirumuskan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 tersebut direalisasikan dalam bentuk 10 konsentrasi usaha-usaha perbaikan Badan Peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam misi Mahkamah Agung RI, yakni "Menjaga Independensi Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Masyarakat Pencari Keadilan, Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan dan Meningkatkan Kredibilitas serta Transparansi Badan Peradilan".

Sistem kamar yang diberlakukan Mahkamah Agung RI, merupakan salah satu di antara agenda besar dalam proses pembaharuan hukum dan teknis penyelesaian perkara kasasi yang telah tertuang dalam buku cetak biru menuju peradilan yang agung dengan tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Mengembangkan kepakaran dan keterampilan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;
2. Meningkatkan produktivitas dalam memeriksa dan memutus perkara;

Memudahkan pengawasan dan pembinaan hukum yurisprudensi dalam kerangka menjaga kesatuan hukum nasional.

Khusus berkaitan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dimaksudkan bahwa potensi dan kekuatan "Lembaga Perubahan" dan "Lembaga Pemberdayaan" diyakini memiliki relevansi kemampuan untuk membangun landasan filosofi dan operasional menuju terwujudnya cita-cita peradilan agung --- jelas sebuah paradigma dan tantangan baru bagi seluruh Pengadilan Tingkat Banding, karena dalam tema tersebut terkandung pengertian bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian dari organ organisasi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI, harus diberdayafungsikan agar ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan.

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



Di lingkungan Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan Umum, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan umum secara konstitusional merupakan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI.

Visi Badan Peradilan Yang Agung dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 yang nota-bene merupakan perwujudan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 versi Mahkamah Agung RI atau lebih dikenal dengan "Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia" kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 --- Merupakan arah strategi reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 --- Merupakan arah pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, secara ideal Badan Peradilan Yang Agung adalah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu;

Respon dan langkah Mahkamah Agung RI guna menyikapi dan menjawab kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan seluruh peradilan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama berkaitan dengan perubahan atau pembaruan melalui beberapa kebijakan diantaranya:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, telah dicabut dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Kemudian ditindak-lanjuti oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (Badilum-MARI) yang merupakan instansi di bawah Mahkamah Agung RI yang khusus melakukan pembinaan terhadap Badan Peradilan Umum Se-Indonesia telah membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan, Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 033/ KMA/SK/III/2011.

Adapun Program Prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Umum sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Manajemen informasi publik;
3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik;
4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan;
5. Pelayanan peradilan yang prima;
6. Implementasi SIPP guna otomatisasi Pola Bindalmin;
7. *“Justice for All”* dengan paket kegiatan :
 - a. Perkara Prodeo
 - b. Sidang Keliling
 - c. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 TANGGAL 12 NOVEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NO. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu dengan bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi, nepotisme

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI Khusus pada tahun 2013, secara umum gerak dan langkah serta arah pembaruan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, menjadi spirit dalam pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, baik di bidang kekuasaan kehakiman maupun bidang manajemen yang meliputi permasalahan administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana diarahkan pada upaya mewujudkan

organisasi/lembaga pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dengan menjadikan dan memperhatikan 8 (Delapan) Area Perubahan sebagai arah perubahan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI, yakni :

TABEL 1. 1
8 (DELAPAN) AREA ARAH PERUBAHAN
DALAM REFORMASI BIROKRASI PERADILAN INDONESIA

NO	ARAH PERUBAHAN	HASIL	
		YANG DIHARAPKAN	RUMPUN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
1	<i>Mind Set dan Cultur Set</i> Aparatur	Terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan	Bersih dan Bebas KKN
2	Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Kualitas Pengambilan Kebijakan
3	Organisasi	Organisasi yang tepat ukur dan tepat fungsi (<i>right size and right function</i>)	Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan
4	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Kualitas Pengambilan Kebijakan
5	Sumber Daya Aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera	Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan
6	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Bersih dan Bebas KKN
7	Akuntabilitas	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Bersih dan Bebas KKN
8	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Kualitas Pelayanan Publik

a. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selama tahun 2020 telah melakukan berbagai program kinerja peradilan dan berupaya untuk merealisasikan agenda Pembaharuan yang terus diterapkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Peradilan Indonesia Modern dan Badan Peradilan Yang Agung, yakni ditandai penetapan kebijakan umum peradilan Umum di lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk semaksimal mungkin merealisasikan Reformasi Birokrasi yang terkristalisasi dalam konsep ideal Badan Peradilan Yang Agung yang sesuai dengan karakteristik Peradilan Umum di Bangka Belitung dan menyentuh aspek-aspek pelayanan publik dan transparansi peradilan, yakni :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu.

Kebijakan Umum Peradilan Tinggi Bangka Belitung dalam melaksanakan amanat sebagai badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat banding dalam hal penanganan perkara dan keadilan juga merealisasikan amanat Reformasi Birokrasi/Reformasi Yudisial melalui Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu:

- a. Penyediaan sarana penunjang bagi peningkatan kinerja Pengadilan secara keseluruhan.
- b. Melaksanakan pelatihan-pelatihan serta pembinaan kepada seluruh Hakim, Panitera Pengganti serta seluruh staf.
- c. Jaringan informasi hukum dikembangkan untuk penguatan dan peningkatan kinerja lembaga hukum.
- d. Pengawasan diarahkan kepada peningkatan kinerja kelembagaan secara menyeluruh serta melaksanakan pengawasan yang bersifat internal (melekat) dan pengawasan yang bersifat eksternal ke daerah-daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Pembinaan Sumber Daya Manusia terstruktur dan terkoordinasi oleh pimpinan Pengadilan Tinggi.
- f. Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, perkantoran dan pendukung dimanfaatkan untuk pencapaian visi Lembaga Peradilan secara efektif dan efisien.

Kebijakan umum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selain berupaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja dan kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Wilayah bagi Institusi Peradilan di Bangka Belitung, yang hingga kini sudah ± 12 tahun.

b. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan yang akan datang dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Visi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan.

c. RENCANA STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
3. Peningkatan Kualitas Pengawasan.
4. Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Peningkatan kualitas pengawasan.
4. Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan.

d. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TABEL I. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu . b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu. d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi e. Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu b. Persentase salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

e. PROGRAM DAN KEGIATAN

2 (Dua) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tepat Waktu;
 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor;
 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
 5. Publikasi dan Transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

- b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
 1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
 2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

- c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB II KEADAAN PERKARA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

BAB II

KEADAAN PERKARA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN.UMUM

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan salah satu Pengadilan Tinggi dibawah Mahkamah Agung yang berwenang mengadili Perkara Banding di wilayah Bangka Belitung. Pengelolaan perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahun 2022 dilakukan sesuai dengan tupoksinya. Setiap bulannya data-data keadaan Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memantau dan memonitor keadaan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui SIPP.

A.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama adalah perkara yang diselesaikan di Pengadilan Negeri. Dilihat dari banyaknya perkara yang ada diseluruh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sangat bervariasi namun semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan baik. Perkara yang masuk pada 5 (lima) Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tahun 2022 adalah :

- a. Pengadilan Negeri Pangkalpinang yaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 440 Perkara, Perkara Pidana Singkat sebanyak 1 Perkara, Perkara Pidana Cepat sebanyak 4 Perkara, Perkara Pidana Lalu Lintas sebanyak 11.070 Perkara, Perkara Tipikor sebanyak 49 Perkara, Perkara Pidana Anak sebanyak 16 perkara, Perkara Pidana Pra Peradilan sebanyak 7 Perkara, perkara PHI sebanyak 24 perkara Perkara, Perdata Gugatan sebanyak 84 Perkara, Perkara Perdata Gugatan sederhana sebanyak 21 perkara, Perkara Perdata Permohonan sebanyak 124 perkara dan perkara perdata Permohonan Konsinyasi sebanyak 4 Perkara.
- b. Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu Pada tahun 2022 jumlah perkara yang masuk sebanyak 329 perkara Pidana Biasa, 22

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



- Pidana Anak, 6 Pidana Cepat, 0 Pidana Singkat, 8.884 Perkara Pidana Lalu Lintas, 64 Gugatan, dan 103 Permohonan dan 23 Gugatan Sederhana sehingga jumlah perkara yang diterima selama tahun 2022 sebanyak 9.293. Dan pada tahun 2022 masuk 4 perkara pra peradilan.
- c. Pengadilan Negeri Tanjungpandan yaitu Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Tanjungpandan memutus Perkara sebanyak 6.199 dan yang berhasil diputus tepat waktu (dalam waktu 5 bulan) sebanyak 6.196 perkara. Putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak diajukan upaya hukum pada tahun 2022 sebanyak 156 perkara Pidana Biasa, 3 perkara Pidana Cepat, 5889 perkara Pidana Lalu Lintas, 3 perkara Pidana Anak, 29 perkara Perdata Gugatan dan 4 perkara Perdata Gugatan Sederhana.
 - d. Pengadilan Negeri Koba yaitu Pada Tahun 2022 memutus perkara sebanyak 1.873 dan yang berhasil di putus tepat waktu (dalam waktu 5 bulan) sebanyak 1.873 Perkara. Perkara Pidana Biasa sebanyak 184 Perkara, Perkara Tipikor sebanyak 0 Perkara, Perkara Pidana Singkat sebanyak 0 Perkara, Perkara Pidana Cepat sebanyak 2 Perkara, Perkara Pidana Lalu Lintas sebanyak 1.607 Perkara, Perkara Pidana Anak sebanyak 5 perkara, Perkara Pidana Pra Peradilan sebanyak 0 Perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 35 Perkara, Perkara Perdata Gugatan sederhana sebanyak 16 Perkara. Perkara Perdata Permohonan sebanyak 8 Perkara dan Perkara Perdata Permohonan Konsinyasi sebanyak 0 Perkara.
 - e. Pengadilan Negeri Mentok yaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 165 Perkara, Perkara Tipikor 0, Perkara Pidana Singkat sebanyak 0 Perkara, Perkara Pidana Cepat sebanyak 3 Perkara, Perkara Pidana Lalu Lintas sebanyak 1.117 Perkara, Perkara Pidana Anak sebanyak 8 perkara, Perkara Pidana Pra Peradilan sebanyak 0 Perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 10 Perkara, Perkara Perdata Gugatan sederhana sebanyak 4 Perkara. Perkara Perdata Permohonan sebanyak 29 Perkara dan Perkara Perdata Permohonan Konsinyasi sebanyak 2 Perkara.

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Se-wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2022

NO	PENGADILAN NEGERI JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG PUTUS	SISA PERKARA	KETERANGAN
1	PN Pangkalpinang					
	- Pidana Biasa	38	402	368	72	
	- Pidana Singkat	1	-	1	-	
	- Pidana Cepat/Ringan	-	4	4	-	
	- Pidana Lalu Lintas	-	11.070	11.070	-	
	- Pidana Tindak Korupsi	18	31	35	14	
	- Pidana Anak	0	16	16	-	
	- Pidana Pra Peradilan	-	7	7	-	
- PHI	6	18	23	1	6 Perkara di cabut	

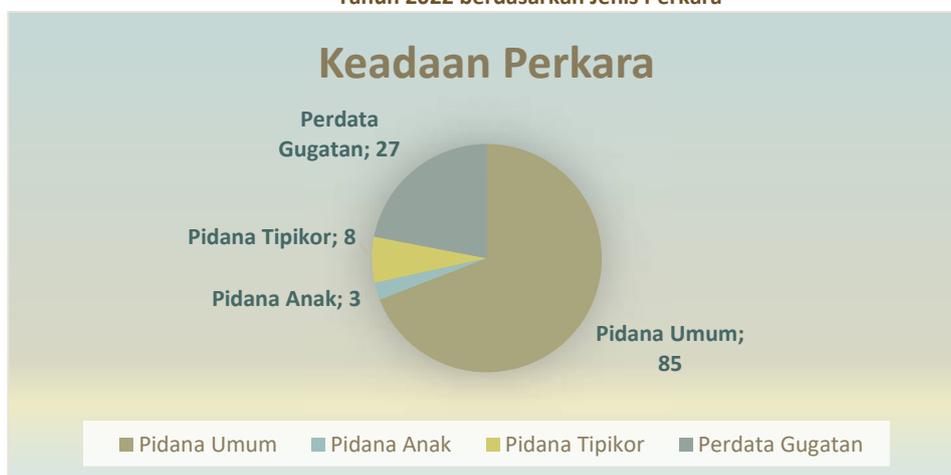
NO	PENGADILAN NEGERI JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG PUTUS	SISA PERKARA	KETERANGAN
	- Perdata Gugatan	13	71	64	14	6 Perkara di cabut
	- Perdata Gugatan Sederhana	2	19	21	0	
	- Perdata Permohonan	1	123	118	6	
	- Perdata Permohonan Konsinyasi	4	-	1	3	1 Perkara Tahun 2010 dan 2 Perkara Tahun 2016 (Proses Penitipan Pada Kas PN PKP
	PN Sungailiat					
	- Pidana Biasa	17	329	310	36	
	- Pidana Singkat	-	-	-	-	
	- Pidana Cepat/Ringan	-	6	6	-	
	- Pidana Lalu Lintas	-	8.884	8.884	-	
	- Pidana Anak	1	22	23	-	
	- Pidana Pra Peradilan	-	4	4	-	Perkara cabut 2
	- Perdata Gugatan	11	65	65	11	1 Perkara di cabut
	- Perdata Gugatan Sederhana	-	23	23	-	
	- Perdata Permohonan	-	103	103	-	
3	PN Tanjungpandan					
	- Pidana Biasa	9	176	182	3	
	- Pidana Singkat	-	-	-	-	
	- Pidana Cepat/Ringan	-	3	3	-	
	- Pidana Lalu Lintas	-	5.889	5.889	-	
	- Pidana Anak	-	3	3	-	
	- Pidana Pra Peradilan	-	4	4	-	
	- Perdata Gugatan	9	35	35	9	3 Perkara dicabut
	- Perdata Gugatan Sederhana	0	5	4	1	
	- Perdata Permohonan	1	78	79	-	2 Perkara dicabut
4	PN Koba					
	- Pidana Biasa	14	170	169	15	
	- Pidana Singkat	-	-	-	-	
	- Pidana Cepat/Ringan	-	2	2	-	
	- Pidana Lalu Lintas	-	1.607	1.607	-	

NO	PENGADILAN NEGERI JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG PUTUS	SISA PERKARA	KETERANGAN
	- Pidana Anak	-	5	5	-	
	- Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	
	- Perdata Gugatan	4	31	30	5	
	- Perdata Gugatan Sederhana	-	16	16	-	
	- Perdata Permohonan	-	8	8	-	
5	PN Mentok					
	- Pidana Biasa	10	155	148	17	
	- Pidana Singkat	-	-	-	-	
	- Pidana Cepat/Ringan	-	3	3	-	
	- Pidana Lalu Lintas	-	1.117	1.117	-	
	- Pidana Anak	-	8	8	-	
	- Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	
	- Perdata Gugatan	1	9	10	-	1 Perkara dicabut
	- Perdata Gugatan Sederhana	0	4	4	0	
	- Perdata Permohonan	-	29	29	-	
	- Perdata Permohonan Konsinyasi	-	2	2	-	

A.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang diselesaikan pada tingkat banding adalah perkara yang masuk selama tahun 2022 dan diselesaikan di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2022 yaitu Perkara Pidana Umum sebanyak 85 Perkara, Perkara Pidana Tipikor sebanyak 8 Perkara, Perkara Pidana Anak sebanyak 3 perkara dan Perkara Perdata Gugatan sebanyak 27 Perkara.

Gambar 2.1
Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Tahun 2022 berdasarkan Jenis Perkara



Keadaan Perkara yang pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2022
berdasarkan Jenis Perkara

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG PUTUS	SISA PERKARA	KET
1.	Pidana Biasa	3	82	83	2	
2.	Pidana Tindak Korupsi	0	8	8	0	
3.	Pidana Anak	0	3	3	0	
4.	Perdata Gugatan	3	24	25	2	
Jumlah		6	117	119	4	

Tabel 2.3
Perbandingan Keadaan Perkara pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	URAIAN	2021	2022
1.	Sisa Perkara Tahun Lalu	6	4
2.	Perkara Yang Masuk	120	117
3.	Perkara Yang Putus	120	119
4.	Sisa Perkara	6	4

Jumlah Perkara yang Masuk tahun 2022 sebanyak 117 perkara. Jumlah ini menurun sebesar 2,5 % dibandingkan tahun 2021 dimana perkara yang masuk sebanyak 120 Perkara. Perkembangan jumlah perkara yang putus ditahun 2022 juga menurun sebesar 0,8 % dibandingkan tahun 2021 yaitu dari sebanyak 120 perkara menjadi 119 perkara putus. Sementara untuk sisa perkara tahun 2022 sebanyak 4 perkara.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Adapun data-data perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah hukumnya selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

B.1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Sisa perkara pidana biasa pada tahun 2022 sejumlah 91 perkara, tipikor sebanyak 21 perkara, perdata gugatan sebanyak 41 perkara, Perdata gugatan Sederhana sebanyak 2 Perkara, Perdata permohonan sebanyak 1 perkara dan Perdata permohonan Konsinyasi sebanyak 0 perkara. Semua sisa perkara dapat diselesaikan

semuanya pada tahun 2022. Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Data sisa perkara tahun 2021 yang diputus pada tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Sisa Perkara tahun 2021 yang diputus pada Tahun 2022
pada Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Perkara sisa tahun 2021 yang putus tahun 2022	Ket
1	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung			
	- Pidana Biasa	3	3	
	- Pidana Tindak Korupsi	0	0	
	- Perdata Gugatan	3	3	
2	PN Pangkalpinang			
	- Pidana Biasa	38	38	
	- Pidana Anak	0	0	
	- Pidana Tinda Korupsi	18	18	
	- Perdata Gugatan	13	13	
	- Perdata Gugatan Sederhana	2	2	
	- Perdata Permohonan	1	1	
3	PN Sungailiat			
	- Pidana Biasa	17	17	
	- Perdata Gugatan	11	11	
	- Perdata Anak	0	0	
4	PN Tanjungpandan			
	- Pidana Biasa	9	9	
	- Perdata Gugatan	9	9	
	- Pedata Permohonan	1	1	
5	PN Koba			
	- Pidana Biasa	14	14	
	- Perdata Gugatan	4	4	
6	PN Mentok			
	- Pidana Biasa	10	10	
	- Perdata Gugatan	1	1	

B.2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Batas penyelesaian Perkara yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding, dan maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan khusus penyelesaian perkara tingkat banding dan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21/DJU/SK/OT.013/3/2022 Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berikut ini rincian jumlah perkara di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang diputus tepat waktu di tahun 2022.

Tabel 2.5
Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022
pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Perkara yang Putus Tepat Waktu	Perkara yang Putus Tidak Tepat Waktu	Persentase
1	- Pidana Biasa	83	83	-	100 %
2	- Pidana Anak	3	3	-	100 %
3	- Pidana Tindak Korupsi	8	8	-	100 %
4	- Perdata Gugatan	25	25	-	100 %
JUMLAH		119	119	-	100 %

Perkara Pidana Biasa, Pidana Anak, Pidana Tindak Korupsi dan Perkara Perdata Gugatan yang masuk selama tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yaitu sebanyak 119 perkara dan 6 perkara sisa tahun 2021. Tidak Terdapat perkara yang diselesaikan lewat dari 30 hari sesuai SOP yang ditetapkan yaitu 0 perkara.

Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022
pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Perkara yang Putus Tepat Waktu	Perkara yang Putus tidak Tepat Waktu	Persentase
PN Pangkalpinang					
1	- Pidana Biasa	440	368	72	83,63
	- Pidana Singkat	-	-	-	100
	- Pidana Cepat/Ringan	4	4	-	100

NO	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Perkara yang Putus Tepat Waktu	Perkara yang Putus tidak Tepat Waktu	Persentase
	- Pidana Lalu Lintas	11.142	11.142	-	100
	- Pidana Tindak Korupsi	52	38	14	73
	- Pidana Anak	21	21	0	100
	- Pidana Pra Peradilan	7	7	-	100
	- PHI	24	23	1	95,8
	- Perdata Gugatan	84	69	15	82,14
	- Perdata Gugatan Sederhana	20	17	3	85
	- Perdata Permohonan	124	118	6	95,2
	- Perdata Permohonan Konsinyasi	-	-	-	100
	PN Sungailiat				
	- Pidana Biasa	310	310	-	100
	- Pidana Singkat	-	-	-	100
	- Pidana Cepat/Ringan	6	6	-	100
	- Pidana Lalu Lintas	8.884	8.884	-	100
2	- Pidana Anak	23	23	-	100
	- Pidana Pra Peradilan	4	4	-	100
	- Perdata Gugatan	65	65	-	100
	- Perdata Gugatan Sederhana	23	23	-	100
	- Perdata Permohonan	103	103	-	100
	PN Tanjungpandan				
	- Pidana Biasa	182	182	-	100
	- Pidana Singkat	-	-	-	-
	- Pidana Cepat/Ringan	3	3	-	100
	- Pidana Lalu Lintas	5.887	5.887	-	100
3	- Pidana Anak	3	3	-	100
	- Pidana Pra Peradilan	4	4	-	100
	- Perdata Gugatan	35	35	-	100
	- Perdata Gugatan Sederhana	79	78	1	98,7
	- Perdata Permohonan	4	4	-	100
	PN Koba				
	- Pidana Biasa	169	169	-	100
4	- Pidana Singkat	-	-	-	-
	- Pidana Cepat/Ringan	2	2	-	100

NO	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Perkara yang Putus Tepat Waktu	Perkara yang Putus tidak Tepat Waktu	Persentase	
5	- Pidana Lalu Lintas	1.607	1.607	-	100	
	- Pidana Anak	5	5	-	100	
	- Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	
	- Perdata Gugatan	30	30	-	100	
	- Perdata Gugatan Sederhana	16	16	-	100	
	- Perdata Permohonan	8	8	-	100	
	PN Mentok					
	- Pidana Biasa	148	148	-	100	
	- Pidana Singkat	-	-	-	-	
	- Pidana Cepat/Ringan	3	3	-	100	
	- Pidana Lalu Lintas	1.116	1.116	-	100	
	- Pidana Anak	8	8	-	100	
	- Pidana Pra Peradilan	-	-	-	100	
	- Perdata Gugatan	10	10	-	100	
- Perdata Gugatan Sederhana	4	4	-	100		
- Perdata Permohonan	29	29	-	100		
- Perdata Permohonan Konsinyasi	2	2	-	100		

Terdapat perkara putus yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang hal ini dikarenakan pihak yang berada di luar kota pangkalpinang sehingga saat ada panggilan sidang yang bersangkutan tidak hadir, dan untuk perkara Tipikor diputus tidak tepat waktu dikarenakan jumlah saksi yang banyak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pemeriksaan saksi. Begitu juga pada pengadilan Negeri Tanjungpandan, dikarenakan masih proses pemeriksaan saksi sehingga perkara putus tidak tepat waktu.

B.3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Berikut ini rincian jumlah perkara di tahun 2022 pada Pengadilan Negeri diwilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Tabel 2.7
Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022
pada Pengadilan Sewilayah Hukum PT. Bangka Belitung

NO	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS	BANDING	KASASI	PK	YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	KET
1	PT Bangka Belitung						
	- Pidana Biasa	83	-	55	-		
	- Pidana Anak	3	-	-	-		
	- Pidana Tindak Korupsi	8	-	-	-		
	- Perdata Gugatan	25	-	11	-		
2	Pangkalpinang						
	- Pidana Biasa	368	25	71	9	263	
	- Pidana Singkat	1	-	-	-	1	
	- Pidana Cepat/Ringan	4	1	-	-	3	
	- Pidana Lalu Lintas	11.142	-	-	-	11.142	
	- Pidana Tindak Korupsi	35	10	10	1	14	
	- Pidana Anak	16	1	-	-	15	
	- PHI	23	-	-	-	23	
	- Perdata Gugatan	70	11	7	3	49	
	- Perdata Gugatan Sederhana	21	11	7	3	-	
	Perdata Permohonan Konsinyasi						
3	Sungailiat						
	- Pidana Biasa	310	14	10	83	203	
	- Pidana Singkat	-	-	-	-	-	
	- Pidana Cepat/Ringan	6	1	-	-	5	
	- Pidana Lalu Lintas	8.884	-	-	-	8.884	
	- Pidana Anak	23	-	-	-	23	
	- Pidana Pra Peradilan	4	-	-	-	4	
	- Perdata Gugatan	65	9	12	1	43	

NO	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS	BANDING	KASASI	PK	YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	KET
	- Perdata Gugatan Sederhana	23	-	-	-	23	
	- Perdata Permohonan	103	-	-	-	103	
	Tanjungpandan						
4	- Pidana Biasa	182	19	7	-	156	
	- Pidana Singkat	-	-	-	-	-	
	- Pidana Cepat/Ringan	3	-	-	-	3	
	- Pidana Lalu Lintas	5.887	-	-	-	5.387	
	- Pidana Anak	3	-	-	-	3	
	- Pidana Pra Peradilan	4	-	-	-	4	
	- Perdata Gugatan	35	2	2	-	31	
	- Perdata Gugatan Sederhana	4	-	-	-	4	
	- Perdata Permohonan	79	-	-	-	79	
	Koba						
5	- Pidana Biasa	169	11	8	6	144	
	- Pidana Singkat	-	-	-	-	-	
	- Pidana Cepat/Ringan	2	-	-	-	2	
	- Pidana Lalu Lintas	1.607	-	-	-	1.607	
	- Pidana Anak	5	1	1	-	3	
	- Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	-	
	- Perdata Gugatan	30	2	2	-	26	
	- Perdata Gugatan Sederhana	16	-	-	-	16	
		- Perdata Permohonan	8	-	-	-	8
	Mentok						
6	- Pidana Biasa	148	14	6	15	113	
	- Pidana Singkat	-	-	-	-	-	
	- Pidana Cepat/Ringan	3	-	-	-	-	

NO	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS	BANDING	KASASI	PK	YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	KET
	- Pidana Lalu Lintas	1.116	-	-	-	-	
	- Pidana Anak	8	-	-	-	-	
	- Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-	-	
	- Perdata Gugatan	10	1	-	1	8	
	- Perdata Gugatan Sederhana	4	-	-	-	-	
	- Perdata Permohonan	29	-	-	-	-	
	- Perdata Permohonan Konsinyasi	4	-	-	-	-	

B.4. Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi

Mediasi di Pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum Pemeriksaan pokok perkara Perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani Perkaranya. Penggunaan Mediator hakim dan penyelenggara Mediasi disalah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ada beberapa hal baru yang diatur salah satunya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam PERMA ini.

Berikut ini jumlah perkara perdata tahun 2022 pada Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang berhasil di mediasi :

Tabel 2.8
Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi Tahun 2022
pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum PT. Babel

NO	PENGADILAN NEGERI	PERKARA MEDIASI	MEDIASI		KETERANGAN
			Berhasil	Gagal	
1	Pangkalpinang	37	4	1	1 masih proses mediasi
2	Sungailiat	28	1	26	
3	Tanjungpandan	33	2	16	
4	Koba	12	-	12	
5	Mentok	3	1	2	1 Berhasil dengan Akta Damai

B.5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Berikut ini jumlah perkara pidana anak Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang berhasil melakukan Diversi :

Tabel 2.9 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

No	PENGADILAN NEGERI	PERKARA MASUK	DIVERSI		KET
			Berhasil	Gagal	
1	Pangkalpinang	11	1	10	
2	Sungailiat	4	1	3	
3	Tanjungpandan	3	2	1	
4	Koba	3	-	3	
5	Mentok	3	-	3	

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Tujuan akreditasi penjamin mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima. Salah satu kegiatan penting dari akreditasi adalah meningkatkan layanan kepada publik dan memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Implementasi pelayanan publik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

C.1.Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM)

Pos bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu, karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

a. Penerima Bantuan Hukum berhak :

1. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
2. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penerima Bantuan Hukum wajib :

1. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Selama tahun 2022, posbakum yang telah diberikan kepada pencari keadilan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2022
pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	PENGADILAN NEGERI	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	Pangkalpinang	Rp 61.200.000	Rp 61.180.000	Rp 20.000	344 Orang
2	Sungailiat	Rp 44.000.000	Rp 44.000.000	Rp -	249 Orang
3	Tanjungpandan	Rp 44.000.000	Rp 43.648.000	Rp 352.000	160 Orang
4	Koba	Rp 24.000.000	Rp 23.900.000	Rp 100.000	46 orang / 237Jam Layanan
5	Mentok	Rp 24.000.000	Rp 23.980.000	Rp 20.000	36 Orang

C.2.Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Sidang Keliling bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta untuk mengimplementasikan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat. Namun

tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, termasuk Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

C.3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Masyarakat yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis. Pada tahun 2022, satuan kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak ada yang mendapat anggaran untuk Perkara Prodeo, sehingga tidak ada realisasi untuk program prodeo.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

A. KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan SDM adalah sangat penting, dimana Aparatur Peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam menyelenggarakan system pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai *tujuan Good Government*. Khususnya di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Umum) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan sehingga Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi sebagai salah satu pendukung manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi.

Di bidang Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, selaku instansi pengemban kekuasaan kehakiman di tingkat Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terjawantahkan dalam sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*), maka sudah barang tentu kenyataan tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



Secara umum Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Umum) yang berada dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan pembinaan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Per Per 31 Desember 2022 sebanyak 188 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Pengadilan Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

No	PENGADILAN NEGERI	KELAS	JUMLAH PERSONIL			KETERANGAN
			TOTAL (ORANG)	L (ORANG)	P (ORANG)	
1	PT Bangka Belitung	IB	39	16	23	
2	PN Pangkalpinang	IA	46	26	20	
3	PN Sungailiat	IB	36	24	12	
4	PN Tanjungpandan	II	20	13	7	
5	PN Koba	II	22	12	10	
6	PN Mentok	II	25	14	11	
JUMLAH			188	105	83	

Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dengan rincian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 3.2
**Rincian Tugas Pokok Sub Bagian Kepegawaian
Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung**

No	Tugas Pokok	Rincian	Pelaksana
1.	Keberjalanan Manajemen Dan Administrasi Ortala Serta Menganalisis Beban Kerja Dan Perumusan Formasi, Serta Pengelolaan Pengadaan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> ▶▶▶ Menjalankan tugas keorganisasian ▶▶▶ ketetaksanaan kantor ▶▶▶ Menganalisa beban kerja; ▶▶▶ Perumusan formasi; ▶▶▶ Pengelolaan pengadaan pegawai ▶▶▶ Pengangkatan dan pendataan Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak 	<ul style="list-style-type: none"> ▶▶▶ Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi ▶▶▶ Upt. Ortala
2.	Ketatausahaan Pegawai (Umum)	<ul style="list-style-type: none"> ▶▶▶ Pengelolaan persuratan kepegawaian ▶▶▶ KARIS ▶▶▶ KARSU ▶▶▶ KARPEG ▶▶▶ Penyelenggaraan Absensi 	<ul style="list-style-type: none"> ▶▶▶ Pengadministrasi Umum Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

No	Tugas Pokok	Rincian	Pelaksana
		▶▶ Penanganan Arsip Dinamis	
3.	Mutasi Pegawai	▶▶ Kenaikan Pangkat (KNP) ▶▶ Penyesuaian Masa Kerja (PMK) ▶▶ Promosi Jabatan Fungsional dan Struktural ▶▶ Pindah Tugas	▶▶ Analis Kepegawaian ▶▶ Pengelola Mutasi Pegawai
4.	Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	▶▶ Penerbitan DP3 ▶▶ Pemeriksaan Absensi Pegawai ▶▶ Penegakan disiplin kerja dan kinerja berkaitan dengan KMA 71/2007 dan KMA 69/2009 ▶▶ Proses indisipliner pegawai ▶▶ Menindaklanjuti pengaduan	▶ Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi ▶▶ Pengadministrasi Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai
5.	Pengembangan Pegawai	▶▶ Pelaksanaan Ujian Dinas ▶▶ Diklat dan Pelatihan ▶▶ Pemberian Izin Belajar	▶▶ Pengadministrasi Pembinaan dan Pengembangan Pegawai
6.	Kesejahteraan Pegawai	▶▶ KGB ▶▶ ASKES ▶▶ TASPEN ▶▶ Bapertarum	▶▶ Pengadministrasi Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai
7.	Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai	Pemberhentian Pegawai ▶▶ Pemensiunan ▶▶ Kenaikan Pangkat Pengabdian dan / atau kenaikan pangkat anumerta	▶ Pengadministrasi Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai
8.	Pengelolaan data dan Dokumen kepegawaian	▶▶ Mengolah data dan dokumen pegawai ▶▶ Memelihara data dan dokumen Serta sistem aplikasi informasi Pegawai (SIKEP) ▶▶ Up-dating, verifikasi dan validasi database pegawai ▶▶ Penyaji data dan informasi up to data kepegawaian ▶▶ Visualisasi data pegawai	▶▶ Pengelola Data dan Dokumen Pegawai

Secara detil Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Umum) di lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terbagi 2 (dua) kelompok, yaitu Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, dengan matrik SDM sebagai berikut :

1. PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tabel 3.3
Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

1	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		TINGKAT PENDIDIKAN	PENDIDIKAN	
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT		INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	H. Mas Hushendar, S.H., M.H.	195610021985031001	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	30 November 2022	35 tahun 10 bulan	IV/e	2014-04-01	PASCASARJANA	STIH IBLAM	2004
2	Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.	196204211988032003	Wakil Ketua Tingkat Banding	24 Mei 2022	34 tahun 10 bulan	IV/e	2020-04-01	DOKTOR	Universitas jayabaya	2017
3	Heru Prakosa, S.H., M.H.	196301261982031002	Hakim Tinggi	17 Mei 2022	40 tahun 7 bulan	IV/e	1 okt 2019	PASCASARJANA	SEKOLAH TINGGI HUKUM BANDUNG	2010
4	Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.	195802271985121001	Hakim Tinggi	2021-02-23	37 tahun 1 bulan	IV/e	2018-04-01	PASCASARJANA	UNIV PUTRA BANGSA	2004
5	Sri Widiyastuti, S.H., KN., M.H.	196004141988032002	Hakim Tinggi	2020-04-21	34 tahun 10 bulan	IV/e	2020-10-01	PASCASARJANA	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	2019
6	Tirolan Nainggolan, S.H.	196206131988032001	Hakim Tinggi	2020-06-22	34 tahun 10 bulan	IV/e	2020-10-01	STRATA I	USU	1986
7	Rahayuningsih, S.H., M.H.	196202281988032002	Hakim Tinggi	2019-09-16	34 tahun 10 bulan	IV/e	2021-04-01	PASCASARJANA	Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya	2003
8	HJ Ristati, S.H., M.H.	196208281989032005	Hakim Tinggi	2020-06-10	33 tahun 10 bulan	IV/e	2021-04-01	STRATA I	Uii yogyakarta	1987
9	Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H.	196103081988032002	Hakim Tinggi	2020-11-03	34 tahun 10 bulan	IV/e	2021-04-01	PASCASARJANA	Univ islam riau	2010
10	Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.	196004041987022001	Hakim Tinggi	2020-04-21	35 tahun 11 bulan	IV/d	2018-04-01	PASCASARJANA	Univ. Krisnadwipayana	2004
11	Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.	196803291992122001	Hakim Tinggi	2021-12-06	30 tahun 1 bulan	IV/d	2021-04-01	PASCASARJANA	Univ.17 Agustus 1945 Jakarta	2011
12	Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.	196708151992122001	Hakim Tinggi	2022-12-06	30 tahun 1 bulan	IV/d	2021-04-01	PASCASARJANA	SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM	2003
13	Timbul Wahyudi, S.H.MAP.,	1961040402202003045	Hakim Ad Hoc Tipikor	2020-03-11	2 tahun 10 bulan	-	-	PASCASARJANA	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi	2013

1	2	3	JABATAN		8	GOLONGAN PANGKAT		11	PENDIDIKAN		
			6	7		9	10		12	13	
										Negara Republik Indonesia	
14	Mohamad Untung Pramono, S.H., M.T., M.H.	1963071002202105004	Hakim Ad Hoc Tipikor	2021-04-27	1 tahun 7 bulan	-	-	PASCASARJANA	ITB	2008	
15	Drs. Tajudin Nur, S.H.	196406081984031004	Sekretaris	2020-09-14	38 tahun 10 bulan	IV/c	2016-10-01	STRATA I	Universitas Tanjungpura	2002	
16	Tanwiman Syam, S.H.	196107121982031004	Panitera Tingkat Banding	2021-10-04	40 tahun 10 bulan	IV/c	2020-04-01	STRATA I	Universitas Ekasakti	1989	
17	Mahfud Widi Priyono, S.T., M.H.	197311102006041004	Kepala Bagian	2019-12-16	16 tahun 9 bulan	IV/a	2020-04-01	PASCASARJANA	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang	2011	
18	Luki Pudi Asmara, S.E., M.H.	197604272006041003	Kepala Bagian	2021-04-01	16 tahun 9 bulan	IV/a	2020-04-01	PASCASARJANA	STIH YAPERTIBA, Pangkal Pinang	2011	
19	Rahardhi Perdana, S.H., M.H.	197806222002121008	Panitera Muda	18 April 2022	21 tahun 1 bulan	IV/a	1 april 2022	PASCA SARJANA	STIH YAPERTIBA, Pangkal Pinang	2015	
20	Drs Zulmiadi, S.H.	196108111983031005	Panitera Muda	2021-06-23	39 tahun 10 bulan	III/d	2009-10-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang	1997	
21	Bintar Asli, S.H.	196102121982031003	Panitera Muda	2021-06-23	40 tahun 10 bulan	III/d	2010-04-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang	1997	
22	Suryati, S.I.P.	196508081985032001	Panitera Pengganti	2020-12-18	37 tahun 10 bulan	III/d	2013-04-01	STRATA I	Universitas Terbuka	2005	
23	Yoeri, S.H.	198602152009041004	Panitera pengganti	02 Desember 2022	13 tahun 9 bulan	III/c	2019-10-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang	2010	
24	Yus Yuli, S.H.	196704251990031001	Kepala Sub Bagian	2015-12-31	32 tahun 10 bulan	III/d	2014-04-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang	2004	
24	Siti Komari, S.E.	198401142009042004	Kepala Sub Bagian	2015-12-31	13 tahun 9 bulan	III/d	2020-04-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Pangkal Pinang	2007	
25	Irhansyah, S.Kom.	198004172009121003	Kepala Sub Bagian	2019-12-16	13 tahun 1 bulan	III/c	2018-04-01	STRATA I	Universitas Bina Nusantara	2001	
26	Fitriyanti Utari, S.E.	198407022011012011	Kepala Sub Bagian	2021-04-01	12 tahun 0 bulan	III/c	2019-04-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Pangkal Pinang	2007	
27	Irva Nofianti, S.Kom.	198209242011012014	Bendahara Tingkat Banding/Eselon I	2020-08-31	12 tahun 0 bulan	III/c	2019-04-01	STRATA I	Universitas Bina Darma, Palembang	2005	

1	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		TINGKAT PENDIDIKAN	PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT		INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Dewi Wulandari, S.H.	198706052009122008	Penyusun laporan Keuangan	2020-08-31	13 tahun 1 bulan	III/b	2019-10-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang	2014	
29	Wenny Fitriani, S.Kom.	197809032011012003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	2020-08-31	12 tahun 0 bulan	III/b	2019-10-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur, Pangkalpinang	2014	
30	Nur Anggraini, S.H.	197512012006042003	Analisis Protokol	2021-03-01	16 tahun 9 bulan	III/b	2020-10-01	STRATA I	STIH. Pertiba Pangkal Pinang	2015	
31	Dessy Triastuti, A.Md.	198312212009042004	Bendahara Tingkat Banding/Eselon I	2021-04-14	13 tahun 9 bulan	III/b	2021-04-01	DIPLOMA III	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Atma Luhur, Pangkal Pinang	2005	
32	Danang Sedayu, S.I.P.	199412272019031008	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	2021-01-14	3 tahun 10 bulan	III/a	2019-03-01	STRATA I	Universitas Gadjah Mada (UGM)	2017	
33	Nyimas Zihni Badzlina, S.E.	199607182020122018	Verifikator Keuangan	2020-12-01	2 tahun 1 bulan	III/a	2020-12-01	STRATA I	Universitas Sriwijaya	2019	
34	Meri Kartika Sari, S.I.P., S.Pd.I., S.Pd.	198703032022032001	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2022-03-01	11 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Sriwijaya, STAI Baturaja, Universitas Terbuka	2008, 2011, 2020	
35	Kurnia Hutami Aisyarah, A.Md., S.H.	198909102009122001	Analisis perkara peradilan	2022-04-04	13 Tahun 01 Bulan	III/a	2022-04-04	STRATA I	Universitas Terbuka	2021	
36	Nurafni, S.H.	199807212022032006	Analisis Perkara Peradilan	2022-03-01	11 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	UPN Veteran Jakarta	2020	
37	Lady Elisa Pakpahan, A.Md.T.	199801152020122003	Pengelola Sistem Dan Jaringan	2021-12-01	2 tahun 1 bulan	II/c	2020-12-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Medan	2018	
38	Yulia Resti Nurvani, A.Md.Ak.	199707272020122011	Pengelola Barang Milik Negara	2021-12-01	2 tahun 1 bulan	II/c	2020-12-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Lampung	2019	
39	Erni Novianti, A.Md.AB	199611192022032015	Pengelola Perkara	2022-03-01	11 bulan	II/c	2022-03-01	DIPLOMA III	Polteknik Sriwijaya	2018	

2. PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG

Tabel 3.4
Matriks Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pangkalpinang

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA
			GOL RUAN G	TMT	NAMA	TMT	TH N	BL N	NAMA	LULUS TAHU N	JML JA M	NAMA	LULUS TAHU N	TINGKA T	
1	RADEN HERU KUNTODEWO, S.H., M.H.	19690810 199603 1 001	IV/c	01/04/2020	Ketua	01/07/2022	26	10	DIKLAT PRAJAB TK III	1997		UNIVERSITAS GAJAH MADA	2014	S2	10/08/1969
2	IRWAN MUNIR, S.H., M.H.	19710101 199303 1 006	IV/c	01/04/2020	Wakil Ketua	02/01/2023	29	4	DIKLAT KEPEMIMPINAN TEKNIS BAGI PIMPINAN	2017	120	UNIVERSITAS ANDALAS	2007	S2	01/01/1971
3	ISKANDAR JAYA, S.H., M.H.	19651011 199203 1 005	IV/b	01/04/2021	Panitera	11/12/2020	30	10	DIKLAT PIM TK.III	2014	839	UNIVERSITAS BINA DARMA	2006	S2	11/10/1965
4	MULYADI ARIBOWO, S.H., M.H.	19760311 200112 1 001	IV/b	01/04/2022	Hakim	28/03/2005	21	1	DIKLAT PRAJAB TK III	2002	135	UNIVERSITAS ISLAM KADIRI	2017	S2	11/03/1976
5	SULISTIYANTO ROKHMAD BUDIHARTO, S.H.	19760810 200112 1 001	IV/b	01/04/2022	Hakim	28/03/2005	21	1	DIKLAT PRAJAB TK III	2002	135	UNIVERSITAS GAJAH MADA	2000	S1	10/08/1976
6	HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, S.H., M.H.	19761104 200212 1 002	IV/a	01/04/2019	Hakim	01/12/2005	20	1	DIKLAT PRAJAB TK III	2003	135	UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG	2010	S2	04/11/1976
7	WAHYUDINSYAH. P. S.H., M.Hum.	19800324 200212 1 002	IV/a	01/04/2019	Hakim	23/12/2005	20	1	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2003	135	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	2005	S2	24/03/1980

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA
			GOL RUAN G	TMT	NAMA	TMT	TH N	BL N	NAMA	LULUS TAHU N	JML JA M	NAMA	LULUS TAHU N	TINGKA T	
8	DWINATA ESTU DHARMA, S.H., M.H.	19780125 200212 1 004	IV/a	01/04/2019	Hakim	02/01/2006	20	1	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2003	135	UNIVERSITAS AIRLANGGA	2015	S2	25/01/1978
9	WISNU WIDODO, S.H.	19760421 200212 1 005	IV/a	01/04/2019	Hakim	28/01/2006	20	1	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2003	135	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	2000	S1	21/04/1976
10	TANTY HELEN MANALU, S.H.,M.H.	19800528 200312 2 001	IV/a	01/04/2020	Hakim	06/12/2006	19	1	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2004	135	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN	2016	S2	28/05/1980
11	DEWI SULISTIARINI, S.H.	19800111 200312 2 001	IV/a	01/04/2020	Hakim	08/02/2007	19	1	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2004	135	UNIVERSITAS BOROBUDUR JAKARTA	2002	S1	11/01/1980
12	MUCHSIN, S.H.,M.H.	19710812 199303 1 001	IV/a	01/10/2020	Panitera Muda PHI	11/12/2020	21	10	DIKLAT PRAJAB GOL.III	1994		STIH PERTIBA	2015	S2	12/08/1971
13	EPIYANDA, S.E.	19770405 200604 1 003	IV/a	01/04/2021	Sekretaris	29/12/2015	17	1	DIKLAT PIM TK.III	2019	857	STIE PERTIBA	2001	S1	05/04/1977
14	ANSHORI HIRONI, S.H.	19780622 200704 1 002	III/d	01/04/2019	Hakim	05/07/2010	15	9	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2008	135	STIH IBLAM	2005	S1	22/06/1978
15	VIDYA ANDINI TUPPU, S.H., M.H.	19830417 200704 2 001	III/d	01/04/2019	Hakim	21/07/2010	15	9	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2008	135	UNIVERSITAS BOSOWA	2017	S2	17/04/1983
16	DEDEK AGUS KURNIAWAN, S.H.,M.H.	19840810 200704 1 001	III/d	01/04/2019	Hakim	11/02/2011	15	9	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2008	135	STIH PERTIBA	2011	S2	10/08/1984
17	YULIA ROZA, S.H.	19790814 200801 2 013	III/d	01/10/2020	Panitera Muda Perdata	11/12/2020	15	0	DIKLAT PKP	2021	830	UNIVERSITAS MUHAMMDIYA	2003	S1	14/08/1979

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA
			GOL RUAN G	TMT	NAMA	TMT	TH N	BL N	NAMA	LULUS TAHU N	JML JA M	NAMA	LULUS TAHU N	TINGKA T	
												H SUMATERA BARAT			
18	JUWITA SARI, S.H.	19801116 200312 2 004	III/d	01/04/2021	Panitera Muda Pidana	11/12/2020	19	1	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2004	90	STIH PERTIBA	2007	S1	16/11/1980
19	SUHARTONO, S.E.	19750628 200912 1 002	III/d	01/04/2021	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	29/12/2015	17	8	DIKLAT PIM TK.IV	2017	908	STIE IBEK	2004	S1	28/06/1975
20	MARISA DESTRIANA INDAH, S.H.	19841230 200904 2 008	III/d	01/04/2021	Panitera Pengganti	03/06/2015	13	9	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2010	135	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	2007	S1	30/12/1984
21	REZKY DEVILIA, S.H.,M.H.	19861213 200904 2 006	III/d	01/04/2021	Panitera Pengganti	09/06/2015	13	9	DIKLAT PKP	2021	830	STIH PERTIBA	2014	S2	13/12/1986
22	SUGIYANTO, S.E.	19820202 200912 1 005	III/d	01/04/2022	Kassubag Umum dan Keuangan	01/08/2017	13	1	DIKLAT PKP	2020	830	STIE IBEK	2007	S1	02/02/1982
23	USPA DEMARATI, S.H.	19850804 200912 2 002	III/d	01/04/2022	Panitera Pengganti	19/08/2014	13	1	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2011	288	STIH PERTIBA	2009	S1	04/08/1985
24	INDI, S.H.	19690424 199403 1 003	III/c	01/04/2019	Panitera Muda Tipikor	11/12/2020	23	10	DIKLAT PRAJAB GOL.III	1995		STIH PERTIBA	2010	S1	24/04/1969
25	MARINA YUNISA, S.H., M.H.	19880625 201101 2 006	III/c	01/04/2019	Panitera Pengganti	24/05/2016	12	0	DIKLAT PKP	2021	830	STIH PERTIBA	2014	S2	25/06/1988
26	MAYA FATMA PRATIWI, S.H.	19860627 201101 2 009	III/c	01/04/2019	Pranata Keuangan APBN Penyelia	01/04/2021	12	0	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2012	243	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	2008	S1	27/06/1986

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA
			GOL RUAN G	TMT	NAMA	TMT	TH N	BL N	NAMA	LULUS TAHUN	JML JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT	
27	RITA KUMALA DEWI, S.H.	19820701 201101 2 009	III/c	01/04/2019	Penyusun Laporan Keuangan	30/08/2020	12	0	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2012	243	STIH PERTIBA	2009	S1	01/07/1982
28	FERY SETIAWAN, S.H.	19840828 200604 1 002	III/c	01/10/2019	Panitera Muda Hukum	11/12/2020	16	9	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2007	90	STIH PERTIBA	2011	S1	28/08/1984
29	FATMA WAHYUNA, A.Md.	19800209 200212 2 003	III/c	01/10/2019	Panitera Pengganti	03/09/2007	17	1	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2003	108	ALTRI	2001	D3	09/02/1980
30	TRI PALUPI, S.Kom	19880218 200904 2 002	III/c	01/04/2020	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	23/04/2019	10	9	DIKLAT PKP	2020	830	STMIK ATMA LUHUR	2013	S1	18/02/1988
31	JULI ISNADI, S.H.	19730713 199303 1 002	III/c	01/04/2020	Jurusita	09/06/2015	21	4	DIKLAT PRAJAB GOL.II	1994		STIH PERTIBA	2009	S1	13/07/1973
32	MALVIANA, S.H.	19880105 200904 2 003	III/c	01/04/2020	Pranata Keuangan APBN Penyelia	01/04/2021	10	9	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2010	90	STIH PERTIBA	2011	S1	05/01/1988
33	NERLY EKA UTAMI, S.H.	19871212 200604 2 006	III/c	01/10/2020	Panitera Pengganti	09/06/2015	11	9	DIKLAT PKP	2021	830	STIH PERTIBA	2011	S1	12/12/1987
34	SUGIARTO,S.AP.	19710330 199303 1 003	III/c	01/04/2022	Jurusita	16/05/2013	21	4	DIKLAT PRAJAB GOL.II	1994		UNIV TERBUKA	2013	S1	30/03/1971
35	HARRY WIJAYANTO, A.Md	19860205 200912 1 004	III/b	01/04/2022	Jurusita Pengganti	16/05/2013	11	1	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2011	237	UNIV GUNADARMA	2007	D3	05/02/1986
36	DESSY YULIANDA, S.H.	19850727 201903 2 004	III/a	01/03/2019	Analisis Perkara Peradilan	01/03/2019	3	10	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2019	511	UNIVERSITAS ANDALAS	2007	S1	27/7/1985

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA
			GOL RUAN G	TMT	NAMA	TMT	TH N	BL N	NAMA	LULUS TAHU N	JML JAM	NAMA	LULUS TAHU N	TINGKA T	
37	VREDDY ICHSANY, S.H.	19860726 201903 1 003	III/a	01/03/2019	Analisis Perkara Peradilan	01/03/2019	3	10	DIKLAT PRAJAB GOL III	2019	511	STIH PERTIBA	2009	S1	26/07/1986
38	MARYONO	19710423 200212 1 004	III/a	01/04/2019	Jurusita	17/09/2015	20	1	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2003		SMA SRIWIJAYA	1993	SLTA	23/04/1971
39	NARDIAZ ABDILLAH	19810520 200212 1 005	III/a	01/04/2019	Jurusita Pengganti	16/05/2015	20	1	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2003		SMKN 1	2001	SMK	20/05/1981
40	REINHARD SIAHAAN, S.H.	19970521 2020 12 1 006	III/a	01/12/2020	Analisis Perkara Peradilan	01/02/2021	2	1	DIKLAT PRAJAB GOL. III	2021	647	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	2019	S1	21/05/1997
41	ELISA PUTRI CRHISTANTY B. NAHOR, S.H.	19981019 202203 2 011	III/a	01/03/2022	Analisis Perkara Peradilan	01/03/2022	0	10	-	-	-	UNIVERSITAS INDONESIA	2020	S1	19/10/1998
42	YOEDI TRI SURYAPERMANA, S.H.	19890403 200904 1 001	III/a	01/04/2022	Jurusita Pengganti	28/09/2015	8	9	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2010	90	STIH PERTIBA	2021	S1	03/04/1989
43	BELDA MIFTAULI SIMANJUNTAK, A.Md.	19961230 201903 2 007	II/c	01/03/2019	Pengelola Sistem dan Jaringan	01/03/2019	6	10	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2019	511	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	2017	D3	30/12/1996
44	GALIH AL FARISI, A.Md.	19890531 202012 1 006	II/c	01/12/2020	Pengadministrasi Registrasi Perkara	28/01/2021	5	1	-	-	-	POLITEKNIK POS INDONESIA	2011	D3	31/05/1989
45	MEI ROSINTAN SILABAN, A.Md.Ak.	19980531 202203 2 009	II/c	01/03/2022	Pengelola Barang Milik Negara	01/03/2022	3	4	-	-	-	POLITEKNIK NEGERI MEDAN	2019	D3	31/05/1998
46	SITI AINAYANI RAMADANTI. A.Md.AB.	19991227 202203 2 004	II/c	01/03/2022	Pengelola Perkara	01/03/2022	3	4	-	-	-	POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA	2020	D3	27/12/1999

3. PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

Tabel 3.5
Matriks Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sungailiat

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA KESELURUHAN		LATIHAN PENDIDIKAN			PENDIDIKAN			TANGGAL LAHIR (TGL/BLN/THN)
			GOL / RUANG	TMT	NAMA	TMT (BLN/TGL/THN)	THN	BLN	NAMA	THN	JML JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zulkifli, S.H., MH.	19660809 199603 1002	lvc	01/04/20	Ketua	09/02/2022	26	10	PHI	2010		UNAND	2010	S2	09/08/1966
2	Utari Wiji Hastaningsih, S.H.	19770115 200112 2002	lvb	01/04/22	Hakim	15/10/2021	21	1				UGM	1999	S1	15/01/1977
3	Melinda Aritonang, S.H.	19780911 200112 2002	lvb	01/04/22	Wakil Ketua	14/04/2022	21	1	Mediator	2020		USU MEDAN	2001	S1	11/09/1978
4	Muhammad Hadli, S.H., M.H.	19670515 199003 1007	lva	01/10/17	Panitera	16/12/2020	32	10	SAKIP	2020		UNIV. MUHAMMAD IYAH	2016	S2	15/05/1967
5	HJ. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.	19770331 200212 2004	lva	01/04/19	Hakim	27/07/2020	20	1				UNISRI	2010	S2	31/03/1977
6	Rosmala Sari, S.E.	19810704 200604 2004	lva	01/04/21	Sekretaris	30/12/2015	16	9	PIM III	2019		STIE YKPN	2004	S1	04/07/1981

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA KESELURUHAN		LATIHAN PENDIDIKAN			PENDIDIKAN			TANGGAL LAHIR (TGL/BLN/THN)
			GOL / RUANG	TMT	NAMA	TMT (BLN/TGL/THN)	THN	BLN	NAMA	THN	JML JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Nofriandi, S.H.	19811225 200904 1006	IIId	01/04/21	PP	04/11/2021	13	9				UNIV. JANABADRA	2004	S1	25/12/1981
8	Merie Lhuvantie, S.E.	19830504 200904 2007	IIId	01/04/21	Kasubbag Kepeg. &Ortala	30/12/2015	13	9	PKP	2020		U T Y	2006	S1	04/05/1983
9	Sapperijanto, S.H., M.H.	19841024 200904 1004	IIId	01/04/21	Hakim	13/06/2022	13	9				UNAND	2017	S2	24/10/1984
10	Sumanjaya, S.H.	19860117 200904 1002	IIId	01/04/21	Panmud Pidana	15/02/2021	13	9				STIH PERTIBA	2008	S1	17/01/1986
11	Dewi Aprilia Puspita Ningrum, S.Kom.	19860428 200904 2006	IIId	01/04/21	Kasubbag Umum & Keuangan	24/09/2019	13	9	PKP	2020		AMIKOM	2008	S1	28/04/1986
12	Jovan Meiril, S.T.	19830521 201101 1005	IIId	01/04/21	Kasubbag PTIP	30/12/2015	12	0	PKA	2021		UNIV. MERCU BUANA	2007	S1	21/05/1983
13	Reza Ardhaifi, S.H., M.H.	19850201 200912 1003	IIId	01/04/22	Panmud Perdata	14/12/2020	13	1	PKP	2021		STIH PERTIBA	2015	S2	01/02/1985
14	Suprpto	19691106 199003 1007	IIId	01/04/18	PP	27/3/2001	32	10				STIHPADA	2010	S1	06/11/1969

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA KESELURUHAN		LATIHAN PENDIDIKAN			PENDIDIKAN			TANGGAL LAHIR (TGL/BLN/THN)
			GOL / RUANG	TMT	NAMA	TMT (BLN/TGL/THN)	THN	BLN	NAMA	THN	JML JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Zulfikar Berlian, S.H.	19871125 201101 1009	IIIc	01/04/19	Hakim	24/02/2022	12	0	SPPA	2017		UNSRI	2010	S1	25/11/1987
16	M. Alwi, S.H., M.H.	19870131 201101 1009	IIIc	01/04/19	Hakim	23/02/2022	12	0				UNIV. MUHAMMAD IYAH PALEMBANG	2022	S2	31/01/1987
17	Deski Andriansyah, S.H.	19870702 200604 1001	IIIc	01/04/19	Panmud Hukum	04/11/2021	16	9	PANITERA / PP	2015		STIH PERTIBA	2008	S1	02/07/1987
18	Yuanita Rusnawati, S.H.	19870620 200604 2001	IIIc	01/10/20	PP	01/06/2015	16	9	PANITERA / PP	2021		STIH PERTIBA	2011	S1	20/06/1987
19	Lisa Wahyuni, S.E.	19870610 200904 2004	IIIc	01/10/20	Pranata Keuangan APBN	01/04/2021	13	9	Bendahara	2018		STIE PERTIBA	2012	S1	10/06/1987
20	Deddy Supriyadi, A.Md.	19771001 200805 1001	IIIb	01/10/2020	Jurusita	26/06/2014	14	8				AAB	2004	D3	01/10/1977
21	Eni Kusriani, S.H.	19780505 200805 2001	IIIb	01/10/2020	PP	30/05/2022	14	8				STIH PERTIBA	2016	S1	05/05/1978
22	Edy Yusniady, S.H.	19760912 200212 1004	IIIb	01/10/2021	PP	23/12/2020	20	1				STIH PERTIBA	2016	S1	12/09/1976

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA KESELURUHAN		LATIHAN PENDIDIKAN			PENDIDIKAN			TANGGAL LAHIR (TGL/BLN/THN)
			GOL / RUANG	TMT	NAMA	TMT (BLN/TGL/THN)	THN	BLN	NAMA	THN	JML JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Adika Triarta, S.H.	19860322 200604 1002	IIIb	01/10/2021	PP	23/12/2020	16	9				STIH PERTIBA	2016	S1	22/03/1986
24	Kiki Kurniawan, S.H.	19780416 200604 1006	IIIb	01/04/2022	Juru Sita	16/01/2014	16	9	JS / JSP	2014		STIH PERTIBA	2017	S1	16/04/1978
25	Ismarsudi, S.H.	19790620 200912 1002	IIIb	01/04/2022	JSP	05/03/2014	13	1				STIH PERTIBA	2017	S1	20/06/1979
26	Surya Al Fajri Saputra, S.H.I.	19850723 201903 1004	IIIa	01/03/2019	Analisis Perkara Peradilan	02/03/2020	3	10				IAIN SUNAN KALIJAGA	2009	S1	23/07/1985
27	Andreas Pandapotan S, S.H.	19960203 202012 1002	IIIa	01/12/2020	Analisis Perkara Peradilan	01/12/2021	2	1				UNIV.UDAYA NA	2019	S1	03/02/1996
28	Yos Uninggo	19660606 199303 1006	IIIa	01/04/2021	Juru Sita	14/06/2013	29	10				SMA	2000	SLTA	06/06/1966
29	Hasbullah	19701105 199303 1004	IIIa	01/04/2021	Jurusita	15/01/2008	29	10				SMA	2000	SLTA	05/11/1970
30	Joshua Efraim Simanjuntak, S.E.	19950521 202203 1008	IIIa	01/03/2022	CPNS	01/03/2022	0	10				UNES	2018	S1	21/05/1995
31	Devi Safitri	19880131 200912 2003	IIId	01/04/2022	JSP	16/06/2015	13	1				SMK	2006	SLTA	31/01/1988

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA KESELURUHAN		LATIHAN PENDIDIKAN			PENDIDIKAN			TANGGAL LAHIR (TGL/BLN/THN)
			GOL / RUANG	TMT	NAMA	TMT (BLN/TGL/THN)	THN	BLN	NAMA	THN	JML JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Pakkat Parulian Silaban, A.Md.	19870127 202012 1005	IIc	01/12/2020	Pengelola Sistem dan Jaringan	01/12/2021	2	1				Politeknik Negeri Medan	2008	D3	27/01/1987
33	Derli Yuliansari, A.Md.	19880929 202203 2007	IIc	01/03/2022	CPNS	01/03/2022	0	10				STIH Litigasi	2009	D3	29/09/1988
34	Zulistia Novitri, A.Md.	19991113 202203 2005	IIc	01/03/2022	CPNS	01/03/2022	0	10				Politeknik Negeri Padang	2020	D3	13/11/1999
35	Suyanmar	19700811 201408 1001	IIc	01/10/2022	JSP	29/04/2019	8	5				SMA	1991	SLTA	11/08/1978
36	Muhammad Harun	19690510 201408 1002	IIa	01/04/2019	Pengadmi nistrasi Hukum	31/08/2020	8	5				SMA	2009	SLTA	10/05/1969

4. PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

Tabel 3.6
Matriks Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tanjungpandan

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		PENDIDIKAN			KELAHIRAN		CAT. MUTASI KEPEGAWAIAN	KETERANGAN
			GOL. RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	THN	TK.IJAZAH	TEMPAT	TGL		
1	HIMELDA SIDABALOK, S.H.,M.H.	19760928 200112 2 002	Pembina / IV a	01-04-2018	Ketua/	02-03-2020	20	0	Magister Hukum	2009	S2	Bekasi,	28-09-1976	Pengangkatan Hakim pada PN Menggala	KP 01-04-2022
					Hakim Madya Pratama				Univ. Krisnadwipayana					Pengangkatan Ketua pada PN Tanjungpandan	KGB 01-12-2023
2	MELLINA NAWANG WULAN, S.H.,M.H.	19800520 200212 2 006	Pembina / IV a	01-04-2019	Wakil Ketua/	22-01-2021	19	0	Magister Hukum	2009	S2	Malang,	20-05-1980	Pengangkatan Hakim pada PN Takalar	KP 01-04-2023
					Hakim Madya Pratama				Univ. Hasanuddin					Pengangkatan Wakil Ketua pada PN Tanjungpandan	KGB 01-12-2022
3	HARDIYANTO, S.IP	19730928 199303 1 003	Penata Tk. I/ III d	01-10-2016	Panitera Muda Pidana	09-05-2017	20	9	Sarjana	2004	S1	Sukarami,	28-09-1973	Pengangkatan Panitera Muda Pidana pada PN Tanjungpandan	KP 01-10-2020
									Univ. Terbuka					KGB 01-03-2021	

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		PENDIDIKAN			KELAHIRAN		CAT. MUTASI KEPEGAWAIAN	KETERANGAN
			GOL. RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	THN	TK.IJAZAH	TEMPAT	TGL		
4	IMAM MUALIMIN, S.H.,M.H.	19840608 200704 1 002	Penata Tk.I / III d	01-04-2019	Panitera	18-12-2020	14	8	Magister Hukum STIH Pertiba	2015	S2	Pangkalpinang,	08-06-1984	Pengangkatan Panitera pada PN Tanjungpandan	KP 01-04-2023 KGB 01-04-2023
5	BAMBANG SUPRIADI, S.H.	19821023 200904 1 004	Penata Tk.I / III d	01-04-2021	Panitera Pengganti	26-06-2014	12	8	Sarjana Hukum Univ. Sunan Gn. Djati	2007	S1	Pangkalpinang,	23-10-1982	Pengangkatan Panitera Pengganti pada PN Tanjungpandan	KP 01-04-2025 KGB 01-04-2023
6	ILMAN SAPARIS PRABAKTI, A.Md	19690504 200012 1 001	Penata Tk.I / III d	01-10-2021	Sekretaris	30-12-2015	24	0	Diploma III ALTRI	1994	D3	Tanjungpandan,	04-05-1969	Pengangkatan Sekretaris pada PN Tanjungpandan	KP 01-10-2025 KGB 01-12-2022
7	ADIWANTORO	19620421 198603 1 005	Penata / III c	01-04-2010	Panitera Pengganti	28-06-2000	30	9	SMA	1985	SMA	Tanjungpandan,	21-04-1962	Pengangkatan Panitera Pengganti pada PN Tanjungpandan	KP 01-04-2014 KGB 01-03-2021
8	SUMAIDI	19680519 199103 1 003	Penata / III c	01-04-2015	Panitera Pengganti	04-07-2000	25	9	SMA	1990	SMA	Pangkalpinang,	19-05-1968	Pengangkatan Panitera Pengganti pada PN Tanjungpandan	KP 01-04-2019 KGB 01-03-2022
9	ANAK AGUNG NIKO BRAMA PUTRA, S.H.,M.H.		Penata / III c	01-04-2018	Hakim Pratama Madya	16-03-2020	11	8	Magister Hukum	2014	S2	Denpasar,	03-03-1987	Pengangkatan Hakim	KP 01-04-2022

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		PENDIDIKAN			KELAHIRAN		CAT. MUTASI KEPEGAWAIAN	KETERANGAN
			GOL. RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	THN	TK.IJAZAH	TEMPAT	TGL		
		19870303 200912 1 002							Univ. Indonesia					pada PN Tahuna	KGB 01-12-2023
10	ANITA YULIANA, S.H.	19870727 200912 2 003	Penata / III c	01-04-2018	Panitera Muda Perdata	18-12-2020	11	8	Sarjana Hukum	2009	S1	Tanjungpandan,	27-07-1987	Pangkat an Panitera Muda Perdata pada PN Tanjungpandan	KP 01-04-2022
									Univ. Sriwijaya						KGB 01-12-2023
11	ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H.,M.H.	19870605 201101 1 011	Penata / III c	01-04-2019	Hakim Pratama Madya	04-11-2019	10	11	Magister Hukum	2016	S2	Bandung,	05 -06-1987	Pangkat an Hakim pada PN Pare-Pare	KP 01-04-2023
									Univ. Padjadjaran						KGB 01-01-2023
12	ALVIN PARMANA KP.,S.Kom	19880602 201101 1 010	Penata / III c	01-04-2019	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	30-12-2015	10	11	Sarjana Komputer	2010	S1	Pangkalpinang,	02-06-1988	Pangkat an Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan pada PN Tanjungpandan	KP 01-04-2023
									UPN Veteran						KGB 01-01-2023
13	JEFFRY REZA SAPUTRA, S.E.	19860831 201101 1 008	Penata / III c	01-04-2019	Jurusita /	15-08-2019	10	11	Sarjana Ekonomi	2010	S1	Tanjungpandan,	31-08-1986	Pangkat an Jurusita pada PN Tanjungpandan	KP 01-04-2023
					Bendahara Pengeluaran				Univ. Dharma Agung						KGB 01-01-2023

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		PENDIDIKAN			KELAHIRAN		CAT. MUTASI KEPEGAWAIAN	KETERANGAN
			GOL. RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	THN	TK.IJAZAH	TEMPAT	TGL		
14	AGUSTIANI, S.H.	19870826 200604 2 002	Penata / III c	01-10-2019	Panitera Muda Hukum	15-08-2019	10	8	Sarjana Hukum	2010	S1	Pangkalpinang,	26-08-1987	Pangkat an Panitera Muda Hukum pada PN Tanjungpan dan	KP 01-10-2023
								Pertiba	KGB 01-04-2023						
15	RISKA NOVA, S.H.	19800727 200604 1 004	Penata / III c	01-10-2021	Kasubbag Umum dan Keuangan	30-12-2015	13	8	Sarjana Hukum	2020	S1	Pangkalpinang,	27-07-1980	Pangkat an Kasubbag Umum dan Keuangan pada PN Tanjungpan dan	KP 01-10-2025
								Univ. Terbuka	KGB 01-04-2022						
16	KATARINA DAMERIA, A.Md	19801006 200604 2 004	Penata / III c	01-10-2021	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	30-12-2015	13	8	Diploma III	2002	D3	Pangkalpinang,	06-10-1980	Pangkat an Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana pada PN Tanjungpan dan	KP 01-10-2025
								Univ. Padjadjaran	KGB 01-04-2022						
17	MUHAMAD SUBHAN	19700511 199303 1 002	Penata Muda Tk.I / III b	01-04-2019	Panitera Pengganti	27-03-2009	20	9	SMEA	1991	SMA	Pangkalpinang,	11-05-1970	Pangkat an Panitera Pengganti pada PN Tanjungpan dan	KP 01-04-2023
															KGB 01-03-2023

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		PENDIDIKAN			KELAHIRAN		CAT. MUTASI KEPEGAWAIAN	KETERANGAN
			GOL. RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	THN	TK.IJAZAH	TEMPAT	TGL		
18	PASTI BONI SIAGIAN	19741130 199303 1 001	Penata Muda Tk.I / III b	01-04-2019	Panitera Pengganti	31-10-2007	20	9	SMA	1993	SMA	Palembang	30-11- 1974	Pengangkat an Panitera Pengganti pada PN Tanjungpan dan	KP 01- 04-2023 KGB 01- 03-2023
19	IKE OKTARIA SARI, A.Md.,S.A.P.	19821021 200805 2 001	Penata Muda Tk.I / III b	01-10-2020	Jurusita	15-08-2019	11	7	Sarjana Adm. Publik	2016	S1	Sungailiat,	21-10- 1982	Pengangkat an Jurusita pada PN Tanjungpan dan	KP 01- 10-2024
									Univ. Terbuka						KGB 01- 05-2022
20	SYAFITRI APRIYUANI SUPRIATRY, S.H.,M.H.	19920405 201712 2 002	Penata Muda Tk.I / III b	01-10-2021	Hakim Pratama Muda	29-04-2020	4	0	Magister Hukum	2016	S2	Bogor,	05-04- 1992	Pengangkat an Hakim pada PN Tanjungpan dan	KP 01- 10-2025
									Univ. Indonesia						KGB 01- 12- 2023

5. PENGADILAN NEGERI KOBA

Tabel 3.7
Matriks Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Koba

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	PANGKAT JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN			TEMPAT & TANGGAL LAHIR	CAT.MUTASI PEGAWAI (KP)
				TMT	NAMA	TMT	TH	BLN	NAMA	TH	NAMA	LULUS TAHUN	TK. IJAZAH		
1	RIZAL TAUFANI,S. H.,M.H	19770407 200312 1 001	IV / a	1-4- 2020	Ketua	04-05- 2021	18	1	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	20 21	Universit as 17 Agustus 1945	2007	S2	Yogya karta 07-04- 1977	SK NO 1344/DJU/SK/KP.04.5/ 5/ 2021
2	DERIT WERDINING SIH,S.H	197804302 00502 2 002	IV / a	24-02- 2021	Wakil Ketua	21-01- 2022	16	11	Diklat Sertifikasi SPPA	20 19	Sekolah Tinggi Hukum Indonesi a	2003	S1	Jakart a Pusat, 30-04- 1978	SK NO.27/KMA/SK/I/2022
3	RAHARDHI PERDANA,S. H.,M.H	19780622 200212 1 008	III/d	1-4- 2018	Panitera	26-10- 2018	17	0	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	20 21	STIH YAPERTI BA Pangkalp inang	2015	S2	Jakart a Timur, 22-06- 1978	NO.1927/DJU/SK/KP.0 4.5/9/2018

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	PANGKAT JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN			TEMP AT & TANG GAL LAHIR	CAT.MUTASI PEGAWAI (KP)
				TMT	NAMA	TMT	TH	BLN	NAMA	TH	NAMA	LULUS TAHUN	TK. T IA ZA H		
4	JAMALUDIN ,S.H	19770424 200604 1 003	III/d	1-4- 2021	Sekretaris	26-10- 2018	10	9	Pendidikan & Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VII	20 16	STIH YAPERTI BA	2010	S1	Pangk alpina ng, 24-4- 1977	NO.563/SEK/KP.I/SK/X/ 2018
5	ERWIN MARANTIK A, S.H.	19760302 201101 1 005	III / c	1-4- 2019	Panitera Muda Hukum	26-10- 2018	11	0	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera & Jususita	20 20	Universit as Sriwijaya	2000	S1	Palem bang, 02-03- 1976	No.1927/DJU/SK/KP.04 .5/9/2018
6	OSKAR SYAIFULLAH ,S.Kom.	19861012 2011011 014	III/ c	1-4- 2019	Kasubbag Umum & Keuangan	26-10- 2018	11	0	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	20 19	Universit as Budi Luhur	2009	S1	Pangk alpina ng, 12-10- 1986	NO.563/SEK/KP.I/SK/X/ 2018
7	YUSBET HARIRI,S.H		III/ c	1-10- 2019	Panitera Muda Pidana	26-10- 2018	10	9	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	20 21	STIH YAPERTI BA	2011	S1	Mento k, 	No.1927/DJU/SK/KP.04 .5/9/2018

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	PANGKAT JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN			TEMPAT & TANGGAL LAHIR	CAT.MUTASI PEGAWAI (KP)	
				TMT	NAMA	TMT	TH	BLN	NAMA	TH	NAMA	LULUS TAHUN	TK. T IJAZAH			
		19840917 200604 1 002										Pangkalpinang		17-09-1984		
8	PADLI, S.H	19820514 200604 1 004	III / c	1-10-2020	Panitera Muda Perdata	26-10-2018	10	9	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera & Jurusita	20 20	STIH YAPERTI BA	Pangkalpinang	2012	S1	Pangkalpinang, 14-5-1982	No.1927/DJU/SK/KP.04 .5/9/2018
9	NUR KAMALIA, S.H.	19860122 200604 2001	III / c	1-10-2021	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	26-10-2018	10	9	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	20 20	STIH YAPERTI BA	Pangkalpinang	2012	S1	Pangkalpinang, 22-01-1986	NO.563/SEK/KP.I/SK/X/ 2018
10	YEYEN WAHYUNI, S.Kom	19860326 200904 2 005	III / b	1-10-2019	Kasubbag PTIP	23-08-2019	10	9	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	20 20	STMIK ATMA LUHUR		2014	S1	Bangka Tengah, 26-03-1986	No.635/SEK /KP.I/SK/VIII/2019

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	PANGKAT JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN			TEMPAT & TANGGAL LAHIR	CAT.MUTASI PEGAWAI (KP)
				TMT	NAMA	TMT	TH	BLN	NAMA	TH	NAMA	LULUS TAHUN	TK. T IJAZAH		
11	EKO ARFANDI, S.H.	19840408 200912 1009	III / b	1-10-2019	Jurusita	26-10-2018	7	1	Sertifikasi Bendahara	20 20	STIH YAPERTI BA Pangkalpinang	2014	S1	Pangkalpinang, 08-04-1984	No.1930/DJU/SK/KP/04.5/9/ 2018
12	RENDRA,S.H	19821021 201408 1001	III / b	1-04-2021	Panitera Pengganti	09-03-2020	14	7	Pelatihan Prajabatan Gol II Angkatan XL	20 15	STIH SUMPAH PEMUDA PALEMBANG	2010	S1	Bangka, 21-10-1982	No.31/DJU /SK/KP04.5/1/2020
13	TREMA FEMULA GRAFIT, S.H.	19920828 201712 2001	III / b	1-10-2021	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	20 19	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	2015	S2	Magetan, 28-08-1992	No.540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020
14	RIZKI RIDHA DAMAYANTI, S.H., M.H	1993082 120171 2001	III / b	1-10-2021	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	20 19	Universitas Airlangga Surabaya	2017	S2	Kediri, 21-08-1993	No.540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	PANGKAT JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN			TEMPAT & TANGGAL LAHIR	CAT.MUTASI PEGAWAI (KP)
				TMT	NAMA	TMT	TH	BLN	NAMA	TH	NAMA	LULUS TAHUN	TK. T IJAZAH		
15	MAGDALENA	199310012017122003	III / a	1-12-2017	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	2019	Univ. Katholik Ind. Atmajaya	2016	S1	Medan,	No.540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020
	SIMANUNG KALIT, S.H													1-10-1993	
16	NOVIA NANDA PERTIWI, S.H	199311032017122001	III / a	1-12-2017	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	2019	UNPAD	2015	S1	Bandung,	No.540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020
														3-11-1993	
17	DEVIA HERDITA, S.H	199405222017122002	III / a	1-12-2017	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	2019	Universitas Bangka Belitung	2016	S1	Jebus,	No.540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020
											Pangkalpinang			22-5-1994	
18	NAOMI RENATA	199412222017122001	III / a	1-12-2017	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	2019	Universitas Indonesia	2016	S1	Medan,	No.540/DJU/SK/KP.04.5/3/2020
	MANIHURUK, S.H													22-12-1994	

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	PANGKAT JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN			TEMPAT & TANGGAL LAHIR	CAT.MUTASI PEGAWAI (KP)
				TMT	NAMA	TMT	TH	BLN	NAMA	TH	NAMA	LULUS TAHUN	TK. T IJAZAH		
19	HARDI JUMAIDI, S.H	199210092019031003	III / a	1-3-2019	Analisis Perkara Peradilan	08-4-2020	2	10	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	2021	STIH YAPERTIBA Pangkalpinang	2018	S1	Payung, 9-10-1992	No.02/SEK /PNS.04.1/SK/II/2020
20	SARTIKA RATNASARI SINAGA, S., E	199406232019032011	III / a	1-3-2019	Analisis Sumber Daya Manusia	08-4-2020	2	10	Pelatihan Dasar CPNS Gol III Angkatan 104/CIV	2019	UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA	2017	S1	Simalungun, 23-06-1994	No.02/SEK /PNS.04.1/SK/II/2020
21	MARIHOT PANGIHUTAN	197701102006041002	II/d	1-4-2018	Jurusita	19-8-2019	15	9	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera & Jurusita	2020	SMAN 4 Pangkalpinang	1995	SLTA	Pangkalpinang, 10-01-1977	No.2502/DJU/SK/KP.04.5/7/2019
22	ABAD RIBUNANURIN, AM.d	198910072019031002	II/c	1-3-2019	Pengelola Sistem & Jaringan	01-4-2020	2	10	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis	2020	POLITEK NIK NEGERI BATAM	2013	D3	Kediri, 07-10-1989	No.W7.U/0549/SK/KP.00.3/3/2020

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	PANGKAT JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TEMPAT & TANGGAL LAHIR	CAT.MUTASI PEGAWAI (KP)
				TMT	NAMA	TMT	TH	BLN	NAMA	TH	NAMA	LULUS TAHUN	TK. T IJAZAH			
bagi Panitera & Jurusita																

6. Pengadilan Negeri Mentok

Tabel 3.8
Matriks Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Mentok

NO. URUT	NAMA	NIP.	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA
			Gol Ruang	TMT	Nama	TMT	Thn	Bln	Nama Diklat	Lulus Thn	JML JAM	Nama Universitas	Lulus Thn	Tingkat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ERICA MARDALENI, S.H., M.H.	19781116 200212 2 004	IV/a	01/04/2019	Ketua	26/10/2018	18	11	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2003	135	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	2014	S2	16/11/1978
2	IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.	19790607 200212 1 002	IV/a	01/04/2019	Wakil Ketua	22/01/2020	18	11	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2003	135	UNIVERSITAS LAMPUNG	2012	S2	07/06/1979
3	HELNI ARYADI, S.H., M.H.	19730201 199303 1 004	IV/a	01/10/2021	Panitera	05/03/2020	28	8	DIKLAT PRAJAB GOL.II	1994	128	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG	2011	S2	01/02/1973

NO. URUT	NAMA	NIP.	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA
			Gol Ruang	TMT	Nama	TMT	Thn	Bln	Nama Diklat	Lulus Thn	JML JAM	Nama Universitas	Lulus Thn	Tingkat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	1	14	1	16
4	SAPPERIJANTO, S.H., M.H.	19841024 200904 1 004	III/d	01/04/2021	Hakim	26/02/2020	12	07	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2010	135	UNIVERSITAS ANDALAS	2017	S2	24/10/1984
5	AGUSTINI, S.Kom.	19840812 200904 2 007	III/d	01/04/2021	Sekretaris	26/10/2018	12	07	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2010	135	STMIK AMIKOM YOGYAKARTA	2008	S1	12/08/1984
6	YUSRIZAL, S.H.	19810516 200904 1 005	III/d	01/04/2021	Panitera Muda Pidana	26/10/2018	12	07	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2010	135	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	2005	S1	16/05/1981
7	MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H.	19860625 200912 1 002	III/c	01/04/2018	Panitera Muda Perdata	26/10/2018	11	11	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2011	288	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	2008	S1	25/06/1986
8	LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H.	19880312 201101 1 006	III/c	01/04/2019	Hakim	26/10/2018	10	10	DIKLAT PRAJAB GOL.III	2012	243	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	2003	S1	12/03/1988
9	SEVIA DWI KRISNAWATY, S.Akt, M.M.	19850925 200904 2 005	III/c	01/10/2019	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	26/10/2018	12	07	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2010	90	STIE PERTIBA	2014	S2	25/09/1985
10	YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.	19860215 200904 1 004	III/c	01/10/2019	Panitera Muda Hukum	26/10/2018	12	07	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2010	90	STIH PERTIBA	2009	S1	15/02/1986
11	BUDIYANTO, A.Md.	19771012 200904 1 002	III/b	01/04/2020	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	30/04/2019	12	07	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2010	90	STMIK JAYAKARTA	2004	D3	12/10/1977
12	TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, SH	19840725 200912 1 004	III/b	01/04/2021	Panitera Pengganti	05/03/2020	11	11	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2011	237	STIH PERTIBA	2015	S1	25/07/1984
13	TRIANA ANGELICA, S.H.	19930318 201712 2 001	III/b	01/10/2021	Hakim	01/04/2020	03	11	PELATIHAN DASAR CPNS GOL.III	2018	1141	UNIVERSITAS DIPONEGORO	2014	S1	18/03/1993
14	RISDUANITA WITA, S.H.	19891024 201712 2 001	III/a	01/12/2017	Hakim	01/04/2020	03	11	PELATIHAN DASAR CPNS GOL.III ANGKATAN LVII	2018	1141	UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN	2012	S1	24/10/1989
15	ARINDO, S.H.	19910224 201712 1 004	III/a	01/12/2017	Hakim	01/04/2020	03	11	PELATIHAN DASAR CPNS GOL.III ANGKATAN LVII	2018	1141	UNIVERSITAS INDONESIA	2016	S1	24/02/1991
16	ALFIARIN SENI NURAINI, S.H.	19910919 201712 2 002	III/a	01/12/2017	Hakim	01/04/2020	03	11	PELATIHAN DASAR CPNS GOL.III ANGKATAN LVII	2018	1141	UNIVERSITAS PADJAJARAN	2013	S1	19/09/1991
17	ALDI NARADWIPA SIMAMORA, S.H.	19920501 201712 1 009	III/a	01/12/2017	Hakim	01/04/2020	03	11	PELATIHAN DASAR CPNS GOL.III ANGKATAN LVII	2018	1141	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	2014	S1	01/05/1992

NO. URUT	NAMA	NIP.	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA
			Gol Ruang	TMT	Nama	TMT	Thn	Bln	Nama Diklat	Lulus Thn	JML JAM	Nama Universitas	Lulus Thn	Tingkat	
18	FITRIA HADY, S.H.	19940314 2017122 001	III/a	01/12/2017	Hakim	01/04/2020	03	11	PELATIHAN DASAR CPNS GOL III ANGKATAN LVII	2018	1141	UNIVERSITAS INDONESIA	2016	S1	14/03/1994
19	AGUS KUATA, A.Md.	19820806 200912 1 003	III/a	01/04/2018	JurusiA	26/10/2018	11	11	DIKLAT PRAJAB GOL.II	2011	237	UNIVERSITAS PADJAJARAN	2005	D3	06/08/1982
20	YURI ANDRIYANSYAH, S.H.	19930816 201903 1 007	III/a	01/03/2019	Analisis Perkara Peradilan	02/03/2020	02	08	PELATIHAN DASAR CPNS GOL III ANGKATAN CIV	2019	511	UNIVERSITAS JAMBI	2016	S1	16/08/1993
21	IRMAYA SARI PURBA, S.I.P.	19920305 201903 2 015	III/a	01/03/2019	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	02/03/2020	02	08	PELATIHAN DASAR CPNS GOL III ANGKATAN CIV	2019	511	UNIVERSITAS PADJAJARAN	2014	S1	05/03/1992
22	RIZKA PRATAMI NIRASUANDA, S.H.	19970603 202012 2 009	III/a	01/12/2020	CPNS /Analisis Perkara Peradilan	01/12/2020	00	11	PELATIHAN DASAR CPNS GOL III ANGKATAN I	2021	-	UNIVERSITAS SRIWIJAYA			
23	AHMAD IQBAL, A.Md.	19940602 201903 1 005	II/c	01/03/2019	Pengelola Sistem Dan Jaringan	02/03/2020	02	08	PELATIHAN DASAR CPNS GOL II ANGKATAN VII	2019	90	UNIVERSITAS PADJAJARAN			
24	RISNAULI LANDONGNA SINAMO, A.Md.	19950728 202012 2 007	II/c	01/12/2020	Pengelola Sistem Dan Jaringan	01/01/2022	04	01	PELATIHAN DASAR CPNS GOL II ANGKATAN X	2021	-	POLITEKNIK NEGERI MEDAN			
25	HANNA RIANA PURBA, A.Md.	19880410 202012 2 002	II/c	01/12/2020	Pengadministrasi Registrasi Perkara	01/01/2022	04	01	PELATIHAN DASAR CPNS GOL II ANGKATAN IX	2021	-	POLITEKNIK LP3I MEDAN			

Mentok, 1 Januari 2022
 KETUA PENGADILAN NEGERI MENTOK,

 ERICA MARDALEN, S.H., M.H.
 NIP. 19781116 200212 2 004

NO	UNIT KERJA	KEBUTUHAN SDM	SEBANYAK	KET
		Pranata Barang dan Jasa Ajudan Teknisi Sarpras	1 Orang 1 Orang 1 Orang	
5	Pengadilan Negeri Koba	Hakim Panitera Pengganti Juru Sita Jurusita Pengganti Analisis Perkara Peradilan Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Analisis SDM Aparatur Pengelola Data Informasi dan Hukum Pengelola Sistem dan Jaringan Bendahara (Kepaniteraan) Bendahara (Kesekretariatan) Pengelola Kepegawaian Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengadministrasian Persuratan Penyusun Laporan Keuangan Pengelola BMN Pranata Barang dan Jasa Ajudan Teknisi Sarana dan Prasarana	5 Orang 15 Orang 1 Orang 6 Orang 3 Orang 2 Orang 1 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang	
6	Pengadilan Negeri Mentok	Hakim Wakil Ketua Panitera Panitera Pengganti Juru Sita /Jurusita Pengganti Pengawai	3 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang 1 Orang 11 Orang	

B. MUTASI

Mutasi pegawai adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain baik pemindahan itu sifatnya setara dengan jabatan sebelumnya, naik ke jabatan yang lebih tinggi, maupun turun ke jabatan yang lebih rendah.

Tabel 3.10
Mutasi Masuk Tahun 2022
Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG			
1	MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.	WAKIL KETUA PT BANDUNG	KETUA PT BABEL
2	Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI PT DKI JAKARTA	WAKIL KETUA PT BABEL
3	KURNIA HUTAMI AISYARA, A.Md., S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN PN LUBUK LINGGAU	ANALIS PERKARA PERADILAN PT BABEL
4	HERU PRAKOSA, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI PT PALANGKARAYA	HAKIM TINGGI PT BABEL
PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG			
1	MIMI HARYANI, SH.	KETUA PN BENGKULU	KETUA PN PANGKALPINANG

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
2	RADEN HERU KUNTODEWO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	KETUA PN PANGKALPINANG
3	ANSHORI HIRONI, S.H.	HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	HAKIM PN PANGKALPINANG
4	ANSHORI HIRONI, S.H., M.H.	HAKIM PENGADILAN NEGERI KARAWANG	HAKIM PN PANGKALPINANG
PENGADILAN NEGERI SUNGAILAT			
1.	M. ALWI, S.H., M.H	HAKIM PN	HAKIM PN SUNGAILIAT
2.	ZULFIKAR BERLIAN, S.H	HAKIM PN	HAKIM PN SUNGAILIAT
3.	MELINDA ARITONANG, S.H.	HAKIM PN	HAKIM PN SUNGAILIAT
4.	SAPPERIJANTO, S.H., M.H	HAKIM PN	HAKIM PN SUNGAILIAT
5.	ENI KUSRINI, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN PT. BANGKA BELITUNG	PANITERA PENGGANTI PN SUNGAI LIAT
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN			
1	DECKY CHRISTIAN S., S.H., M.H.		
2	PATANUDDIN, S.H., M.H.		
3	MARINI, S.H.		
4	MUHOTIM, S.H.		
5	DINDA PERMATASARI, A.Md		
6	YOS AGUSSETIAWAN SEMENDAWAI, S.H.		
PENGADILAN NEGERI KOBA			
1	DERIT WERDININGSIH, S.H.	HAKIM PN PURWAKARTA	WAKIL KETUA PN KOBA
2	SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.	HAKIM PN PRABUMULIH	HAKIM PN KOBA
3	SOFYAN, S.H., M.H.	PANMUD HUKUM PN GUNUNG SUGIH	PANITERA PN KOBA
PENGADILAN NEGERI MENTOK			
1	MOCH ROMADHON,SH.	PELAKSANA PT. BABEL	KASUBBAG PTIP PN MENTOK
2	EGI DESIKA, S.H.	PANITERA PENGGANTI PN SUNGAILIAT	PANMUD HUKUM PN MENTOK

Tabel 3.11
Mutasi Keluar Tahun 2022
Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG			
1	ASNAHWATI, S.H., M.H.	KETUA PT BABEL	WAKIL KETUA PT SURABAYA
2	Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA PT BABEL	WAKIL KETUA PT MATARAM
3	WINARTO, S.H.	HAKIM TINGGI PT BABEL	HAKIM TINGGI PT JAWA TENGAH
4	SATRIYO BUDIYONO, S.H., M.Hum.	HAKIM TINGGI PT BABEL	HAKIM TINGGI BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MA RI
5	NATHAN LAMBE, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI PT BABEL	HAKIM TINGGI PT BANTEN
6	SETIA RINA, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI PT BABEL	HAKIM TINGGI PT RIAU

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
7	NI LUH PERGINASARI A R., S.H., M.Hum.	HAKIM TINGGI PT BABEL	HAKIM TINGGI PEMILAH PERKARA KEPANITERAAN MA RI
8	MURGANDA SITOMPUL, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI PT BABEL	HAKIM TINGGI PEMILAH PERKARA KEPANITERAAN MA RI
9	RAFMIWAN MURIANETI, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI PT BABEL	HAKIM TINGGI PEMILAH PERKARA KEPANITERAAN MA RI
10	AIF SAIFUDAULLAH, S.H. M.H.	PANMUD PIDANA PT BABEL	PANITERA PENGGANTI PT BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG			
1.	VICTOR TOGI RUMAHORBO, S.H., M.H.	KETUA PN PANGKALPINANG	WAKIL KETUA PN JAKARTA TIMUR
2	HOTMA E. P. SIPAHUTAR, S.H., M.H.	HAKIM PN PANGKALPINANG	HAKIM PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
3	SITI HAJAR SIREGAR, S.H.	HAKIM PN PANGKALPINANG	HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
4	YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG	KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
5	AMIR TRIYONO, S.H.	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT			
1	FIRMAN JAYA, S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA PN SUNGAILIAT	HAKIM PRATAMA UTAMA MAHKAMAH AGUNG RI
2	BENNY YOGA DHARMA, S.H.	HAKIM PRATAMA MADYA PN SUNGAILIAT	HAKIM PRATAMA MADYA PN BATAM
3	VIDYA ANDINI TUPPU, S.H.,M.H	HAKIM PRATAMA UTAMA PN SUNGAILIAT	HAKIM PRATAMA UTAMA PN PANGKALPINANG
4	GITA YUNIA MARSYA, SE	ANALIS SDM APARATUR PN SUNGAILIAT	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PT JAKARTA
5	EGI DESIKA, S.H	PANITERA PENGGANTI PN SUNGAILIAT	PANITERA MUDA HUKUM PN MENTOK
6	YOS AGUSSETIAWAN SEMENDAWAI, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN PN SUNGAILIAT	ANALIS PERKARA PERADILAN PN TANJUNGPANDAN
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN			
1	MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H.		
2	ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H., M.H.		
3	HIMELDA SIDABALOK, S.H., M.H.		
4	ANAK AGUNG NIKO BRAMA PUTRA, S.H., M.H.		
TIDAK ADA MUTASI KELUAR			
PENGADILAN NEGERI KOBA			
1	NAOMI RENATA MANIHURUK, S.H.	HAKIM PN KOBA	HAKIM PT MEDAN
2	RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.	PANITERA PN KOBA	PANMUD PIDANA PT BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI MENTOK			
1	LISTYO ARIF BUDIMAN, SH.	HAKIM PN MENTOK	HAKIM PN KUNINGAN
2	HELNI ARYADI, S.H., M.H.	PANITERA PN MENTOK	PANITERA PN PRABUMULIH
3	YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.	PANMUD HUKUM PN MENTOK	PANITERA PENGGANTI PT. BANGKA BELITUNG
4	YOERI ANDRIYANSYAH, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN PN MENTOK	ANALIS PERKARA PERADILAN PN BANGKO

C. PROMOSI

Promosi adalah perpindahan pegawai dari satu posisi jabatan atau ke posisi jabatan yang lebih dengan gaji dan fasilitas, tanggung jawab dan peluang yang lebih besar.

Tabel 3.12
Tabel Promosi Tahun 2022 Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG			
1	Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.	HAKIM PN SERANG	HAKIM TINGGI PT BABEL
2	ENI KUSRINI, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN PT BABEL	PANITERA PENGGANTI PN SUNGAILIAT
3	YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.	PANMUD HUKUM PN MENTOK	PANITERA PENGGANTI PT BABEL
4	MOCH ROMADHON, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN PT BABEL	KASUBBAG PTIP PN MENTOK
5	RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.	PANITERA PN KOBA	PANMUD PIDANA PT BABEL
PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG			
1	MIMI HARYANI, SH.	KETUA PN BENGKULU	KETUA PN PANGKALPINANG
2	RADEN HERU KUNTODEWO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	KETUA PN PANGKALPINANG
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT			
TIDAK ADA DATA PROMOSI			
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN			
KENAIKAN PANGKAT			
1	DECKY CHRISTIAN S.,S.H.,M.H.		WAKIL KETUA
2	ANITA YULIANA, S.H.		PANITERA MUDA PERDATA
3	ENDI NURSATRIA, S.H.		HAKIM PRATAMA MUDA
4	FRANS LUKAS SIANIPAR, S.H.		HAKIM PRATAMA MUDA
5	ELIZABETH JULIANA, S.H.		HAKIM PRATAMA MUDA
6	SEPTRI ANDRI MANGARA TUA, S.H.		HAKIM PRATAMA MUDA
PENGADILAN NEGERI KOBA			
1	NAOMI RENATA MANIHURUK, S.H.	HAKIM PN KOBA	HAKIM PT MEDAN
KENAIKAN PANGKAT			
1	MAGDALENA SIMANUNGKALIT, S.H.	III/a	III/b
2	NOVIA NANDA PERTIWI,S.H.	III/a	III/b
3	NAOMI RENATA MANIHURUK,S.H.	III/a	III/b
4	DEVIA HERDITA,S.H.	III/a	III/b
5	MARIHOT PANGIHUTAN	II/d	III/a
PENGADILAN NEGERI MENTOK			
1	SAPPERIJANTO, S.H., M.H.	HAKIM PN MENTOK	HAKIM PN SUNGAILIAT
2	IWAN GUNAWAN, S.H.,M.H.	WAKIL PN MENTOK	KETUA PN MENTOK
3	ERICA MARDALENI, S.H., M.H.	KETUA PN MENTOK	WAKIL KETUA PN PURWAKARTA

D. PENSUN

Tabel 3.13
Tabel Pensiun Tahun 2022
Pengadilan Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	NAMA	JABATAN	KET
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG			
1	SYAMSUAR, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	BUP KPP
PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG			
1	ATMAWIYANTI, S.H.		BUP KPP
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT			
TIDAK ADA DATA PEGAWAI PENSUN			
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN			
TIDAK ADA DATA PENSUN			
PENGADILAN NEGERI Koba			
TIDAK ADA DATA PEGAWAI PENSUN			
PENGADILAN NEGERI MENTOK			
TIDAK ADA DATA PEGAWAI PENSUN			

E. DIKLAT

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada Tahun 2021, Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah mengikut sertakan sumber daya manusia nya dalam beberapa diklat baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun lembaga lainnya. Diklat tersebut adalah:

1. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi
Diklat ini ditujukan bagi hakim yang bertujuan untuk menyiapkan hakim yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam menangani perkara yang memerlukan keahlian khusus.
2. Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Fungsional.
Diklat ini bertujuan untuk pendalaman materi terkait kebutuhan di lapangan yang didasarkan pada *assessment* serta keadaan mendesak akibat adanya regulasi baru.
3. Diklat Prajabatan
Diklat Prajabatan Golongan III dan II diadakan sebagai syarat menjadi ASN.
4. Diklat Kepemimpinan Pengawasan dan Administrator

Diklat yang diikuti oleh SDM pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah Diklat Kepemimpinan Pengawasan yang merupakan diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam jabatan struktural Eselon IV dan diklat Kepemimpinan Administrator yang merupakan diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam jabatan struktural Eselon III.

5. Diklat Tekhnis Umum/Administrasi Manajemen
Diklat ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dalam rangka pencapaian kompetensi ASN terkait tugas yang bersifat umum
6. Pelatihan online dari tempat tugas
Pelatihan ini merupakan inovasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - *Mahkamah Agung* Republik Indonesia di masa pandemi. Pelatihan ini dilakukan secara daring dan dapat diikuti oleh seluruh ASN dalam lingkungan Mahkamah Agung RI dengan tema yang beragam.

1. PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Tabel 3.14

Data Diklat Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	1
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	-
3	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian	-
4	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	-
5	Diklat Sertifikasi Hakim Tipikor	1
6	Diklat Sertifikasi Hakim Anak	-
7	Diklat Teknis Fungsional Tindak Pidana Narkotika Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Niliter	-
8	Diklat Online English Effective Presentation	-
9	Diklat Teknis Menyusun Abstraksi Putusan Pengadilan	-
10	Pelatihan Hakim Assesor	-
11	Latsar CPNS	3

2. PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG

Pada tahun 2022, beberapa pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah dipanggil untuk mengikuti diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung.

a. Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan

Pada tahun 2022 tidak ada hakim dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengikuti PPHB II (Program Diklat Hakim Berkelanjutan II) dan

tidak ada Panitera/Panitera Pengganti (PP) mengikuti Pelatihan PP Berkelanjutan.

b. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Pada tahun 2022, ada hakim dan panitera yang mengikuti program diklat sertifikasi yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.15
Data Sertifikasi Hakim Tahun 2022
Pengadilan Negeri Pangkalpinang

NO	DIKLAT SERTIFIKASI	JUMLAH PESERTA
1	Sertifikasi Mediator	-
2	Sertifikasi Hakim PHI	1
3	Sertifikasi Hakim Perikanan	1
4	Sertifikasi Hakim Niaga	-
5	Sertifikasi Hakim Tipikor	1
6	Sertifikasi Hakim Lingkungan	-
7	Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak	-

c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Tahun 2022 ada tenaga teknis (Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti) dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional. Diadakannya Pelatihan Teknis Kepaniteraan diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang diadakan pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 serta Pelatihan Teknis Kesekretariatan diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang diadakan pada tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022.

d. Diklat Dalam Jabatan

Pada tahun 2022, tidak ada pegawai Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Tabel 3.16
Data Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2022
Pengadilan Negeri Pangkalpinang

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV / Diklat PKP	-
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III / Diklat PKA	-
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Penyelenggara Lembaga Administrasi Negara RI)	-
4	Diklat Sekretaris Pengadilan	-
5	Diklat Panitera Pengadilan	-

e. Diklat Teknis Umum/Administrasi Manajemen

Pada tahun 2022, tidak ada Pegawai dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengikuti diklat teknis umum/administrasi manajemen yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Tabel 3.17
Data Pelatihan Teknis Umum Tahun 2022
Pengadilan Negeri Pangkalpinang

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Diklat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	-
2	Diklat Akuntansi Berbasis Akrua	-
3	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	-
4	Diklat Sertifikasi Bendahara	-
5	Diklat Penyusunan LkjIP	-
6	Diklat Penyusunan Angka Kredit Widyaiswara	-
7	TOT Manajemen SAKIP	-
8	Diklat KIP	-
9	Diklat Teknis Perencana	-

3. PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

Tabel 3.18
Data Diklat Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sungailiat

NO	NAMA	DIKLAT	TANGGAL
1.	DEWI APRILIA PUSPITA NINGRUM, S.Kom.	Pelatihan <i>Champion Meeting-Court Excellence Training</i> pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI TA 2022	13 s.d 17 Januari 2022
2.	LISA WAHYUNI, S.E.	Informasi E-Learning dan Microlearning pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	15 Februari s.d 15 Desember 2022
3.	ADIKA TRIARTA, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	15 s.d 17 Maret 2022
4.	DESKI ANDRIANSYAH, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	22 s.d 24 Maret 2022
5.	EGI DESIKA, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	22 s.d 24 Maret 2022
6.	EDY YUSNIADY, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	22 s.d 24 Maret 2022
7.	MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	5 s.d 7 April 2022
8.	REZA ARDHAFI, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	5 s.d 7 April 2022
9.	NOFRIANDI, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	5 s.d 7 April 2022
10.	SUMANJAYA, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	12 s.d 14 April 2022
11.	SUPRAPTO	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	12 s.d 14 April 2022

NO	NAMA	DIKLAT	TANGGAL
12.	YUANITA RUSNAWATI, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	19 s.d 21 April 2022
13.	LISA WAHYUNI, S.E.	Program Pembelajaran Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran bagi Kementerian/Lembaga	18 Maret s.d 9 Desember 2022
14.	LISA WAHYUNI, S.E.	Pelatihan ECSCS Preparation Test Batch 1 dan Batch 2 secara online dari tempat tugas Tahun 2022	01 s.d 08 April 2022
15.	ANDREAS PANDAPOTAN SIAMBATON, S.H.	Pelatihan ECSCS Preparation Test Batch 1 dan Batch 2 secara online dari tempat tugas Tahun 2022	14 s.d 22 April 2022
16.	MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	23 s.d 25 Mei 2022
17.	REZA ARDHAFI, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	23 s.d 25 Mei 2022
18.	SUMANJAYA, S.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	23 s.d 25 Mei 2022
19.	EDY YUSNIADY, S.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	23 s.d 25 Mei 2022
20.	KIKI KURNIAWAN, S.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	23 s.d 25 Mei 2022
21.	ANDREAS PANDAPOTAN SIAMBATON, S.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	23 s.d 25 Mei 2022
22.	LISA WAHYUNI, S.E.	Bimbingan Teknis Reformasi IKPA 2022	23 Juni 2022
23.	SAPPERIJANTO, S.H., M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Narkotika Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	11 s.d 25 Juli 2022
24.	M. ALWI, S.H., M.H.	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang III	18 s.d 30 Juli 2022
25.	VIDYA ANDINI TUPPU, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVII	25 Juli s.d 30 Agustus 2022
26.	ZULFIKAR BERLIAN, S.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVII	25 Juli s.d 30 Agustus 2022
27.	JOSHUA EFRAIM SIMANJUNTAK, S.E.	Latsar CPNS secara Blended Learning Kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Golongan II dan III Angkatan VIII, IX, XII, XIII, XIV Tahun 2022	5 September s.d 12 November 2022
28.	DERLI YULIANSARI, A.Md	Latsar CPNS secara Blended Learning Kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Golongan II dan III Angkatan VIII, IX, XII, XIII, XIV Tahun 2022	5 September s.d 12 November 2022
29.	ZULISTIA NOVITRI, A.Md	Latsar CPNS secara Blended Learning Kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Golongan II dan III Angkatan VIII, IX, XII, XIII, XIV Tahun 2022	5 September s.d 12 November 2022
30.	ROSMALA SARI, S.E.	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan	24 s.d 26 Agustus 2022
31.	MERIE LHUVANTIE, S.E.	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan	24 s.d 26 Agustus 2022
32.	JOVAN MEIRIL, S.T.	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan	24 s.d 26 Agustus 2022
33.	SAPPERIJANTO, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Penghapusan Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dan Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Bagi Hakim Tingkat Pertama Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022	15 s.d 21 September 2022

NO	NAMA	DIKLAT	TANGGAL
34.	JOVAN MEIRIL, S.T.	Kelas Khusus TIMAH Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung	27 September 2022
35.	DEWI APRILIA PUSPITA NINGRUM, S.Kom.	Kelas Khusus TIMAH Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung	27 September 2022
36.	DESKI ANDRIANSYAH, S.H.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan bagi Petugas Pemasarakatan dan Aparat Penegak Hukum Untuk Menunjang Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2022	28 September 2022
37.	LISA WAHYUNI, S.E.	Program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara Menengah Tahun 2022	6 Oktober s.d 23 November 2022
38.	JOSHUA EFRAIM SIMANJUNTAK, S.E.	Perubahan Jadwal Kegiatan Klasikal Pelatihan Dasar CPNS Kerjasama BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	5 September s.d 19 November 2022
39.	DERLI YULIANSARI, A.Md	Perubahan Jadwal Kegiatan Klasikal Pelatihan Dasar CPNS Kerjasama BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	5 September s.d 19 November 2022
40.	ZULISTIA NOVITRI, A.Md	Perubahan Jadwal Kegiatan Klasikal Pelatihan Dasar CPNS Kerjasama BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	5 September s.d 19 November 2022
41.	JOVAN MEIRIL, S.T.	Sosialisasi dan Bimtek Program Cashless Society	17 November 2022
42.	DEWI APRILIA PUSPITA NINGRUM, S.Kom.	Sosialisasi dan Bimtek Program Cashless Society	17 November 2022
43.	LISA WAHYUNI, S.E.	Sosialisasi dan Bimtek Program Cashless Society	17 November 2022
44.	YOS AGUSSETIAWAN SEMENDAWAI, S.H.	Sosialisasi dan Bimtek Program Cashless Society	17 November 2022
45.	ZULKIFLI, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	6 s.d 9 Desember 2022
46.	UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	6 s.d 9 Desember 2022
47.	MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	6 s.d 9 Desember 2022
48.	SUMANJAYA, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	6 s.d 9 Desember 2022
49.	REZA ARDHAFI, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	6 s.d 9 Desember 2022
50.	SURYA AL FAJRI SAPUTRA, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	6 s.d 9 Desember 2022
51.	ANDREAS PANDAPOTAN SIAMBATON, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan TUN	6 s.d 9 Desember 2022

4. PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

- ❖ Diklat (SDM Teknis / Non Teknis)

Tabel 3.19
Data Diklat Tahun 2022
Pengadilan Negeri Tanjungpandan

NO	NAMA	DIKLAT	TANGGAL
1	ELIZABETH JULIANA, S.H.	Pelatihan Champion Meeting – Court Excellence Training	13 s.d 17 Januari 2022
2	FRANS LUKAS SIANIPAR, S.H.	Pelatihan Berkelanjutan Bagi Hakim Tingkat Pertama (CJE-1)	1 s.d 14 Maret 2022
3	SYAFITRI APRIYUANI SUPRIATRY, S.H.,M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman	1 s.d 26 Maret 2022
4	BENNY WIJAYA, S.H.,M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman	1 s.d 26 Maret 2022
5	ANITA YULIANA, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	15 s.d 17 Maret 2022
6	AGUSTIANI, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	15 s.d 17 Maret 2022
7	BAMBANG SUPRIADI, S.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	15 s.d 17 Maret 2022
8	HARDIYANTO, S.IP	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	22 s.d 24 Maret 2022
9	IMAM MUALIMIN, S.H.,M.H.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	29 s.d 31 Maret 2022
10	MUHAMAD SUBHAN	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	5 s.d 7 April 2022
11	PASTI BONI SIAGIAN	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	5 s.d 7 April 2022
12	SUMAIDI	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	12 s.d 14 April 2022
13	KATARINA DAMERIA, A.Md	Pelatihan Manajemen ASN	22 Juli 2022 s.d 15 Agustus 2022
14	ELIZABETH JULIANA, S.H.	Pelatihan Internasional Frame work For Court Excellence (IFCE)	26 s.d. 30 Desember 2022

Pada tahun 2022, beberapa pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah dipanggil untuk mengikuti diklat, baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ataupun instansi setempat.

f. Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan

Pada tahun 2022 tidak ada hakim dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengikuti PPHB II (Program Diklat Hakim Berkelanjutan II) dan tidak ada Panitera/Panitera Pengganti (PP) mengikuti Pelatihan PP Berkelanjutan.

g. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Pada tahun 2022, tidak ada hakim yang mengikuti program diklat sertifikasi yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.20
Data Sertifikasi Hakim Tahun 2022
Pengadilan Negeri Tanjungpandan

NO	DIKLAT SERTIFIKASI	JUMLAH PESERTA
1	Sertifikasi Mediator	-
2	Sertifikasi Hakim PHI	-
3	Sertifikasi Hakim Perikanan	-
4	Sertifikasi Hakim Niaga	-
5	Sertifikasi Hakim Tipikor	-
6	Sertifikasi Hakim Lingkungan	-
7	Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak	-

❖ Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Tahun 2022 tidak ada tenaga teknis (Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti) dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

❖ Diklat Dalam Jabatan

Pada tahun 2022 tidak ada Pegawai dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Tabel 3.21
Data Diklat Kepemimpinan Tahun 2022
Pengadilan Negeri Tanjungpandan

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	-
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	-
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Penyelenggara Lembaga Administrasi Negara RI)	-
4	Diklat Sekretaris Pengadilan	-
5	Diklat Panitera Pengadilan	-

❖ Diklat Teknis Umum/Administrasi Manajemen

Pada tahun 2022, tidak ada Pegawai dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengikuti diklat teknis umum/administrasi manajemen yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Tabel 3.22
Data Diklat Administrasi Manajemen Tahun 2022
Pengadilan Negeri Tanjungpandan

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Diklat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	-
2	Diklat Akuntansi Berbasis Akrua	-
3	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	-
4	Diklat Sertifikasi Bendahara	-
5	Diklat Penyusunan LkjlP	-
6	Diklat Penyusunan Angka Kredit Widyaiswara	-
7	TOT Manajemen SAKIP	-
8	Diklat KIP	-
9	Diklat Teknis Perencana	-

5. PENGADILAN NEGERI Koba

Pada Tahun 2022, beberapa pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Koba telah dipanggil untuk mengikuti diklat, baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ataupun instansi setempat, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.23.
Daftar Hakim dan Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis / Non Teknis

No.	Nama Hakim/ Pegawai	Nama Diklat Yang Diikuti	Nama Penyelenggara Diklat	Daring/ Luring	Sertifikat yang diberikan
1	RIZAL TAUFANI,S.H.,M.H.	Diklat Mediator Hakim Panitera Lingkungan Peradilan Umum	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
2	SHINTA NIKE AYUDIA, S.H.,M.Kn.	Diklat Perkara Gugatan Sederhana	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
3	MAGDALENA SIMANUNGKALIT,S.H.	Diklat Akses Perempuan Terhadap Keadilan	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
4	JAMALUDIN,S.H.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Daring	Ada

No.	Nama Hakim/ Pegawai	Nama Diklat Yang Diikuti	Nama Penyelenggara Diklat	Daring/ Luring	Sertifikat yang diberikan
5	NURKAMALIA,S.H.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Luring	Ada
6	SARTIKA RATNASARI SINAGA,S.E	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Luring	Ada
7	HARDI JUMAIDI,S.H	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Negeri	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
8	FITRAH SUDDRAJAT,S.E	Diklat Prajabatan Golongan III	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
9	RIO FIRMANDO,S.H.	Diklat Prajabatan Golongan III	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
10	YOHANA N SIANTURI, A.Md.AB	Diklat Prajabatan Golongan II	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
11	RONI EVI DONGORAN, S.H	Diklat Prajabatan Golongan III	Pusdiklat MA RI	Daring & Luring	Belum Ada
12	KGS.M.AZLAN SHAH A.Md.AB	Diklat Prajabatan Golongan II	Pusdiklat MA RI	Daring & Luring	Belum Ada

6. PENGADILAN NEGERI MENTOK

Pada tahun 2022, dikarenakan Pandemi COVID-19, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan pendidikan dan pelatihan via online zoom.

❖ Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Pengadilan Negeri Mentok secara aktif mengirimkan hakim dan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi yang diadakan secara online, yaitu:

Tabel 3.24
Pelatihan Online yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Mentok Tahun 2022

No.	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Pelatihan Dasar CPNS Secara Blended Learning 'Kerjasama dengan BPSDMD Prov. Sumatera Selatan Golongan II dan III Angkatan VIII, IX, XII, XIII, XIV Tahun 2022	2 Orang
2	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan 1 s.d. 5 Tahun 2022	2 Orang
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Mempersiapkan Generasi Emas Mahkamah Agung Tahun 2045	1 Orang
4	TOEFL Preparation Test Tahun 2022	2 Orang
5	Pelatihan ECSCS Preparation Test Tahun 2022 Batch 2 Secara Online dari tempat tugas	1 Orang

❖ Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Tahun 2021, ada 4 (empat) orang pegawai Pengadilan Negeri Mentok, yaitu Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Pengganti mengikuti Bimbingan Teknis SPPT-TI, Biaya Perkara, E-Litigasi (E-Court), SIPP, dan SPPT-TI Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Tabel 3.25
Pelatihan Teknis Fungsional Pengadilan Negeri Mentok Tahun 2022

No.	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Bimbingan Teknis SPPT-TI, Biaya Perkara, E-Litigasi (E-Court), SIPP, dan SPPT-TI Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022	4 Orang
2	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti Seluruh Indonesia	3 Orang

❖ Diklat Dalam Jabatan

Pada tahun 2022, Tidak ada pegawai Pengadilan Negeri Mentok yang mengikuti Pendidikan atau Pelatihan dalam Jabatan seperti Pelatihan Kepemimpinan yang telah terlaksana pada tahun sebelumnya.

❖ Diklat Teknis Umum/Administrasi Manajemen

Pada tahun 2022, pelatihan yang dilaksanakan secara online dan offline oleh instansi di luar Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Mentok secara aktif telah mengirimkan beberapa pegawai mengikuti pelatihan dan sosialisasi tersebut.

Tabel 3.26
Diklat Teknis dan Manajemen Pengadilan Negeri Mentok Tahun 2022

No.	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan	3 Orang
2	E-learning PPSPM Angkatan V Tahun 2022	1 Orang
3	E-learning Bendahara Penerimaan Angkatan V Tahun 2022	1 Orang
4	E-Learning Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan VII tahun 2022	2 Orang

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA & TI (TEKNOLOGI INFORMASI)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA & TI

(TEKNOLOGI INFORMASI)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan pada suatu Instansi sangat dibutuhkan baik dalam pemberian gaji, anggaran yang digunakan, pelaksanaan, perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Penyerapan anggaran sangat diperlukan untuk mengetahui anggaran yang telah digunakan dan terserap sesuai dengan perencanaan anggaran.

Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai percerminan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.

Pagu Anggaran untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Bangka Belitung, untuk DIPA 01 berjumlah Rp. 60.289.623.000,- dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp.37.189.303.000,- belanja barang sebesar Rp.10.951.811.000,- dan belanja modal sebesar Rp.12.148.509.000,-. Sedangkan untuk DIPA 03 dengan total pagu peruntukan untuk belanja barang sebesar Rp. 1.268.594.000,- Dimana target realisasi telah berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Berikut ringkasan total

anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya selama tahun 2022 :

Tabel 4.1
Total Anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung & Pengadilan Se-Wilayah Hukumnya Tahun 2022

No	Sumber Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Badan Urusan Administrasi (BUA)	60.289.623.000
2.	Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum)	1.268.594.000
Total		61.558.217.000

Alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2022 ini DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI berjumlah Rp. 60.289.623.000,- (*Enam Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp.37.189.303.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah*). Belanja barang sebesar Rp. 10.951.811.000,- (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) dan pada belanja modal sebesar Rp.12.148.509.000,- (*Dua Belas Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah*). Sedangkan untuk DIPA 03 Badan Peradilan Umum berjumlah Rp. 1.268.594.000 (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

A. Realisasi Anggaran

Sampai dengan 31 Desember 2022 laporan realisasi anggaran DIPA 01 Sewilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah tercapai 99,36 % dari pagu anggaran, sedangkan untuk DIPA 03 telah tercapai 97,66 % dari pagu anggaran.

Realisasi Belanja untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Bangka Belitung untuk penggunaan DIPA 01 berjumlah Rp.60.289.623.000,- dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp.37.396.492.000,- belanja barang sebesar Rp.10.951.811.000,- dan belanja modal sebesar Rp.12.148.509.000,-. Sedangkan untuk DIPA 03 dengan total pagu dengan peruntukan untuk belanja barang sebesar Rp.1.268.594.000,00,- Dimana target realisasi telah berjalan sesuai dengan perencanaan awal.

Realisasi Belanja untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Bangka Belitung untuk penggunaan DIPA 01 berjumlah Rp.60.107.078.679,- dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp.37.182.051.759,- belanja barang sebesar Rp.10.978.811.000,- dan belanja modal sebesar Rp.12.088.448.677,-. Sedangkan untuk penggunaan DIPA 03 dengan rincian belanja barang sebesar Rp.1.238.886.914,00,-

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi

prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.

Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai percerminan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Untuk alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2022 ini DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI berjumlah Rp.60.289.623.000,- (*Enam Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp.37.396.492.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*). Belanja barang sebesar Rp.10.951.811.000,- (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) dan pada belanja modal sebesar Rp.12.148.509.000,- (*Dua Belas Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).

Untuk realisasi anggaran di tahun 2022 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI untuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung beserta seluruh satuan kerja dibawahnya telah mencapai 99,36% dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2022, yaitu senilai Rp.60.107.078.679,-. Sehingga sisa anggaran sebesar Rp.333.850.421,- dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4.2.
DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI
WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

NO	SATKER / JENIS MAK	URAIAN	PAGU DIPA	TOTAL REALISASI		SISA DANA	
				TOTAL	%	TOTAL	%
1	663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	17.696.211.000	17.615.507.198	99,54	80.703.802	0,46
	51	BELANJA PEGAWAI	14.886.920.000	14.853.588.206	99,78	33.331.794	0,22
	52	BELANJA BARANG	2.585.191.000	2.538.356.292	98,12	46.834.708	1,88
	53	BELANJA MODAL	224.100.000	189.252.700	99,76	50.000	0,24
2	099010	PENGADILAN NEGERI PANGKALPINA NG	10.473.005.000	10.446.813.852	99,75	26.191.148	0,25

NO	SATKER / JENIS MAK	URAIAN	PAGU DIPA	TOTAL REALISASI		SISA DANA	
				TOTAL	%	TOTAL	%
	51	BELANJA PEGAWAI	8.133.189.000	8.111.237.487	99,73	21.951.513	0,27
	52	BELANJA BARANG	2.144.816.000	2.140.626.365	99,80	4.189.635	0,20
	53	BELANJA MODAL	195.000.000	194.950.000	99,97	50.000	0,03
3	099024	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	6.646.243.000	6.593.333.364	99,20	52.909.636	0,80
	51	BELANJA PEGAWAI	4.197.293.000	4.146.142.117	98,78	51.150.883	1,22
	52	BELANJA BARANG	2.334.950.000	2.333.211.247	99,93	1.738.753	0,07
	53	BELANJA MODAL	114.000.000	113.980.000	99,98	20.000	0,02
4	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPAN DAN	5.008.655.000	4.918.847.128,00	98,21	89.807.872,00	1,79
	51	BELANJA PEGAWAI	3.596.560.000	3.565.667.643,00	99,14	30.892.357,00	0,86
	52	BELANJA BARANG	1.334.595.000	1.275.910.485,00	95,60	58.684.515,00	4,40
	53	BELANJA MODAL	77.500.000	77.269.000,00	99,70	231.000,00	0,30
5	401912	PENGADILAN NEGERI KOKA	4.750.850.000	4.696.037.449	98,85	54.812.551	1,15
	51	BELANJA PEGAWAI	3.196.088.000	3.141.848.150	98,30	54.239.850	16,43
	52	BELANJA BARANG	1.325.162.000	1.324.616.299	99,96	545.701	0,04
	53	BELANJA MODAL	229.600.000	229.573.000	99,99	27.000	00,16
6	401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	15.714.659.000	15.630.720.934	99,47	83.938.066	0,53
	51	BELANJA PEGAWAI	3.179.253.000	3.157.749.402	99,32	21.503.598	0,68
	52	BELANJA BARANG	1.227.097.000	1.223.857.555	99,74	3.239.445	0,26
	53	BELANJA MODAL	11.308.309.000	11.249.113.977	99,48	59195023	0,52

NO	SATKER / JENIS MAK	URAIAN	PAGU DIPA	TOTAL REALISASI		SISA DANA	
				TOTAL	%	TOTAL	%
JUMLAH			60.289.623.000	59.901.259.925	99,36	325.928.607	0,65

Untuk pagu anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2022 ini DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum MARI berjumlah Rp.1.268.594.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran di tahun 2022 DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum MARI untuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung beserta seluruh satuan kerja dibawahnya Rp.1.238.886.914,00,- (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah*), dan telah mencapai 97,66% dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4.3.
DIPA 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM WILAYAH PENGADILAN BANGKA BELITUNG

NO	SATKER / JENIS MAK	URAIAN	PAGU DIPA	TOTAL REALISASI	
				TOTAL	%
1	663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG			
	52	BELANJA BARANG	231.780.000,00	219.200.160,00	94,57
2	099234	PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG			
	52	BELANJA BARANG	389.980.000,00	385.500.500,00	98,85
3	099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT			
	52	BELANJA BARANG	290.525.000,00	285.164.000,00	98,15
4	400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN			
	52	BELANJA BARANG	149.120.000,00	143.203.500,00	96,03
5	402020	PENGADILAN NEGERI Koba			
	52	BELANJA BARANG	102.838.000,00	101.745.213,00	98,94
6	402022	PENGADILAN NEGERI MENTOK			
	52	BELANJA BARANG	104.351.000,00	104.073.541,00	99,73
J U M L A H			1.268.594.000,00	1.238.886.914,00	97,66

B. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya menggunakan aplikasi SIMARI dalam hal penerimaan PNBP,

pembukuan dan pelaporan dan menggunakan aplikasi SIMPONI dari Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal penyetoran PNBP.

PNBP yang disetorkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya terdiri dari PNBP umum dan PNBP fungsional. PNBP umum adalah penerimaan yang berasal dari penerimaan sewa rumah dinas, sewa kantin, Pendapatan dari Penjualan Lelang BMN, dan Pendapatan dari belanja Tahun Anggaran Yang Lalu. Sedangkan PNBP fungsional berasal dari kegiatan peradilan seperti ongkos perkara dan pendapatan leges maupun dari Pembuatan berita acara sumpah Advokat.

Tabel 4.4
Realisasi PNBP
pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Dan Pengadilan Se-Wilayah Hukumnya Tahun 2022

NO	SATKER	Target PNBP Umum	Relisasi PNBP Umum	Target PNBP Fungsional	Realisasi PNBP Fungsional
1	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	40.824.000	41.968.599	290.000	260.000
2	PN Pangkalpinang	18.159.000	18.022.040	22.642.000	31.149.000
3	PN Sungailiat	17.142.000	16.349.500	18.476.000	26.124.000
4	PN Tanjungpandan	16.934.000	18.641.528	24.478.000	16.160.500
5	PN Koba	-	1.088.940.500	7.240.000	11.191.500
6	PN Mentok	-	-	9.864.000	10.129.000
TOTAL		93.059.000	94.981.667	82.990.000	95.014.000

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, sarana prasarana dikelola berdasarkan sistem yang disebut dengan SIMAK BMN. SIMAK BMN adalah suatu sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca. Disamping itu SIMAK-BMN juga didukung oleh buku inventaris dan laporan barang milik negara dan berbagai kartu kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan barang milik Negara.

Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Esensi utama dari manajemen aset adalah terpenuhinya asas efisiensi dimana pengelolaan Barang Milik Negara diarahkan agar sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal.

Manajemen aset mencakup proses mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan (disposal) serta monitoring terhadap aset-aset tersebut

selama umur penggunaannya oleh organisasi atau Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Selama periode Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengelola Aset/Barang Milik Negara meliputi:

B.1. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukumnya digunakan untuk kepentingan dinas jabatan yaitu didirikan Gedung dan/atau Bangunan Rumah Negara/Dinas yang diperuntukan untuk para Hakim, Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukumnya.

Tanah yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukumnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Aset Tanah pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Dan Pengadilan Se-Wilayah Hukumnya Tahun 2022

No.	Lokasi Tanah	Luas Tanah (M ²)	Nomor Sertifikat tanah
1	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung		
	Jl. Pulau Mendanau Pangkalpinang	1.784 M ²	Nomor 60
	Jl. Pulau Bangka Pangkalpinang	4.984 M ²	Nomor 30
	Jl. Komplek Perumahan Pengadilan Tinggi Bangka Beling Pangkalpinang	1.725 M ²	Nomor 56
	Jl. Pulau Lindung Barat Pangkalpinang	3.267 M ²	Nomor 61
	Jl. Pulau Lindung Barat Pangkalpinang	2.898 M ²	Nomor 62
	Jl. Pulau Panjang Pangkalpinang	385 M ²	Nomor 59
2	Pengadilan Negeri Pangkalpinang		
	Jalan Jenderal Sudirman No. 09, Kelurahan Opas Indah, Pangkalpinang	5.202 M ²	Hak Pakai No. 03
	Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Selindung Baru, Pangkalpinang	1.814 M ²	Hak Pakai No. 02
	Jl. Koba, Desa Dul, Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	1.200 M ²	Hak Milik No. 338
	Jl. Koba, Desa Dul, Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	3.000 M ²	Hak Milik No. 262
	Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Selindung Baru, Pangkalpinang	913 M ²	Hak Pakai No. 01

No.	Lokasi Tanah	Luas Tanah (M ²)	Nomor Sertifikat tanah
3	Pengadilan Negeri Sungailiat		
	Jl. Pemuda No. 12 – Sungailiat	7.244 M ²	Nomor 304
	Jl. Samratulangi – Sungailiat	300 M ²	Nomor 339
	Komplek RSS (Jl. A.Yani Jalur II) Sungailiat	1.946 M ²	Nomor 535
	Jl. Imam Bonjol – Sungailiat	1.200 M ²	Nomor 305
	Jl. Pemuda – Sungailiat	1.500 M ²	Nomor 00021
	Jl. Gunung Namak – Toboali	7.000 M ²	Nomor 00107
4	Pengadilan Negeri Tanjungpandan		
	Jl. Sriwijaya No. 1 – Tanjungpandan	2.680 M ²	Nomor 25
	Jl. Sriwijaya – Tanjungpandan	602 M ²	Nomor 27
	Jl. Kapt. Saridin – Tanjungpandan	3.615 M ²	Nomor 28
	Jl. Sudirman – Tanjungpandan	1.125 M ²	Nomor 38
	Jl. OPR – Tanjungpandan	675 M ²	Nomor 39
	Jl. Kapt. Saridin – Tanjungpandan	368 M ²	Nomor 56
5	Pengadilan Negeri Koba		
	Jl. Gelora No. 1, Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Tengah	7.375 M ²	Hak Pakai No. 00066
6	Pengadilan Negeri Mentok		
	Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, Kel. Belo Laut, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, Bangka Belitung	5.533 M ²	Hak Pakai No. 190

B.2. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan Bangunan yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukumnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Aset Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Dan Pengadilan Se-Wilayah Hukumnya Tahun 2022

NO	URAIAN	KONDISI			KETERANGAN
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG				
	Gedung Kantor				
	Bangunan Gedung Kantor	1	-	-	
	Rumah Dinas				
	RUMAH DINAS KETUA	1	-	-	Tipe C250
	RUMAH DINAS WAKIL KETUA	1	-	-	Tipe C120
	RUMAH DINAS HAKIM	1	-	1	Tipe C120
		2	-	-	Tipe C128
		4	-	-	Tipe C74
		4	-	-	Tipe C70
	RUMAH DINAS PANITERA	1	-	-	Tipe C120
	RUMAH DINAS SEKRETARIS	1	-	-	Tipe C120
	RUMAH DINAS PEGAWAI	4	-	-	Tipe C54
		4	-	-	Tipe C54
2	PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG				
	Gedung Kantor				
	Bangunan Gedung Kantor	2	-	-	
	Rumah Dinas				
	RUMAH DINAS KETUA	-	-	-	Dipinjamkan oleh PT Timah
	RUMAH DINAS WAKIL KETUA	1	-	-	
	RUMAH DINAS HAKIM	10	-	2	2 rumah kondisi rusak berat
	RUMAH DINAS PANITERA	1	-	-	
	RUMAH DINAS SEKRETARIS	-	-	-	Menggunakan Rumah Pribadi
3	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT				
	Gedung Kantor				
	Bangunan Gedung Kantor	1	-	-	
	Rumah Dinas				
	RUMAH DINAS KETUA	1	-	-	Rumah Gol I Type B

NO	URAIAN	KONDISI			KETERANGAN
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
	RUMAH DINAS WAKIL KETUA	1	-	-	Type C
	RUMAH DINAS HAKIM	11	-	-	Type C
4	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN				
	Gedung Kantor				
	Bangunan Gedung Kantor	1	-	-	
	Rumah Dinas				
	RUMAH DINAS KETUA	1	-	-	
	RUMAH DINAS WAKIL KETUA	-	1	-	
	RUMAH DINAS HAKIM	4	3	-	3 Rusak Ringan
5	PENGADILAN NEGERI Koba				
	Gedung Kantor				
	Bangunan Gedung Kantor	1	-	-	Gedung Baru Tahun 2020
	Rumah Dinas				
	RUMAH DINAS KETUA	-	-	-	
	RUMAH DINAS WAKIL KETUA	-	-	-	
	RUMAH DINAS HAKIM	-	-	-	
5	PENGADILAN NEGERI MENTOK				
	Gedung Kantor				
	Bangunan Gedung Kantor	1	-	-	Gedung Baru Tahun 2022
	Rumah Dinas				
	RUMAH DINAS KETUA	-	-	-	
	RUMAH DINAS WAKIL KETUA	-	-	-	
	RUMAH DINAS HAKIM	-	-	-	

Terdapat dua pengadilan yang belum memiliki rumah dinas yaitu Pengadilan Negeri Koba dan Pengadilan Negeri Mentok.

B.3.KENDARAAN DINAS

Kendaraan dinas yang dikelola dan dicatat dalam Laporan Barang milik Negara (BMN) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukumnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Aset Kendaraan Dinas
pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Dan Pengadilan Se-Wilayah Hukumnya Tahun 2022

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG					
	JENIS KENDARAAN RODA 4					
	New Corolla Altis 1.8 GMT.	2005	-	V	-	
	Toyota Kijang Inova 2.0 E MT.	2005	-	V	-	
	Toyota Kijang Inova 2.0 E MT.	2008	-	V	-	
	Toyota Kijang Minibus 1.8 LGX MT	2004	-	V	-	
	JENIS KENDARAAN RODA 2					
	Yamaha Zupiter Z 115 cc	2005	-	V	-	5 Unit
	Honda Kharisma 115 cc	2005	-	V	-	2 Unit
	Yamaha V-xion 150 cc	2008	-	V	-	3 Unit
	Yamaha V-xion 150 cc	2008	-	-	V	1 Unit
2	PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG					
	JENIS KENDARAAN RODA 4					
	Sedan Toyota New Vios 1.5 G	2008	V	-	-	
	Minibus Toyota Innova E	2006	V	-	-	
	Minibus Toyota Kijang	1996	-	V	-	
	JENIS KENDARAAN RODA 2					
	Suzuki A 100	1981	-	-	V	
	Suzuki A 100	1981	-	-	V	
	Yamaha Jupiter Z	2005	V	-	-	
	Yamaha Vega R	2006	V	-	-	
	Yamaha Vega R	2006	V	-	-	
	Yamaha Vega R	2006	V	-	-	

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
	Yamaha Vixion	2008	v	-	-	
	Honda Mega Pro	2011	v	-	-	
3	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT					
	JENIS KENDARAAN RODA 4					
	Kijang Innova E	2006	V	-	-	1 Unit
	Kijang KF80 STD	2004	V	-	-	1 Unit
	Avanza 1300G	2011	V	-	-	2 Unit
	JENIS KENDARAAN RODA 2					
	Jupiter Z	2005	V	-	-	1 Unit
	V-ixion	2008	V	-	-	2 Unit
	Honda GL	2011	V	-	-	1 Unit
4	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN					
	JENIS KENDARAAN RODA 4					
	Kijang Minibus	2008	V	-	-	1 Unit
	Kijang Innova E	2012	V	-	-	1 Unit
	Avanza 1,3 G	2016	V	-	-	1 Unit (pinjam pakai)
	Innova Reborn	2021	V	-	-	1 Unit (pinjam pakai)
	Innova Luxury	2017	V			1 Unit (pinjam pakai)
	JENIS KENDARAAN RODA 2					
	Honda Win	1996	-	-	V	1 Unit
	Yamaha Jupiter Z	2003	V	-	-	1 Unit
	Yamaha V-IXION	2010	V	-	-	1 Unit
	Yamaha Jupiter Z	2010	V	-	-	1 Unit
5	PENGADILAN NEGERI KOBAS					
	JENIS KENDARAAN RODA 4					
	Honda BR-V 1.5 EMT CKD	2019	V	-	-	BN 1052 TZ
	Honda CR-V 2.0 CVT CKD	2020	V	-	-	BN 1097 TZ
	Mitshubishi XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 AT B	2020	V	-	-	BN 1807 PI

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
	Nissan GRAND LIVINA 1.5 MT	2018	V	-	-	BN 1561 TZ
	JENIS KENDARAAN RODA 2					
	Yamaha BYSON 150	2019	V	-	-	BN 2514 TZ
	Yamaha BYSON 150	2019	V	-	-	BN 2515 TZ
	Yamaha Vixion 150	2020	-	v	-	BN 5532 TZ
	Yamaha Jupiter Z	2020	-	V	-	BN 5533 TZ
6	PENGADILAN NEGERI MENTOK					
	JENIS KENDARAAN RODA 4					
	Minibus Toyota Rush 1.5 G A/T	2020	V	-	-	
	JENIS KENDARAAN RODA 2					
	Honda Vario A1F02N37M1 A/T	2020	V	-	-	
	Honda Vario A1F02N37M1 A/T	2020	V	-	-	
	Yamaha Jupiter Z	2005	V	-	-	Transfer masuk dari PT Babel pada tahun 2020
	Yamaha Vixion	2008	V	-	-	Transfer masuk dari PT Babel pada tahun 2020

B.4. FASILITAS GEDUNG DAN FASILITAS PERKANTORAN

Tabel 4.8
Fasilitas Gedung Kantor
 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
 Dan Pengadilan Se-Wilayah Hukumnya Tahun 2022

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
1. PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG			
GEDUNG			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	4	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	1	
7	Ruang Kepaniteraan	4	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
8	Ruang Kesekretariatan	5	
9	Ruang Server	1	
10	Ruang Rapat	1	
11	Ruang Command Center	1	
12	Ruang Perpustakaan	1	
13	Ruang Bendahara	1	
14	Ruang Dharmayukti	1	
15	Ruang Arsip perkara	1	
16	Ruang Renprog & Panitera Pengganti	1	
17	Ruang Pos Jaga	1	
18	Rumah Dinas jaga	1	
19	Ruang Ajudan	1	
20	Ruang Tempat Ibadah	1	
21	Gudang	1	
2. PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG			
GEDUNG			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	3	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Kepaniteraan	5	
9	Ruang Kesekretariatan	3	
10	Ruang Server	1	
11	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
12	Ruang Hakim Ad Hoc	1	
13	Ruang Tunggu Pengacara	1	
14	Ruang Tunggu Jaksa	1	
15	Ruang Rapat	1	
16	Ruang Perpustakaan	1	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Kesehatan	1	
19	Ruang Ibu dan Anak	1	
20	Ruang Arsip Kepaniteraan	5	
21	Ruang Arsip Kesekretariatan	2	
22	Ruang Tahanan	2	
23	Ruang Posbakum	1	
3. PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT			
GEDUNG			
1	Pos Jaga	2	
2	Parkir Roda 4 dan Roda 2	2	
3	Mushola	1	
4	Kantin	1	
5	Gudang	1	
GEDUNG UTAMA			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera Pengganti dan Ruang JuruSita	1	
5	Ruang Teleconference	1	
6	Ruang Panitera	1	
7	Ruang Sekretaris	1	
8	Ruang Akreditasi	1	
9	Ruang Serbaguna	1	
10	Ruang Rapat	1	
11	Ruang IT	1	
12	Ruang Arsip	1	
13	Ruang Perpustakaan	1	
14	Ruang Sidang Umum	3	
15	Ruang Sidang Anak	1	
16	Ruang Kepaniteraan	1	
17	Ruang Kesekretariatan	1	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
18	Ruang Kasir	1	
19	Ruang Bendahara	1	
20	Ruang Diversi / Mediasi	1	
21	Ruang Tahanan	3	
22	Ruang Tunggu Jaksa	1	
23	Ruang Jaga Polisi	1	
24	Ruang Menyusui / Main Anak	1	
Gedung Belakang			
1	Ruang Posbakum	1	
2	Ruang Poliklinik	1	
3	Ruang Tunggu PH	1	
4	Ruang Arsip Lama	1	
5	Ruang Arsip (Administrasi)	1	
6	Ruang Mediasi	1	
7.	Ruang Kaukus	1	
4. PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN			
GEDUNG			
1	Parkir Roda 4 dan Roda 2	2	
2	Mushola	1	
3	Kantin	1	
4	Gudang	1	
GEDUNG UTAMA			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera Pengganti	1	
6	Ruang Panitera	1	
7	Ruang Sekretaris	1	
8	Ruang Akreditasi	1	
9	Ruang IT	1	
10	Ruang Arsip	1	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
11	Ruang Perpustakaan	1	
12	Ruang Sidang Umum	2	
13	Ruang Sidang Anak	1	
14	Ruang Kepaniteraan	3	
15	Ruang Kesekretariatan	3	
16	Ruang Kasir	1	
17	Ruang Bendahara	1	
18	Ruang Diversi / Mediasi	1	
19	Ruang Tahanan	2	
20	Ruang Tunggu Jaksa	1	
21	Ruang Menyusui / Main Anak	1	
GEDUNG BELAKANG			
1	Ruang Posbakum	1	
2	Ruang Tamu Terbuka	1	
3	Ruang Tunggu	1	
4	Ruang Arsip	1	
5. PENGADILAN NEGERI KOBA			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	4	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
7	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
9	Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	1	
10	Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	1	
11	Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
12	Ruang Panitera Pengganti	1	
13	Ruang Server	1	
14	Ruang Document Control	1	
15	Ruang Rapat	1	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
16	Ruang Command Center	1	
17	Ruang Jurusita	1	
18	Ruang Sidang	4	
19	Ruang Tunggu PTSP	1	
20	Ruang Posbakum	1	
21	Ruang Kasir	1	
22	Ruang Inzage	1	
23	Ruang Tunggu Jaksa	1	
24	Ruang Penasihat Hukum/ BAPAS	1	
25	Ruang Barang Bukti	1	
26	Ruang Tunggu Ramah Anak	1	
27	Ruang Laktasi	1	
28	Ruang Perpustakaan	1	
29	Ruang Arsip	1	
30	Ruang Mediasi	1	
31	Ruang Kesehatan	1	
32	Ruang Kaukus	1	
33	Ruang Saksi	1	
34	Ruang ATK	1	
35	Gudang	1	
36	Ruang Tahanan Dewasa	3	
37	Ruang Tahanan Anak	2	
38	Ruang Tunggu Sidang	2	
39	Ruang Teleconference	1	
40	Ruang Diversi	1	
41	Ruang ADC	1	
6.	PENGADILAN NEGERI MENTOK		
1	Lemari Besi/Metal	24	
2	Lemari Kayu	9	
3	Rak Besi	27	
4	Rak Kayu	9	
5	Filling Cabinet	3	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
6	Brankas	2	
7	Lemari Display	1	
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7	
9	Tabung Pemadam Api	4	
10	CCTV – Camera Control Television System	6	
11	Papan Visual/Papan Nama	2	
12	Mesin Absensi	1	
13	LCD Projector/Infocus	1	
14	Meja Kerja Kayu	76	
15	Kursi Besi/Metal	154	
16	Sice	1	
17	Bangku Panjang Besi	2	
18	Meja Rapat	5	
19	Tempat Tidur Besi	1	
20	Kasur/Spring Bed	1	
21	Publik Astari (Pembatas Antrian)	4	
22	Sofa	20	
23	Mesin Penghisap Debu/Vacum	1	
24	Lemari Es	2	
25	A.C. Split	6	
26	Kipas Angin	4	
27	Loudspeaker	4	
28	Sound System	1	
29	Microphone	7	
30	Tiang Bendera	2	
31	Tangga Aluminium	1	
32	Dispenser	9	
33	Mimbar/Podium	2	
34	Vertikal Blind	1	
35	Gordin/Kray	4	
36	Bracket Standing Peralatan	1	
37	Tangki Air	1	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
38	Audio Mixing Console	1	
39	Microphone/Wireless MIC	1	
40	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	
41	Microphone Cable	1	
42	Video Conference	1	
43	LCD Monitor	1	
44	Camera Conference	4	
45	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	2	
46	Kursi Dorong	1	
47	Meja Obat	2	
48	Layar Proyektor	1	
49	Komputer Jaringan Lainnya	1	
50	P.C. Unit	20	
51	Laptop	15	
52	CPU	1	
53	Printer	8	
54	Server	2	
55	Router	5	
56	Hub	10	
57	Rak Server	1	
58	Kabel UTP	2	
59	Wireless Access Point	3	
60	Switch	1	
61	Peralatan Jaringan Lainnya	10	

Tabel 4.9
Fasilitas Perkantoran
pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Dan Pengadilan Se-Wilayah Hukumnya Tahun 2022

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
1. PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG			
PERALATAN DAN MESIN			
1.	Stationary waterpump	4 bh	Kondisi baik
2.	Lemari besi/ metal	22 bh	Kondisi baik
3.	Lemari kayu	69 bh	Kondisi baik
4.	Rak kayu	13 bh	Kondisi baik
5.	Filing cabinet besi	27 bh	Kondisi baik
6.	Filing cabinet kayu	9 bh	Kondisi baik
7.	Brandkas	2 bh	Kondisi baik
8.	Buffet	4 bh	Kondisi baik
9.	Tabung pemadam api	3 bh	Kondisi baik
10.	CCTV	11 canel	Kondisi baik
11.	Papan visual/papan nama	40 bh	Kondisi baik
12.	Pompa Air	6 bh	Kondisi baik
13.	Mesin absensi	2 bh	Kondisi baik
14.	Overhead projector	1 bh	Kondisi baik
15.	Hand metal detector	2 bh	Kondisi baik
16.	LCD projector/infocus	3 bh	Kondisi baik
17.	Alat detector barang terlarang	1 bh	Kondisi baik
18.	Papan pengumuman	9 bh	Kondisi baik
19.	Perkakas kantor lainnya	4 bh	Kondisi baik
20.	Meja kerja kayu	112 bh	Kondisi baik
21.	Kursi besi/metal	303 bh	Kondisi baik
22.	Kursi kayu	16 bh	Kondisi baik
23.	Sice	29 bh	Kondisi baik
24.	Meja rapat	26 bh	Kondisi baik
25.	Meja komputer	5 bh	Kondisi baik
26.	Tempat tidur kayu	6 bh	Kondisi baik
27.	Kasur/spring bed	8 bh	Kondisi baik
28.	Meja makan besi	4 bh	Kondisi baik
29.	Meja makan kayu	1 bh	Kondisi baik
30.	Meja TV	7 bh	Kondisi baik

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
31.	Meubelair Lainnya	2 bh	Kondisi baik
32.	Mesin pemotong rumput	2 bh	Kondisi baik
33.	Mesin cuci	1 bh	Kondisi baik
34.	Lemari es	8 bh	Kondisi baik
35.	AC Split	51 bh	Kondisi baik
36.	AC Portabel	4 bh	Kondisi baik
37.	Kompor gas	1 bh	Kondisi baik
38.	Televisi	16 bh	Kondisi baik
39.	Soundystem	6 bh	Kondisi baik
40.	Stabilisator	6 bh	Kondisi baik
41.	Dispenser	20 bh	Kondisi baik
42.	Mimbar/podium	2 bh	Kondisi baik
43.	Lambang instansi	1 bh	Kondisi baik
44.	Gucci	2 bh	Kondisi baik
45.	Karpet	32 bh	Kondisi baik
46.	Vertikal blind	21 bh	Kondisi baik
47.	Gordyin/Kray	15 bh	Kondisi baik
48.	Tangki Air	3 bh	Kondisi baik
49.	Wireless MIC	2 bh	Kondisi baik
50.	UPS	7 bh	Kondisi baik
51.	Battery Charger	1 bh	Kondisi baik
52.	CD Recorder	1 bh	Kondisi baik
53.	Celling Mount Bracket	1 bh	Kondisi baik
54.	Tripod Camera	1 bh	Kondisi baik
55.	Camera Digital	2 bh	Kondisi baik
56.	LCD Monitor	1 bh	Kondisi baik
57.	Camera Conference	2 bh	Kondisi baik
58.	Telephone (PABX)	2 bh	Kondisi baik
59.	Network Monitoring System	1 bh	Kondisi baik
60.	Peralatan Antena SHF	1 bh	Kondisi baik
61.	Genset	4 bh	Kondisi baik
62.	LAN	1 bh	Kondisi baik
63.	P.C Unit	20 bh	Kondisi baik
64.	Lap Top	31 bh	Kondisi baik

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
65.	Note Book	11 bh	Kondisi baik
66.	Scanner	2 bh	Kondisi baik
67.	Monitor	1 bh	Kondisi baik
68.	Printer	24 bh	Kondisi baik
69.	Server	1 bh	Kondisi baik
70.	Router	1 bh	Kondisi baik
71.	Hub	1 bh	Kondisi baik
72.	Rak Server	1 bh	Kondisi baik
73.	Mesin Fotocopy Folio	1 bh	Kondisi baik
74.	Focusing Screen	1 bh	Kondisi baik
75.	Papan Gambar	1 bh	Kondisi baik
76.	Bangku Panjang	3 bh	Kondisi baik
77.	Kipas Angin	3 bh	Kondisi baik
78.	Rice Cooker	1 bh	Kondisi baik
79.	Alat Penyimpan Beras	1 bh	Kondisi baik
80.	Loudspeaker	2 bh	Kondisi baik
81.	Megaphone	1 bh	Kondisi baik
82.	Microphone Table Stand	4 bh	Kondisi baik
83.	Camera Video	1 bh	Kondisi baik
84.	Seterika	1 bh	Kondisi baik
2. PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG			
PERALATAN DAN MESIN			
1.	Lemari Besi/Metal	47	
2.	Lemari Kayu	37	
3.	Rak Besi	15	
4.	Rak Kayu	10	
6.	Filing Cabinet Besi	34	
7.	Brandkas	4	
8.	Lemari Display	2	
9.	Tabung Pemadam Api	2	
10.	CCTV - Camera Control Television System Buah	1 Set	
11.	Papan Visual/Papan Nama	44	
12.	Peta	1	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
13.	Mesin Absensi	3	
14.	Perkakas Kantor Lainnya	17	
15.	Meja Kerja Besi/Metal	7	
16.	Meja Kerja Kayu	117	
17.	Kursi Besi/Metal	353	
18.	Kursi Kayu	25	
19.	Sice	15	
20.	Bangku Panjang Kayu	67	
21.	Meja Rapat	15	
22.	Meja Komputer	24	
23.	Meja Resepsionis	7	
24.	Kasur/Spring Bed	1	
25.	Meja Makan Kayu	1	
26.	Jam Elektronik	14	
27.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	
28.	Mesin Pemotong Rumput	1	
29.	Lemari Es	3	
30.	A.C. Split	39	
31.	Kipas Angin	13	
32.	Exhause Van	1	
33.	Alat Pendingin Lainnya	4	
34.	Televisi	10	
35.	Loudspeaker	10	
36.	Sound System	5	
37.	Wireless	3	
38.	Microphone	20	
39.	Lambang Garuda Pancasila	5	
40.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
41.	Tiang Bendera	10	
42.	Dispenser	12	
43.	Palu Sidang	8	
44.	Lambang Instansi	1	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
45.	Vertikal Blind	55	
46.	Bendera Negara	2	
47.	Audio Visual	2	
48.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	
49.	Weapon & Metal Detector (Check Gate)	3	
50.	Layar Film/Projector	1	
51.	Telephone (PABX)	1	
52.	Facsimile	4	
53.	Genset	4	
54.	Komputer / PC	72	
55.	Laptop	28	
56.	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4	
57.	Printer	44	
58.	Infocus	1	
59.	PABX	1	
60.	Server	2	
61.	Router	1	
62.	Hub	2	
63.	Kamera	1	
64.	Monografi	3.680	
3. PENGADILAN NEGERI SUNGALIAI			
PERALATAN DAN MESIN			
1	PC Unit	38	
2	Laptop	29	
3	Printer	33	
4	Scanner	2	
5	LCD Projector/Infocus	1	
6	PABX	1	
7	AC	56	
8	Genset	2	
9	CCTV	1	
10	Server	1	
11	Rak Server	1	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
12	Kursi Pengunjung (stenlis)	87	
13	Kamera	1	
14	Lemari kayu	8	
15	Rak Besi Arsip	24	
16	Brankas	1	
17	Hand Metak Detector	1	
18	Internet	2	Astinet 1:1 IndieHome 50Mbps
19	Lemari Kaca	3	
4. PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN			
PERALATAN DAN MESIN			
1	PC Unit	23	
2	Laptop	25	
3	Printer	15	
4	Scanner	2	
5	LCD Projector/Infocus	1	
6	PABX	1	
7	AC	17	
8	Genset	1	
9	CCTV	2	
10	Server	2	
11	Rak Server	1	
12	Kursi Pengunjung (stenlis)	31	
13	Lemari kayu	37	
14	Rak Besi Arsip	8	
15	Brankas	1	
16	Internet	1	Astinet 1:1 100 Mbps
5. PENGADILAN NEGERI KOBA			
PERALATAN DAN MESIN			
1	Komputer/ PC	21 Buah	
2	Laptop	15 Buah	
3	Lemari Besi/Metal	25 Buah	
4	Lemari Kayu	9 Buah	
5	Rak Besi	18 Buah	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
6	Brandkas	2 Buah	
7	LCD Projector/Infocus	1 Buah	
8	Meja Kerja Besi/Metal	28 Buah	
9	Meja Kerja Kayu	63 Buah	
10	Kursi Besi/Metal	155 Buah	
11	Kursi Kayu	28 Buah	
12	Sice	1 Buah	
13	Bangku Panjang Besi/Metal	2 Buah	
14	Meja Rapat	2 Buah	
15	Meja Marmer	5 Buah	
16	Kasur/Spring Bed	1 Buah	
17	Mesin Absensi	1 Buah	
18	Sofa	7 Buah	
19.	A.C. Split	12 Buah	
20.	Televisi	5 Buah	
21.	Loudspeaker	4 Buah	
22.	Sound System	1 Buah	
23.	Stabilisator	1 Buah	
24.	Lambang Garuda Pancasila	2 Buah	
25.	Tiang Bendera	1 Set	
26.	Audio Mixing Console	1 Buah	
27.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5 Buah	
28.	LCD Monitor	1 Buah	
29.	Camera Conference	1 Buah	
30.	Kamera Digital	1 Buah	
31.	Komputer Jaringan Lainnya	1 Buah	
32.	Monitor	1 Buah	
33.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 Buah	
34.	Server	2 Buah	
35.	Router	6 Buah	
36.	Hub	1 Buah	
37.	Rak Server	1 Buah	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
38.	CAT 6 Cable	3 Buah	
39.	Acces Point	4 Buah	
6. PENGADILAN NEGERI MENTOK			
PERALATAN DAN MESIN			
1	Lemari Besi/Metal	4	
2	Rak Besi	2	
3	Brandkas	1	
4	Lemari Display	1	
5	CCTV – Camera Control Television System	4	
6	Mesin Absensi	1	
7	Meja Kerja Kayu	11	
8	Kursi Besi/Metal	4	
9	Sice	1	
10	Bangku Panjang Besi	2	
11	Meja Rapat	1	
12	A.C. Split	6	
13	Sound System	1	
14	Mimbar/Podium	1	
15	Gordin/Kray	4	
16	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	
17	LCD Monitor	1	
18	Camera Conference	3	
19	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	
20	Layar Projector	1	
21	Komputer Jaringan Lainnya	11	
22	P.C. Unit	13	
23	Laptop	5	
24	CPU	1	
25	Printer	4	
26	Server	2	
27	Router	4	
28	Hub	10	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
29	Rak Server	1	
30	Kabel UTP	2	
31	Wireless Access Point	3	
32	Switch	1	
33	Peralatan Jaringan Lainnya	10	
34	Gerobak Dorong	1	
35	Mesin Pompa Air PMK	1	
36	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	
37	Rak-rak Penyimpan	1	
38	Lemari Kayu	1	
39	Rak Kayu	1	
40	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	3	
41	LCD Projector/Infocus	1	
42	Kursi Kayu	1	
43	Bangku Panjang Besi/Metal	2	
44	Tempat Tidur Besi	1	
45	Kasur/Spring Bed	1	
46	Kipas Angin	1	
47	Tiang Bendera	2	
48	Tangga Aluminium	1	
49	Dispenser	2	
50	Tangki Air	1	
51	Microphone/Wireless MIC	1	
52	Microphone Cable	1	
53	Video Conference	1	
54	Facsimile	1	
55	Kursi Dorong	1	
56	Monografi	2	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Teknologi informasi merupakan sarana yang diperlukan untuk meningkatkan sarana transparansi dan akuntabilitas pengadilan serta mengacu kepada perkembangan teknologi baik dari segi perangkat keras maupun

perangkat lunak. Dengan teknologi informasi maka akses publik untuk mendapat informasi pengadilan akan menjadi lebih mudah.

Untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengelolaan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung telah memantapkan bahwa seluruh Pengadilan harus beralih dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis teknologi Informasi.

Peningkatan administrasi transparansi dan akuntabilitas di seluruh Pengadilan membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir. Hal ini dikarenakan data yang di masukan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung secara efektif dan efisien mengelola Sumber Daya Manusia dan anggarannya, mengawasi kinerja Hakim dan staf pengadilan memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan manajemen alur perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan tunggakan perkara, memberikan informasi yang di butuhkan oleh para pencari keadilan, publik dan media dan mendukung transisi menuju e-learning melalui teknologi informasi.

C.1. IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

- PERMA NO 1 TAHUN 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- SK KMA No 129 KMA/SK/VII/2019 Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- 271/KMA/SK/XII/2019 Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing) Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.
2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa

4. Persidangan Elektronik (e- Litigation)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

I. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam pelaksanaan e- Court melakukan verifikasi terhadap Pengguna Terdaftar (Advokat). Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah, maka advokat tersebut baru dapat beracara melalui e-Court.

Tabel 4.10
Verifikasi Advokat pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2022

Daftar Advokat terdaftar	123 orang
Sudah diverifikasi	78 orang
Belum diverifikasi	45 Orang

II. Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada bulan November Tahun 2018 sudah dilaksanakannya Administrasi Pengadilan secara elektronik di alamat website E-Court tersebut. Adapun data perkara yang sudah masuk melalui aplikasi E-Court selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Perkara yang didaftarkan melalui E-Court pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	PUTUS	PROSES PERSIDANGAN	JUMLAH
1	Perdata Gugatan	60	11	71
2	Perdata Permohonan	117	6	123
3	Perdata Gugatan Sederhana	17	2	19

Untuk E-Litigasi selama Tahun 2022 sudah ada 10 (Sepuluh) perkara yang menerapkan E-Litigasi dan masih 2 perkara masih dalam proses persidangan.

III. Pengadilan Negeri Sungailiat

Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Sungailiat sudah tersedia pojok e-Court dan petugas pelayanan serta admin e-Court.



Gambar 4.1. e-Court PN Sungailiat

IV. Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungpandan sudah tersedia pojok e-Court dan petugas pelayanan serta admin e-Court.



Gambar 4.2. e-Court Pengadilan Negeri Tanjungpandan

V. Pengadilan Negeri Koba

Modernisasi manajemen peradilan diarahkan pada pembenahan manajemen peradilan untuk keperluan internal dengan menyempurnakan Buku II dan Buku III Pengadilan sehingga berorientasi pada pelayanan dan memanfaatkan teknologi informasi. Hasil akhir yang diharapkan dari proses tersebut ditujukan agar dapat menciptakan efisiensi proses, misalnya, mengurangi beban proses minutas, berita acara persidangan, supervisi, serta peluang untuk menyatukan proses yang tersebar pada lebih dari satu orang ke satu orang dan lain sebagainya.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Koba telah meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung persidangan secara elektronik dikarenakan pandemi Covid 19. Persidangan secara elektronik ini sudah dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi serta implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Koba telah tersedia perangkat keras yang terdiri dari :

**TABEL 4.12 .
Perangka Keras Pendukung SIPP**

No.	Harware / Software	Jumlah/Uraian	Keterangan / Kondisi
1.	Server	2 Unit	Baik
2.	Mikrotik Router	2 Unit	Baik
3.	Laptop	15 Unit	Baik
4.	Hub/ switch	3 Unit	Baik
5.	Wifi Modem Router	8 Unit	Baik
7.	Koneksi Internet	<ul style="list-style-type: none"> • Telkom Indihome kecepatan Up to 50 Mbps • Icon+ kecepatan 100 Mbps dedicated 	Baik
8.	Komputer PC	21 Unit	Baik
9.	Web hosting	Kapasitas unlimited	Baik
10.	Access Point	8 Titik	Baik

1. Implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Umum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka mengenai administrasi Perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara elektronik dengan mengakses alamat <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Pendaftaran perkara melalui e-court saat ini sudah dilakukan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya yaitu terdiri dari Perorangan dan Badan Hukum.

Terdapat 4 Layanan yang dapat diberikan kepada pengguna :

- a. E-Filling (Pendaftaran perkara online)
 - b. E-Payment (Pembayaran panjar biaya perkara online)
 - c. E-Summons (Pemanggilan pihak secara online)
 - d. E-Litigasi (Persidangan secara online)
- Pengadilan Negeri Koba pada Tahun 2022 sudah melaksanakan Administrasi Pengadilan secara elektronik di alamat website E-Court tersebut. Tercatat sudah 55 perkara yang telah terdaftar dalam aplikasi E-Court selama tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 31 Pendaftaran Perkara Gugatan Online
 - b. 16 Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana Online
 - c. 8 Pendaftaran Perkara Permohonan Online
 - Dari 55 perkara, telah dilaksanakan Persidangan secara elektronik/online (e-Litigasi) sebanyak 4 perkara. Dan 51 perkara belum dilaksanakan e-Litigasi dikarenakan salah satu pihak (tergugat) tidak menyetujui persidangan secara elektronik/online (e-Litigasi).
 - Dari 31 Perkara Gugatan Online, terdapat 2 perkara yang melakukan upaya hukum banding secara elektronik.

2. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data serta layanan informasi. Pada saat ini Pengadilan Negeri Koba telah menggunakan SIPP yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang telah mencapai versi 5.1.0. Adapun sistem tersebut ditunjang oleh server yang memadai di ruang server Pengadilan Negeri Koba dan ditangani oleh 1 (satu) administrator yang siap menanggapi permasalahan yang timbul.

Adapun rincian spesifikasi server yang digunakan untuk menunjang implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Koba dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.13
Rincian Spesifikasi Server Penunjang SIPP Pada Pengadilan Negeri Koba

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Spesifikasi
1	Server Dell	1	<ul style="list-style-type: none"> • RAM : 16 GB • CPU : Intel® Xeon (R) CPU E3-1220 v6 @ 3,00GHz • HDD : 2 TB
2	Server Fujitsu	1	<ul style="list-style-type: none"> • RAM : 32 GB • CPU : Intel® Xeon (R) E-2134 CPU @3.50GHz x 8 • HDD : 2 TB

Dengan dikembangkannya aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP), para user SIPP di Pengadilan Negeri Koba terbantu untuk pembenahan data pada SIPP. Aplikasi MIS ini hanya merupakan alat bantu untuk memantau kelengkapan data SIPP, juga sebagai bahan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan terkait percepatan proses penyelesaian perkara kedepan dengan tetap berpijak pada kaidah-kaidah hukum dan keadilan serta perbaikan pencatatan administrasi perkara melalui SIPP.

VI. Pengadilan Negeri Mentok

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pengembangan sistem informasi merupakan salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya informasi peradilan dan peningkatan pelayanan peradilan.

1. Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II

Aplikasi *e-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran biaya panjar perkara secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan para pihak secara *online*. Aplikasi *e-Court* mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsi menerima pendaftaran perkara secara *online* sehingga akan menghemat waktu dan biaya bagi para pihak saat melakukan pendaftaran perkara. Dasar hukum lahirnya aplikasi *e-Court* ini adalah terbitnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya diikuti dengan terbitnya Keputusan Dirjen Badilum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-Court*, di samping dapat mengubah paradigma aparatur peradilan khususnya di bidang administrasi perkara, juga yang paling penting adalah dapat mengubah citra (*image*) pengadilan yang dulu masih bersifat manual, saat ini telah beralih ke era modernisasi melalui pemanfaatan TI.

Pendaftaran perkara perdata (pengajuan gugatan) dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat *mobile* yang terkoneksi dengan jaringan internet (*smartphone, tablet phone, laptop, notebook, netbook*) tanpa harus datang ke pengadilan.

Pengadilan Negeri Mentok telah melaksanakan penggunaan Aplikasi e-Court yang rekapitulasi penerimaan dan penanganan perkaranya sebagai berikut:

Tabel 4.14
Rekapitulasi Penerimaan dan Penanganan Perkara e-Court
pada Pengadilan Negeri Mentok Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Masuk	Cabut	Diputus		Sisa/ Masih Dalam Proses
				Secara Elektronik	Secara Biasa	
1	Gugatan	9	1	8	-	-
2	Permohonan	29	2	27	-	-
3	Gugatan Sederhana	4	1	3	-	-
4	Konsinyasi	2	-	-	2	-
JUMLAH		44	4	38	2	-

Menindaklanjuti Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri Mentok siap untuk melaksanakan e-litigasi di Pengadilan Negeri Mentok.

C.2. IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Dukungan Teknologi Informasi di Pengadilan melalui sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data dan Informasi perkara harus disimpan di aplikasi SIPP. Pelaporan perkara baik kepada Pengadilan Tinggi maupun kepada Badan Peradilan Umum dilakukan oleh kepaniteraan Hukum dengan menggunakan aplikasi SIPP. Panitera Pengadilan Tinggi/Negeri bertanggung jawab atas manajemen alur perkara, sedangkan tanggung jawab untuk mengelola perangkat keras, perangkat lunak, fa si litas dan infrastruktur teknologi informasi adalah administrator Teknologi Informasi. One Day publish merupakan usaha peningkatan kualitas informasi perkara, dimana publikasi salinan putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus.

1. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

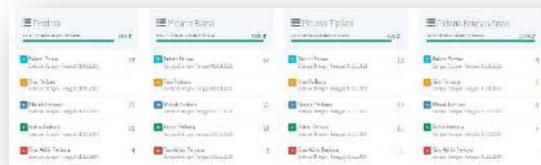
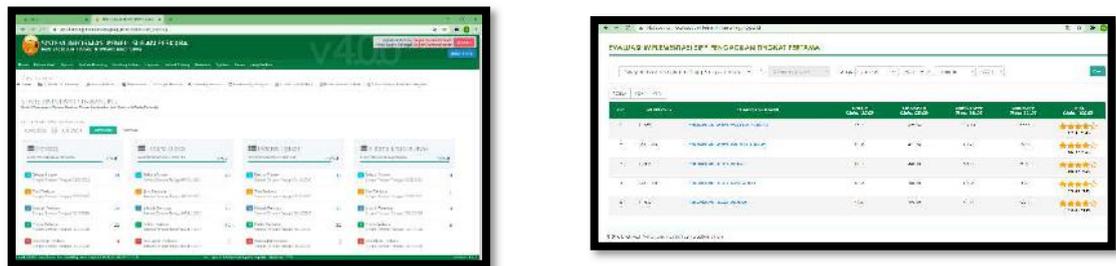
Dalam perkembangannya SIPP dimulai dengan versi 1 dimana hanya beberapa Pengadilan Negeri yang digunakan sebagai percontohan. Kemudian pada versi 2 SIPP diluncurkan dengan pembaharuan diantaranya jurnal keuangan perkara perdata, auto generate Template penetapan hakim, Berita Acara Persidangan dan pembaharuan fasilitas dan fungsi yang lainnya. Kemudian pada versi 3 dimana Pengadilan Tinggi turut berperan serta dalam pencatatan perkara dengan diluncurkannya SIPP-PT. Pada versi 3 ini juga mencakup perbaikan-perbaikan pada versi SIPP untuk Pengadilan Negeri. Versi berikutnya dari SIPP adalah versi 3.1.1 dimana aplikasi SIPP untuk Pengadilan Negeri dibangun ulang menjadi SIPP untuk Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat mencakup 4 (empat) lingkungan peradilan. Versi selanjutnya 3.1.1 dari SIPP adalah versi 3.1.2 dimana aplikasi SIPP-PT dibangun ulang sehingga menjadi SIPP untuk Pengadilan Tingkat Banding yang

juga dapat mencakup 4 (empat) lingkungan peradilan serta Pengadilan Tingkat Pertama dapat terhubung baik dengan SIPP untuk Pengadilan Tingkat Banding. Versi paling akhir dari SIPP adalah versi 3.2.0 dimana aplikasi SIPP-PT dibangun ulang sehingga menjadi SIPP untuk Pengadilan Tingkat Banding yang memiliki perbaikan major dari versi sebelumnya dimana sudah dapat dilakukan integrasi SIPP Banding dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung, untuk putusan akhir yang diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Bahwa aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan peradilan. Dengan adanya pandemi covid-19 diawal tahun 2020 persidangan dilakukan secara elektronik melalui e-litigasi dan sistem daring.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam persidangan secara elektronik ini, Putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik, pengucapan tersebut secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

Versi terbaru Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 4.0.0 telah menerapkan pelaksanaan e-Court untuk tingkat banding dan banyak sistem monitoring perkara untuk tingkat banding yang diperbaharui guna kelancaran pelaksanaan tugas peradilan yaitu Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SIPAPU).



Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan



Gambar 4.3. SIPP Versi 4.0.0 Pengadilan Tingi Bangka Belitung

Tabel IV.15
 Register Surat Masuk dan Surat Keluar PT. Bangka Belitung

JENIS REGISTER	SURAT MASUK	SURAT KELUAR	
Tahun 2022	Januari	171 Surat	232 Surat
	Februari	230 Surat	202 Surat
	Maret	234 Surat	168 Surat
	April	194 Surat	122 Surat
	Mei	160 Surat	105 Surat
	Juni	155 Surat	107 Surat
	Juli	191 Surat	132 Surat
	Agustus	172 Surat	108 Surat
	September	185 Surat	127 Surat
	Oktober	188 Surat	139 Surat
	November	226 Surat	136 Surat
	Desember	205 Surat	131 Surat

2. Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data serta layanan informasi. Pada saat ini Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menggunakan SIPP yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Adapun sistem tersebut ditunjang oleh server yang memadai di ruang server Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan ditangani oleh 2 (dua) administrator yang siap menanggapi permasalahan yang timbul.

Saat ini Pengadilan Negeri Pangkalpinang menggunakan Aplikasi SIPP versi 5.1.0 Berikut tampilan gambar untuk Aplikasi SIPP :



Gambar 4.4 . : Tampilan Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Pangkalpinang



Gambar 4.5 : Tampilan Evaluasi Implementasi SIPP Tahun 2022

Masyarakat dapat mengakses perkembangan proses perkara mereka di pengadilan di setiap tingkatan secara online. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi penyelesaian perkara sudah dijalankan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sejak beberapa tahun lalu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara mereka.

Di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, para pencari keadilan dapat mengakses informasi perkara melalui portal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di situs <http://sipp.pn-pangkalpinang.go.id>.

3. Pengadilan Negeri Sungailiat

Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Sungailiat telah mencapai :

1. Rasio sebanyak 91,92 %
2. Sisa perkara tahun 2021 : 30 perkara
3. Perkara Masuk tahun 2022 : 552 perkara
4. Minutasi perkara tahun 2022 : 535 perkara
5. Sisa perkara tahun 2022 : 47 perkara

4. Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah mencapai :

1. Rasio sebanyak 95,99 %
2. Sisa perkara tahun 2021 : 20 perkara
3. Perkara Masuk tahun 2022 : 304 perkara
4. Minutasi perkara tahun 2022 : 311 perkara
5. Sisa perkara tahun 2022 : 13 perkara

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Tanjungpandan secara nasional sebagai berikut :

ID	Jumlah Perkara	Kelas	Pengadilan	KNE-UG	KEMURTA	BELANJAWAN	KES-SIPAM	TITL
1	1-429	E	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	409.41	608.30	127.09	162.41	90.15
2	181-108	B	Pengadilan Negeri Sungai Liat	119.61	152.30	122.00	102.12	90.24
3	1-509	E	Pengadilan Negeri Rantau	128.00	142.30	111.09	101.11	90.24
4	181-108	A	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	110.00	130.10	118.00	110.11	92.10
5	1-509	E	Pengadilan Negeri Tanjung Pindah	103.00	109.10	111.04	107.12	91.04

ID	Jumlah Perkara	Kelas	Pengadilan	KNE-UG	KEMURTA	BELANJAWAN	KES-SIPAM	TITL
82	1-500	E	Pengadilan Negeri Tanahbata	142.70	141.40	132.01	127.42	91.60
83	1-500	E	Pengadilan Negeri Tarakan	141.30	140.29	133.97	126.00	91.64
84	1-500	E	Pengadilan Negeri Tanjung Pindah	141.00	137.13	131.94	127.42	91.10
85	1-500	E	Pengadilan Negeri Daga	141.00	131.22	131.91	124.77	90.50
86	1-500	E	Pengadilan Negeri Paseran	141.01	142.13	140.91	127.29	91.00
87	1-500	E	Pengadilan Negeri Bontas	144.44	137.17	132.01	127.28	90.80
88	1-500	E	Pengadilan Negeri Buntar	141.46	141.12	136.00	127.04	90.04
89	1-500	E	Pengadilan Negeri Bangko	141.00	142.29	141.00	127.02	90.11

Gambar 4.6. Gambar Evaluasi SIPP PN Tanjungpandan

5. Pengadilan Negeri Koba

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data serta layanan informasi. Pada saat ini Pengadilan Negeri Koba telah menggunakan SIPP yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang telah mencapai versi 5.1.0. Adapun sistem tersebut ditunjang oleh server yang memadai di ruang server Pengadilan Negeri Koba dan ditangani oleh 1 (satu) administrator yang siap menanggapi permasalahan yang timbul.

Adapun rincian spesifikasi server yang digunakan untuk menunjang implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Koba dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.16
RINCIAN SPESIFIKASI SERVER PENUNJANG SIPP PADA PENGADILAN NEGERI KOBA

No	Sarana/ Prasarana	Jumlah	Spesifikasi
1	Server Dell	• 1	<ul style="list-style-type: none"> • RAM : 16 GB • CPU : Intel® Xeon (R) CPU E3-1220 v6 @ 3.00GHz • HDD : 2 TB
2	Server Fujitsu	• 1	<ul style="list-style-type: none"> • RAM : 32 GB • CPU : Intel® Xeon (R) E-2134 CPU @3.50GHz x 8 • HDD : 2 TB

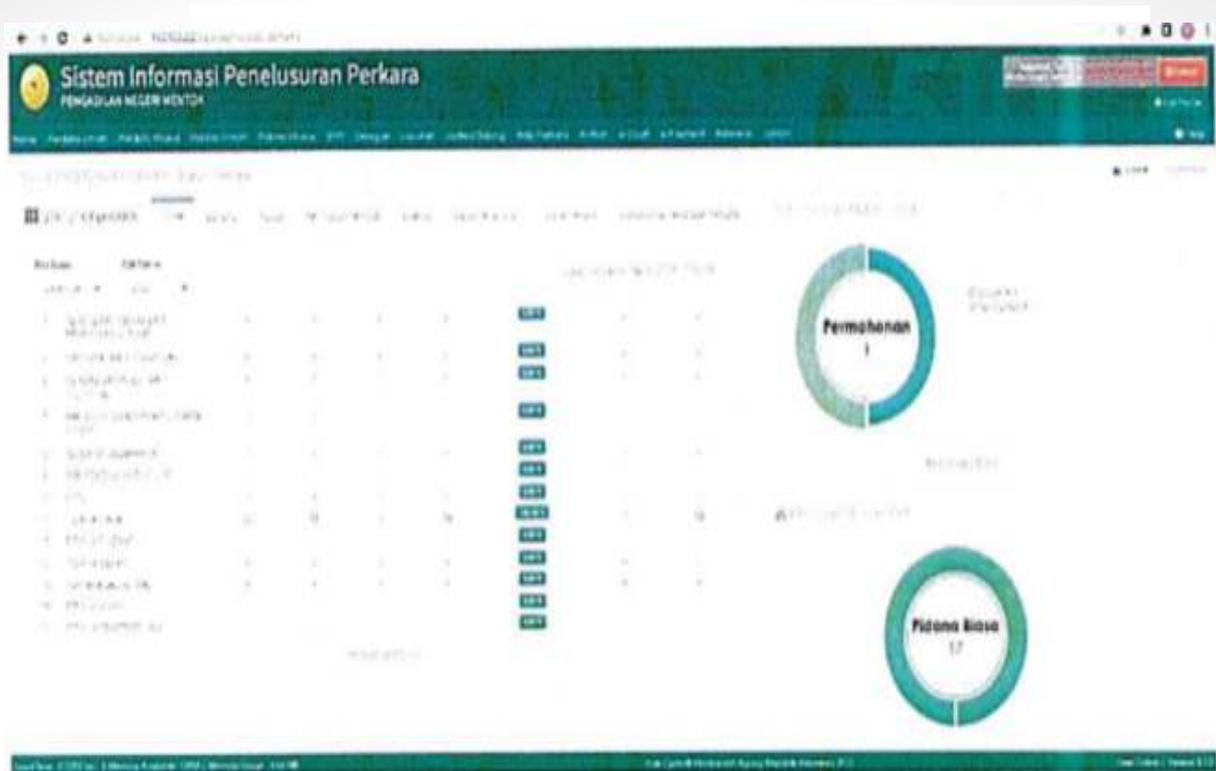
Dengan dikembangkannya aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP), pusa user SIPP di Pengadilan Negeri Koba terbantu untuk pembenahan data pada SIPP. Aplikasi MIS ini hanya merupakan alat bantu untuk memantau kelengkapan data SIPP, juga sebagai bahan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan terkait percepatan proses penyelesaian perkara kedepan dengan tetap berpijak pada kaidah-kadah hukum dan keadilan serta perbaikan pencatatan administrasi perkara melalui SIPP.

6. Pengadilan Negeri Mentok

Untuk memudahkan pencari keadilan dalam mengakses informasi perkara yang sedang dan telah ditangani, Pengadilan Negeri Mentok Kelas II telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai sarana kontrol bagi proses penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri Mentok Kelas II juga menggunakan aplikasi MIS atau Monitoring Implementasi SIPP untuk memastikan akurasi data yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan dan untuk memonitoring implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II.

SIPP juga telah berintegrasi dengan *e-Court* memberikan banyak kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya Advokat. Advokat yang melakukan proses pendaftaran perkara Gugatan melalui *e-Court* sampai mendapatkan nomor perkara akan menghemat banyak waktu dan biaya karena tidak harus datang ke pengadilan.

Adapun Pengadilan Negeri Mentok Kelas II menggunakan SIPP versi 5.1.0 yang merupakan update SIPP terakhir.



Gambar 4.7 Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.1.0 pada Pengadilan Negeri Mentok 2022

Untuk mendukung pelaksanaan pengisian data di Aplikasi SIPP, Pengadilan Negeri Mentok saat ini telah menggunakan Server dan Rak Server yang dikirimkan dari Mahkamah Agung dan ditangani oleh 2 (dua) administrator yang siap menangani permasalahan yang timbul. Pengadilan Negeri Mentok juga sudah menggunakan bandwidth Internet Dedicated sesuai dengan standar dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu sebesar 50 Mbps.

BAB V PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

BAB V

PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Program Akreditasi Penjaminan Mutu ini merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan untuk mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI memberi apresiasi yang tinggi atas upaya untuk memperoleh pengakuan lembaga penilai independen melalui audit penjaminan mutu sesuai standar internasional dengan menggunakan anggaran swadaya. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2015.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001: 2008, diperkaya dengan *penerapan International Framework for Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), standar pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana badan akreditasi lainnya dalam memberikan standar penilaian kepada Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tinggi.

Tujuan akreditasi penjaminan mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/ kinerja peradilan Indonesia yang unggul/ prima (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*).

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum telah menerima hasil akreditasi sebagai berikut :

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



Tabel 5.1
Nilai Akreditasi Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Hukumnya

NO	NAMA SATUAN KERJA	NOMOR SERTIFIKAT / PETIKAN SK	NILAI AKREDITASI
1	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	TAPM.014/QMR/SERTIFIKAT/3/2021 BERLAKU MULAI 31 MARET 2021 S.D 31 MARET 2022	A (EXCELLENT)
PENGADILAN NEGERI			
1	PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG	TAPM.048/QMR/SERTIFIKAT/3/2021 BERLAKU MULAI 31 MARET 2021 S.D 31 MARET 2022	A (EXCELLENT)
2	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	TAPM.093/QMR/SERTIFIKAT/3/2021 TANGGAL 31 MARET 2021 S.D 31 MARET 2022	A (EXCELLENT)
3	PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN	TAPM.211/QMR/SERTIFIKAT/3/2021 TANGGAL 31 MARET 2021 S.D 31 MARET 2022	A (EXCELLENT)
4	PENGADILAN NEGERI KOBAS	TAPM.212/QMR/SERTIFIKAT/3/2021 TANGGAL 31 MARET 2021 S.D 31 MARET 2022	A (EXCELLENT)
5	PENGADILAN NEGERI MENTOK	TAPM.213/QMR/SERTIFIKAT/3/2021 TANGAL 31 MARET 2021 S.D 31 MARET 2022	A (EXCELLENT)

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PTSP merupakan singkatan dari (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang pengertiannya adalah suatu kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good Governance/kepemerintahan yang baik.

Mahkamah Agung RI dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "PTSP"). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung RI ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sebagai salah satu direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengemukakan surat Keputusan dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu

pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

1. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah berjalan sebagaimana mestinya yang didukung dengan perangkat computer untuk bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan. Setiap pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melapor ke PTSP dalam hal keperluan yang diinginkan. Ruangan PTSP dilengkapi dengan pojok informasi yang berguna sebagai informasi yang ada di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung seperti SIPP, SIWAS, Website Pengadilan Negeri Se-Wilayah Bangka Belitung. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W7-U/1671/KPT/SK/PS.01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Selain itu pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga terdapat Hakim Tinggi Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor : W7.U/0392 /KPT/SK/PS.04/2/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pembentukan Koordinator Pelaksanaan dan Pengawasan PTSP, E-Court dan SIWAS MARI Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implemmentasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.



Gambar 5.1. Meja Pelayann Terpadu Satu Pintu PTSP PT. Babel

Tabel 5.2.
Register Surat Masuk dan Surat Keluar
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Tahun 2022

Jenis Register		Surat Masuk	Surat Keluar
Tahun 2022	Januari	234 Surat	188 Surat
	Februari	221 Surat	147 Surat
	Maret	262 Surat	235 Surat
	April	239 Surat	116 Surat
	Mei	175 Surat	120 Surat
	Juni	324 Surat	170 Surat
	Juli	347 Surat	281 Surat
	Agustus	319 Surat	251 Surat
	September	279 Surat	209 Surat
	Oktober	304 Surat	191 Surat
	November	280 Surat	48 Surat
	Desember	305 Surat	212 Surat
TOTAL		3.289 Surat	2.168 Surat

2. Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Sebelum Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTS) dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor: W7.U1/002/KP04.05/1/2017 tanggal 03 Januari 2017. Banyak perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang baik dalam sarana dan prasarana untuk mencapai pelayanan yang terbaik. Perubahan terakhir yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor W7.U1/2488/KP.04.5/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Selain itu pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang juga terdapat Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor : W7.U1/2677/KP.04.5/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implemmentasi Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengadilan Negeri Pangkal Pinang menggunakan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) versi 2.2-2 yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum. Berikut adalah laporan evaluasi pengisian pada register Aplikasi PTSP :

Tabel 5.3.
Laporan Evaluasi Register Aplikasi PTSP
Pengadilan Negeri Pangkalpinang Tahun 2022

Jenis Register	Surat Masuk	Surat Keluar	Surat Keterangan	Buku Tamu	Penyitaan	Penggeledahan	
Tahun 2022	Januari	276	488	8	272	36	13
	Februari	218	409	1	234	47	20
	Maret	215	355	-	264	30	8
	April	240	438	1	187	37	19
	Mei	191	298	-	135	34	16
	Juni	323	333	31	229	42	24
	Juli	323	513	3	207	50	24
	Agustus	356	401	3	227	40	22
	September	294	355	-	221	36	6
	Oktober	305	345	-	176	42	16
	November	270	552	6	212	40	15
	Desember	301	496	9	167	32	7

3. Pengadilan Negeri Sungailiat

Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menciptakan suasana kondisi yang bebas dan bersih dari perbuatan serta budaya koruptif bukan sekedar slogan belaka, tetapi tindakan nyata dan konkrit. Pelan tetapi pasti akan tercipta suasana yang bersih dari perbuatan mungkar dan menciptakan mindset sebagai pelayan dan pengadil yang haq dan benar. Dalam berbagai kesempatan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan semua pimpinan tidak henti hentinya selalu membangun mindset kepada seluruh aparaturnya Mahkamah Agung dalam menuju cita cita yaitu mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Membangun konstruksi bangunan badan peradilan yang agung, tentunya harus dilandasi oleh struktur fondasi yang sangat kuat dan menghujam sangat dalam di bumi hati sanubari aparaturnya Mahkamah Agung dan masyarakat.

Dalam menuntun ke jalan yang benar dan menghindari berbagai kesesatan, Mahkamah Agung telah membuat dan memasang rambu rambu yang ditempatkan disemua tempat agar dapat dibaca dan dipatuhi, antara lain berbagai berbagai paket kebijakan berupa regulasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan aturan lainnya. Paket kebijakan dan yang terkini adalah tentang AKREDITASI, PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU. Kebijakan tersebut merupakan petunjuk dan bentuk perhatian serta tanggung jawab Mahkamah Agung kepada negara dan masyarakat dalam menciptakan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Dan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor SK No. 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Sungailiat dengan segenap jajarannya berusaha untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis *one day service* sesuai dengan standar pelayanan dan pelayanan prima yang berbasis elektronik.



Gambar 5.2. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Sungailiat

Pengadilan Negeri Sungailiat memberikan layanan-layanan yang menunjang pemberian informasi persidangan kepada para *Stakeholder* Pengadilan Negeri Sungailiat.



5.3. Gambar Meja Pendaftaran Sidang

4. Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan segenap jajarannya berusaha untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis *one day service* sesuai dengan standar pelayanan dan pelayanan prima yang berbasis elektronik.



5.4. Gambar Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN TanjungPandan

5. Pengadilan Negeri Koba

Layanan satu pintu Pengadilan Negeri Koba menempatkan wakil dari masing-masing kepaniteraan perdata, pidana, hukum dan bagian umum untuk melayani pengunjung pengadilan. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya Pelayanan Terpadu.

Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten untuk ditempatkan disatu titik pelayanan sebagai tempat masuk dan keluarnya layanan peradilan. Sehingga masyarakat hanya berhenti di satu pintu layanan saja.



Gambar 5.5. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Koba

Layanan satu pintu Pengadilan Negeri Koba menempatkan wakil dari masing-masing kepaniteraan perdata, pidana, hukum dan bagian umum untuk melayani pengunjung pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Koba, maka terkait standar pelayanan yang berlaku di Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP), Pengadilan Negeri Koba memberikan kompensasi apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan Pengadilan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sejak tahun 2020 Pengadilan Negeri Koba telah menerapkan sistem kompensasi ini.



Gambar 5.6. Gambar Kompensasi PTSP Pengadilan Negeri Koba

6. Pengadilan Negeri Mentok

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan atau pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

PTSP di pengadilan bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan serta menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya pengadilan. Dengan demikian, PTSP akan meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan serta kepuasan masyarakat.

menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang telah diubah oleh Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Mentok telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W7-U5/047/OT.01.3/1/2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Mentok sebagai pedoman untuk menerapkan PTSP di Pengadilan Negeri Mentok.

Layanan pokok PTSP di Pengadilan Negeri Mentok meliputi permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran biaya, penyerahan produk pengadilan, dan pengaduan. Sementara itu, layanan penunjang PTSP dilakukan oleh penyedia jasa eksternal antara lain posbakum, bank BRI, dan pihak lainnya yang telah mengadakan kerja sama secara resmi dengan Pengadilan Negeri Mentok.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi dalam suatu Instansi atau Pengadilan sangat diperlukan karena dengan adanya inovasi akan menjadikan Pengadilan tersebut lebih maju dari Pengadilan lain. Baik dalam hal pelayanan dan kreatifitas dari suatu Pengadilan tersebut.

Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

a. Jalur khusus untuk pengguna layanan prioritas (difable, pelayanan Verifikasi Calon Advokat, Verifikasi E-Court dan SIWAS)

Pelayanan ini diberikan untuk mempermudah para pengguna jasa layanan yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pelayanan. Disediakan juga kursi dan tempat khusus untuk pengguna layanan prioritas tersebut.

b. Toilet yang memfasilitasi Difabilitas serta Smooking Area khusus

Untuk pengguna jasa layanan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung toilet umum telah difasilitasi juga untuk pengguna layanan yang berkebutuhan khusus serta untuk pengguna layanan juga disediakan area khusus merokok atau Smooking Area yang representatif dan baik.

c. Literasi (Portal Informasi terintegrasi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung)

Perkembangan sistem dan teknologi informasi sekarang ini sangatlah pesat. Instansi-instansi yang ada saat ini harus memiliki keunggulan kompetitif dengan berfokus pada kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini banyak instansi yang mulai memanfaatkan sistem dan teknologi informasi sebagai komponen utama dalam mencapai keunggulan dalam bersaing. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan cepat, efisien serta akurat.

Ada suatu cara untuk membuat sistem yang digunakan untuk instansi agar dapat berkomunikasi atau berbagi informasi atau data secara mulus satu sama lain, yaitu dengan mengintegrasikan sistem tersebut atau dikenal dengan *System Integration*.

Dari segi bahasa, sistem adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa komponen yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Sedangkan integrasi adalah beberapa kondisi atau tindakan yang memiliki kesamaan sehingga dapat membentuk sebuah satu kesatuan utuh.

Selanjutnya, dari segi istilah integrasi sistem dalam dunia IT adalah sekumpulan sistem informasi yang membentuk satu kesatuan utuh untuk mencapai tujuan tertentu dengan lebih komprehensif. Jadi,

sistem integrasi dapat mengumpulkan beberapa sistem informasi yang berbeda untuk digabungkan maupun disinkronisasikan untuk membentuk sebuah kesatuan.

Dari hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membangun sebuah inovasi untuk mengintegrasikan sistem informasi pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Inovasi tersebut diberi nama **LITERASI**, yang merupakan akronim dari Portal Informasi Terintegrasi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.



Gambar 5.7. Gambar Aplikasi Literal Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

d. Sistem Informasi Pelayanan Langsung (SILAYANG)

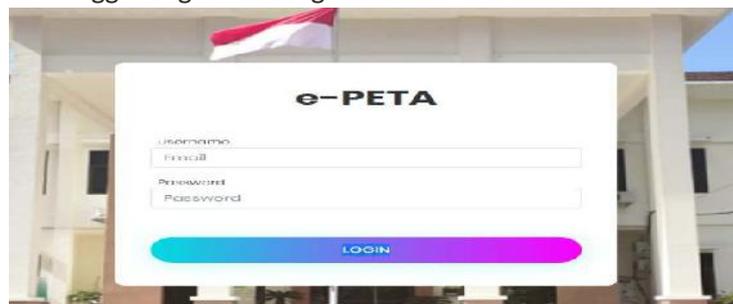
Sistem Informasi Pelayanan Langsung merupakan suatu sistem informasi untuk mendapatkan suatu informasi layanan yang ada di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui Whatsapp yang akan ditangani secara langsung oleh petugas Pelayanan yang ada di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.



Gambar 5.8. Aplikasi Silayang Pengadilan Tingi Bangka Belitung

e. E-Peta (E- Perpanjangan Tahanan).

E-Peta merupakan aplikasi Perpanjangan Penahanan. Aplikasi ini adalah aplikasi yang akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan perpanjangan penahanan satuan kerja Se-Wilayah Bangka Belitung ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

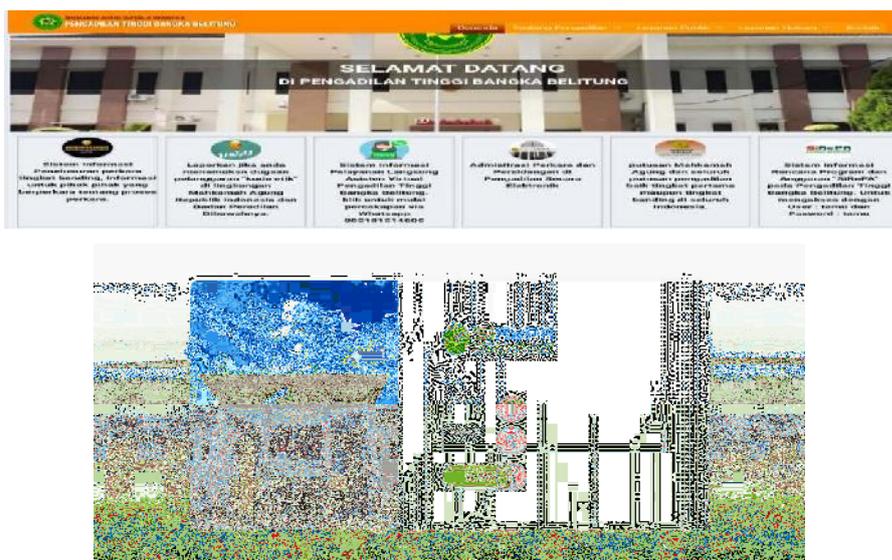


Gambar 5.9. Aplikasi E-Peta Tingi Bangka Belitung

f. **SiRePA (Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran).**

Si-RePA merupakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran Berbasis Web yang ada di Bagian Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, Aplikasi ini untuk mendokumentasikan secara digitalisasi administrasi Perencanaan DIPA Usulan, DIPA Pagu Indikatif, DIPA Pagu Definitif, dan semua dokumen yang bersangkutan dengan Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran.

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Program dan Anggaran dapat diakses melalui Website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan alamat pt-babel.go.id dan lalu memilih Aplikasi SiRepa.



Gambar 5.10. Aplikasi SIREPA Tingi Bangka Belitung

g. **E-SILKA (Sistem Informasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual)**

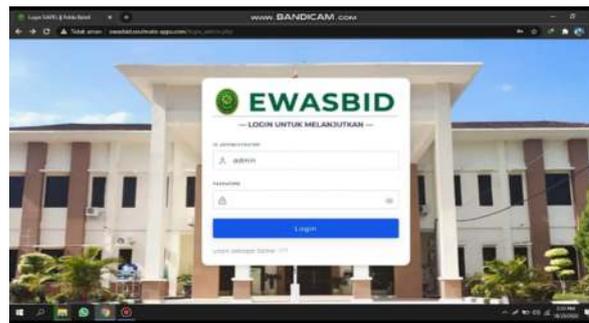
E-SILKA atau Sistem Informasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menampung data dukung laporan keuangan dari satuan kerja di wilayah Bangka Belitung. Satuan kerja di bawah koordinator wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebanyak 12 (dua belas) satuan kerja. Setiap satuan kerja mengirimkan semua data dukung melalui aplikasi E-SILKA. Semua data dukung dapat di upload kapan dan dimana saja karena bisa diakses melalui jaringan internet. Dengan aplikasi E-SILKA akan memudahkan operator wilayah dalam merekapitulasi data dukung dari satuan kerja. Dengan aplikasi E-SILKA data dukung sudah langsung terintegrasi ke Bagian Akuntansi Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Aplikasi E-SILKA juga menjadi bank data untuk menyimpan semua data laporan keuangan dari semua satuan kerja sehingga memudahkan pada saat pencarian data laporan keuangan baik dari pihak internal maupun eksternal (BPK RI).



Gambar 5.11. Aplikasi E-SILKA Tinggi Bangka Belitung

h. E-Wasbid

E-wasbid merupakan Aplikasi Pengawas di lingkungan wilayah hukum pengadilan tinggi Bangka Belitung yang meliputi Pengawasan Bidang dan Pengawasan Daerah secara elektronik berbasis web.



Gambar 5.12. Aplikasi E-Wasbid Tinggi Bangka Belitung

i. E-Babel Oke Bangka Belitung Online.

Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian secara digitalisasi agar informasi tentang pegawai dan dokumen kepegawaian tersedia secara transparan dan cepat.



Gambar 5.13. Aplikasi E-Babel Oke Tinggi Bangka Belitung

j. MoU Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Dengan SLB YPAC Pangkalpinang dalam hal Penyediaan Layanan Disabilitas.



Gambar 5.14. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Disabilitas Tinggi Bangka Belitung

k. Pelatihan Layanan Disabilitas Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mendukung lembaga peradilan yang transparan dan bersih, dan terbuka bagi siapapun pencari keadilan. Sebagai Petugas yang telah ditunjuk oleh pimpinan dan dianggap mampu tentunya dibekali dengan prosedur dan sarana pelayanan yang mumpuni melalui pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi rutin untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan.

Pelatihan layanan disabilitas bagi Petugas PTSP terutama untuk disabilitas Jenis Tuna Rungu menjadi salah satu upaya peningkatan pelayanan di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Acara yang dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan dihadiri oleh Stakeholder Terkait Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Dinas Sosial dan PMD Provinsi Sumatera Selatan dan Sekolah SLB YPAC Pangkalpinang berlangsung pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung diikuti juga oleh aparaturnya. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pelatihan dibekali dengan pemahaman Bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus pada pendengaran.

Dengan Pelatihan ini, mampu mewujudkan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai lembaga peradilan yang inklusif, selain dengan layanan infrastruktur sarana maupun prasarana yang telah disediakan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.



Gambar 5.15. Pelatihan Layanan Disabilitas Bagi Petugas PTSP Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

l. Pelayanan Terhadap masyarakat Disabilitas Melalui Video Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang dilengkapi dengan Bahasa Isyarat.



Gambar 5.16. Video Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

- m. Pelayanan Terhadap masyarakat Disabilitas Melalui Video Prosedur Penyelesaian **Perkara Perdata** Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang dilengkapi dengan Bahasa Isyarat



Gambar 5.17. Video Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

- n. Si Timah Keren (Sistem Informasi Pelayanan yang Ramah bagi Kelompok Rentan)

Yaitu aplikasi yang diperuntukkan untuk kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas yang mana aplikasi ini menyediakan fasilitas penyampaian informasi layanan dengan pemanfaatan media informasi digital melalui website Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Aplikasi ini sudah didukung fitur aksesibilitas berupa audio dan teks yang memudahkan penyandang disabilitas mengakses aplikasi. Dalam aplikasi ini juga terdapat video informasi layanan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah dilengkapi teks dan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.



Gambar 5.18. Video Si Timah Keren Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

2. Pengadilan Negeri Pangkalpinang

1. PELIHARA

Pelihara (Penyerahan Petikan dan Salinan Putusan Pada Hari Pengucapan), merupakan inovasi pelayanan publik yang memiliki tujuan :

- a. Para pencari keadilan mendapatkan pelayanan maksimal.
- b. Perbaikan kinerja pelayanan publik Pengadilan Negeri Pangkalpinang
- c. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
- e. Lebih meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang



5.19. Brosur Inovasi Pelayanan Publik PELIHARA PN Pangkalpinang

2. LANTIK

Lantik (Layanan Center Publik) merupakan layanan pusat informasi dan pengaduan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A yang dapat diakses melalui Telepon Seluler dan Aplikasi WhatsApp.

Adapun manfaat dari inovasi Lantik ini adalah Memberikan kemudahan kepada Para pencari keadilan untuk mendapatkan Informasi dan menyampaikan Pengaduan kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang maupun menyampaikan kendala terkait persidangan elektronik (ecourt, elitigasi, tunda sidang) melalui sarana tercepat Telepon Seluler dan Aplikasi Chat WhatsApp sehingga tersampaikan secara langsung ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanpa berinteraksi dengan Aparatur Pengadilan (Juru Sita, PP & Hakim).



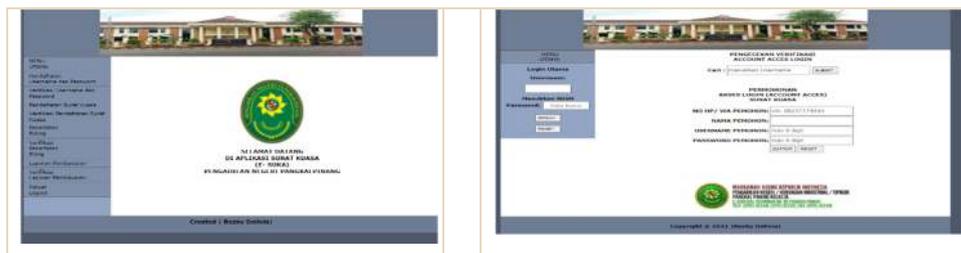
Gambar scan barcode untuk inovasi pelayanan publik Lantik



Gambar 2.20. Penggunaan Inovasi Lantik PN Pangkalpinang

3. E- SUKA

Inovasi E-Suka, Elektronik Surat Kuasa merupakan inovasi yang dikerjakan untuk melengkapi proses pendaftaran surat kuasa secara online pada Aplikasi E-Court. Melalui aplikasi ini, para pihak dapat mendaftarkan surat kuasa secara online. Sebelumnya pendaftaran surat kuasa dilakukan secara manual, penerima layanan datang ke kantor Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Inovasi E-Suka dapat mempermudah proses pendaftaran surat kuasa bagi para pihak, sehingga mereka hanya perlu datang ke Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada saat hari persidangan saja, dan langsung dapat mengambil surat kuasa yang telah diproses sebelumnya melalui pendaftaran secara online pada Aplikasi E-Suka.



5.21. Gambar Tampilan Aplikas E-SUKA

4. PETALING

Inovasi PETALING, PTSP Keliling adalah inovasi yang dibuat untuk mempermudah penerima layanan dalam memperoleh pelayanan dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dan mendekatkan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kepada penerima layanan. Melalui inovasi Petaling ini, Meja PTSP yang kami datangkan ke penerima layanan. Tentunya petugas yang bertugas telah diberikan pelatihan terlebih, dan untuk menghindari adanya resiko dari pertemuan petugas PTSP dengan pihak penerima layanan di luar kantor Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, para petugas telah menandatangani surat pernyataan terkait komitmen mereka untuk tidak menerima gratifikasi dan suap dalam bentuk apapun juga. Tujuan dari inovasi ini adalah mempermudah penerima layanan mendapatkan pelayanan, masyarakat lebih mudah mengetahui produk – produk layanan yang ada di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang.

Kemitraan PETALING :

- Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang
- Polres Kota Pangkalpinang
- Lapas Tua Tunu Kota Pangkalpinang
- Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang
- Universitas Bangka Belitung



5.23. Gambar Pelayanan PETALING PN Pangkalpinang

5. PENGALAMAN

Pengalaman (Pengadilan dalam genggaman) inovasi berupa aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone berbasis android dan ios, yang berisi daftar pelayanan pada pengadilan negeri pangkal pinang, jadwal sidang, informasi denda tilang dan informasi sisa biaya panjar perkara.



5.24. Gambar Tampilan Aplikasi Pengalaman

6. Fasilitas Internet Gratis

Pengadilan Negeri Pangkalpinang memberikan fasilitas internet yang dapat diakses secara gratis kepada para pengunjung sidang dan pengguna jasa layanan Pengadilan.

7. Kompensasi terhadap Pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP

Kompensasi ini diberikan kepada para pengguna jasa layanan yang mendapatkan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan yang terjadi karena kesalahan dari pihak Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Adapun kompensasinya berupa pemberian souvenir kepada para pengguna jasa layanan tersebut.

8. Jalur khusus tanpa antrian untuk pengguna layanan prioritas (difable, ibu menyusui, lansia dan ibu membawa anak kecil)

Pelayanan ini diberikan untuk mempermudah para pengguna jasa layanan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan antri dalam mendapatkan pelayanan. Disediakan juga kursi khusus untuk pengguna layanan prioritas tersebut.

9. Toilet khusus untuk pengguna jasa layanan meja PTSP

Untuk pengguna jasa layanan meja PTSP disediakan toilet khusus yang tersendiri, tidak digabung dengan toilet umum untuk pengunjung sidang dan para pihak.

3. Pengadilan Negeri Sungailiat

Untuk menunjang pelayanan publik yang mandiri dan berinovasi berbasis elektronik dan one day service. Pengadilan Negeri Sungailiat mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah :

- a. Aplikasi Sistem Nomor Antrian di Pengadilan Negeri Sungailiat (SiNONA)



Gambar 5.25. Aplikasi SiNONA

- b. Aplikasi Sistem Informasi Tanya Kami (SITAMI)



Gambar 5.26. Aplikasi SITAMI

- c. Aplikasi CMS BRI (Cash Management System)



Gambar 5.27. Aplikasi CMS BRI

- d. Portal Sistem Informasi melalui Linktree berbasis website



Gambar 5.28. Portal Sistem Informasi Linktree berbasis Website

- e. WA Centre Pojok E-Court



Gambar 5.29. WA Centre Pojok E-Court

- f. Mesin Antrian Persidangan



Gambar 5.30. Meja Antrian Persidangan

- g. Meja Pelayanan Perbaikan.



Gambar 5.31. Meja Pelayanan Perbaikan

h. BRI Point.



Gambar 5.32. BRI Point

i. Klinik Kesehatan



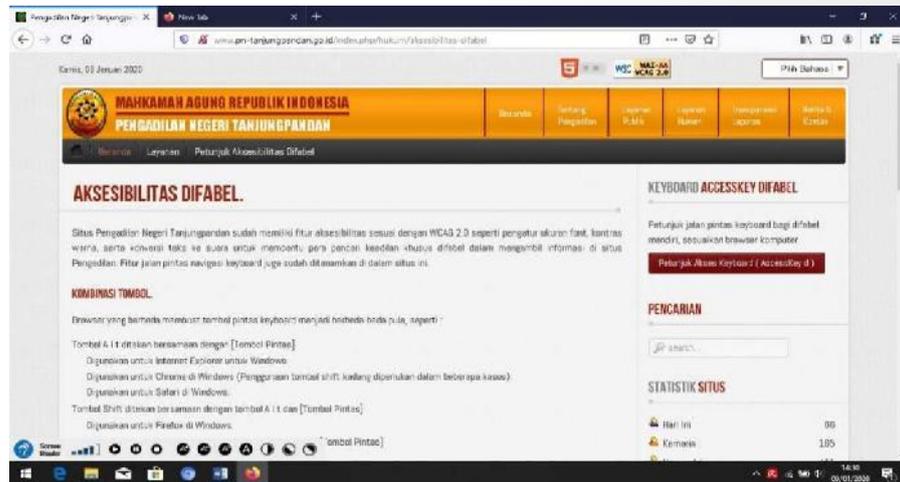
Gambar 5.33. Klinik Kesehatan

4. Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Untuk menunjang pelayanan publik yang mandiri dan berinovasi berbasis elektronik dan one day service. Pengadilan Negeri Sungailiat mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah :

a. Fasilitas Disabilitas pada Website Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan inovasi pada Aplikasi Website berupa fasilitas Disabilitas agar para pencari keadilan khusus difabel dapat memperoleh informasi tentang layanan Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Website Pengadilan Negeri Tanjungpandan sudah memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, serta konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di Website Pengadilan. Fitur jalan pintas navigasi keyboard juga sudah ditanamkan di dalam situs ini.

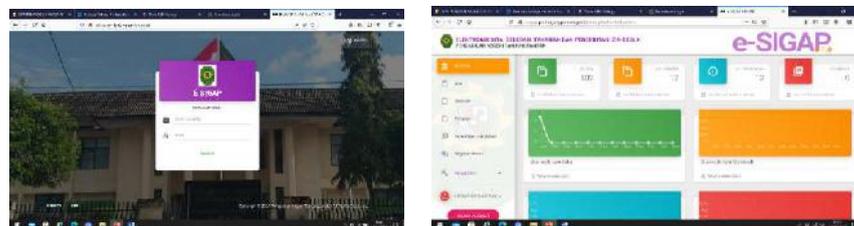


Gambar 5.34. Aksesibilitas Difabel Di Website PN Tanjungpandan

b. Fasilitas Ijin Penyitaan dan Ijin Pengegeledahan melalui ESIGAP

Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan layanan ESIGAP (Elektronik SITA, GELEDAH, TAHANAN dan PENERBITAN IZIN BESUK kepada pihak kepolisian, kejaksaan dalam mengajukan permohonan ijin penyitaan, persetujuan penyitaan, ijin pengegeledahan dan persetujuan pengegeledahan. Berkas asli diserahkan pada saat pengambilan Penetapan.

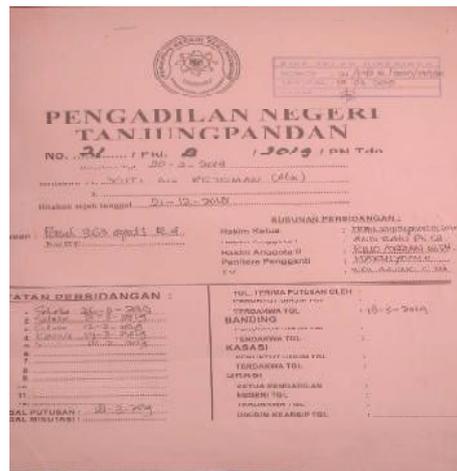
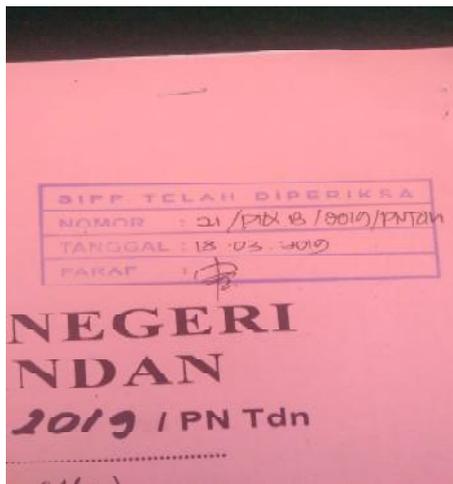
Hal ini dimaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan public guna memperoleh akses terhadap keadilan.



Gambar 5.35. Aplikasi E-Sigap PN Tanjungpandan

c. Pemeriksaan kelengkapan Pengisian SIPP terhadap Berkas Perkara yang akan di Minutasi ke bagian Pidana/Perdata

Pengadilan Negeri Tanjungpandan menerapkan proses pemeriksaan kelengkapan pengisian SIPP terhadap berkas perkara yang akan di Minutasi, hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan Berkas Perkara Fisik dengan pengisian pada Aplikasi SIPP. Berkas Perkara yang sudah mendapat Stempel Pemeriksaan berarti pengisian pada Aplikasi SIPP sudah sesuai.



Gambar 5.36. Aplikasi SIPP PN Tanjungpandan

d. Pengadilan Menyapa kerjasama dengan Radio PEMDA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan melakukan kegiatan ini dimaksud untuk lebih dekat dengan para Pencari Keadilan. Melalui Radio Pemda Kab. Belitung yang berkerjasama dengan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang layanan yang terdapat pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan masyarakat dapat bertanya tentang layanan melalui telepon atau SMS yang disediakan pihak Radio. Layanan ini berlangsung selama 1 Jam dan dilaksanakan satu bulan sekali.



Gambar 5.37. Pengadilan menyapa Radio PEMDA

e. Aplikasi PTSP Online

Aplikasi PTSP Online dibuat ketika salah satu pegawai Pengadilan Negeri Tanjungpandan yaitu Kasub Perencanaan, IT, & Pelaporan mengikuti Diklat PKP yang diselenggarakan Mahkamah Agung Secara Online pada bulan Agustus 2020. Mengingat kondisi saat ini di tengah Pandemi Covid – 19, maka Kasub PTIP PN Tanjungpandan yang di mentor oleh Sekretaris PN Tanjungpandan membuat PTSP Online yang terintegrasi dengan Website PN Tanjungpandan www.pn-tanjungpandan.go.id. Sehingga masyarakat dapat menerima Pelayanan Publik PTSP dimana saja pada jam kerja tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Layanan yang diberikan sama seperti datang ke PTSP Pengadilan, hanya saja dilakukan secara daring, online.



Gambar 5.38. PTSP Online PN Tanjungpandan

5. Pengadilan Negeri Koba

a. Publikasi Perkara (*One Day Publish*)

One Day Publish diartikan sebagai publikasi amar putusan suatu perkara yang telah diputus dalam jangka waktu 1x24 jam ke masyarakat/ pencari keadilan ke situs resmi. Satu perwujudan *one day publish* ini adalah adanya direktori putusan Mahkamah Agung RI yang dapat diakses disitus www.putusan.mahkamahagung.go.id. Situs ini adalah wadah bagi setiap putusan di Pengadilan di seluruh Indonesia untuk dapat diakses oleh masyarakat/pencari keadilan.

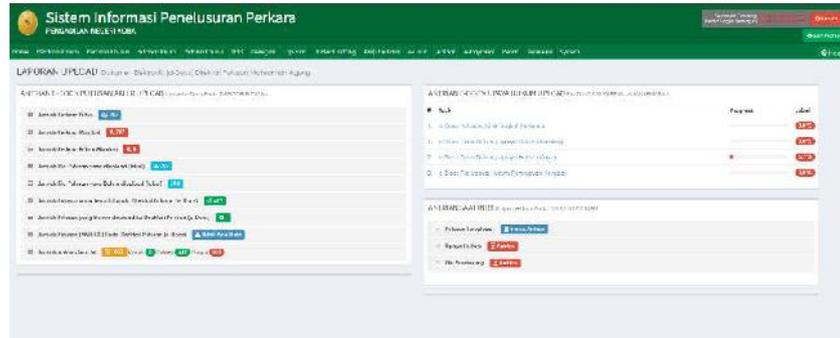
Terkait hal tersebut Pengadilan Negeri Koba telah mentautkan direktori putusan Pengadilan Negeri Koba pada website www.pn-koba.go.id pada kolom informasi cepat tab Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah tampilan direktori putusan Pengadilan Negeri Koba.



Gambar 5.39 Publikasi Perkara (*One Day Publish*)

Proses *upload* putusan ke direktori putusan dilakukan oleh petugas dalam jangka waktu 1x24 jam sejak suatu perkara diputus ke situs tersebut. Terkait dengan SIPP, telah keluar versi yang berkaitan dengan

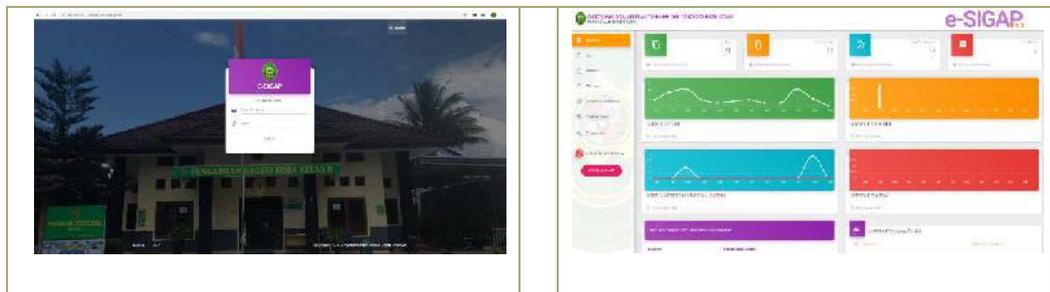
one day publish, dimana telah ada menu khusus pada aplikasi SIPP yang dapat melakukan upload ke direktori putusan. Dengan adanya fitur ini memudahkan petugas untuk melakukan upload data dalam rangka *one day publish* dengan mudah dan tepat.



Gambar 5.40 Menu Antrian Direktori Putusan Pada Aplikasi SIPP

b. Aplikasi e-SIGAP

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Koba, maka dibuat aplikasi e-SIGAP (Elektronik Izin Sita, Geledah, Penahanan, dan Penerbitan Izin Besuk) yang diperuntukkan bagi Penyidik dan Instansi Kejaksaan yang akan melakukan administrasi peradilan. Sehingga mereka tidak perlu bersusah payah untuk bolak-balik mengurus surat/dokumen persetujuan tersebut, cukup sekali datang untuk mengambil hasil cetak (penetapan/surat izin) dimaksud sekaligus menyerahkan dokumen permohonan (*hardcopy*) yang asli. Berikut adalah beberapa tampilan aplikasi e-SIGAP :



Gambar 5.41 Tampilan Halaman Login Aplikasi E-SIGAP

c. Aplikasi SEMADE

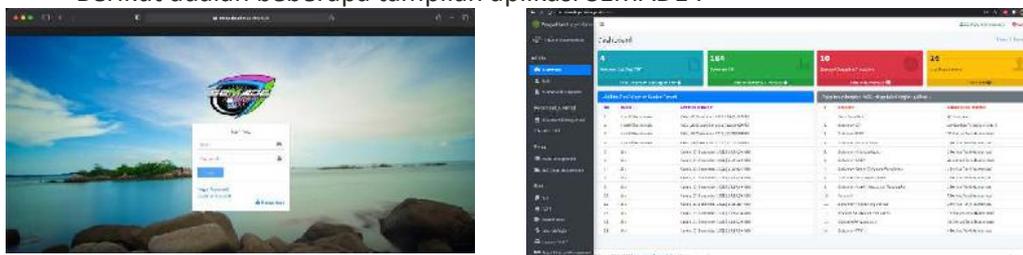
SEMADE merupakan kepanjangan dari Sistem Manajemen Dokumen Elektronik, yang merupakan sistem aplikasi pengelolaan dokumen *Hardcopy* (Kertas, microfilm, dll) yang sudah dialihmediakan kedalam format digital dan telah diunggah kedalam sistem informasi tertentu berbasis website sehingga dapat diakses dari berbagai tempat

- Tujuan
 - Sistem Manajemen Dokumen Elektronik bertujuan sebagai sebuah sistem yang membantu proses pengelolaan dan pengendalian dokumen *hardcopy* dilingkungan Pengadilan Negeri Koba.
- Manfaat
 - a. Produktivitas yang meningkat.

Adanya peningkatan produktivitas bisa terjadi disisi pencarian dokumen dan *broadcast* dokumen.

- b. *Cost Efficiency.*
Dengan menggunakan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik, perusahaan bisa mengurangi biaya untuk pembelian kertas.
- c. *Robust Security.*
Dokumen elektronik instansi bisa disimpan dalam tempat yang tersentralisasi, mengurangi kemungkinan tercecernya dokumen.
- d. Mempercepat akses ke dokumen yang diperlukan.
Setiap *user* bisa langsung membuka aplikasi SEMADE dan mengakses dokumen yang diperlukan sesuai dengan hak akses yang dimiliki.
- e. Mempercepat aliran distribusi dan sharing dokumen.
- f. Mengakses dokumen yang diperlukan dari mana saja.
Selama ada koneksi internet yang terhubung dengan server SEMADE, maka aplikasi bisa diakses menggunakan PC atau *Smartphone*.
- g. Mengatur *Permission* (Hak Akses) dengan lebih spesifik (*Security*).
Pengaturan pengguna yang memiliki akses *view*, *read*, *update/edit*, dan *delete* suatu dokumen.
- h. Menelusuri *History Audit Trail* perubahan dokumen.
- i. Mempermudah pencarian.
Dapat mengandalkan *search engine* yang dimiliki SEMADE.
- j. Membantu mengelola seluruh dokumen yang dimiliki instansi.

Berikut adalah beberapa tampilan aplikasi SEMADE :



Gambar 5.42 Aplikasi SEMADE

d. Aplikasi SPEISCIPIK

SPEISCIPIK singkatan dari Sistem Penelusuran Elektronik Informasi Sakit, Cuti, Pangkat, Izin dan KGB. Speiscipik merupakan sebuah aplikasi penyedia informasi Kepegawaian yang berkenaan dengan Data Sakit, Cuti, Pangkat, Izin dan KGB, yang akan diterapkan dan dilaksanakan di

Pengadilan Negeri Koba, untuk mempermudah Pengguna (Hakim dan Pegawai) dalam mendapatkan informasi Kepegawaian.

Berikut adalah beberapa tampilan aplikasi SPEISCIPIK :



Gambar 5.43 Aplikasi SPEISCIPIK

e. Aplikasi Eraterang

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada seluruh Pengadilan Negeri, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah membuat aplikasi Eraterang yang merupakan Media Elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri, yang dapat diakses melalui alamat website : <http://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>

Berikut adalah tampilan halaman antarmuka aplikasi eraterang :



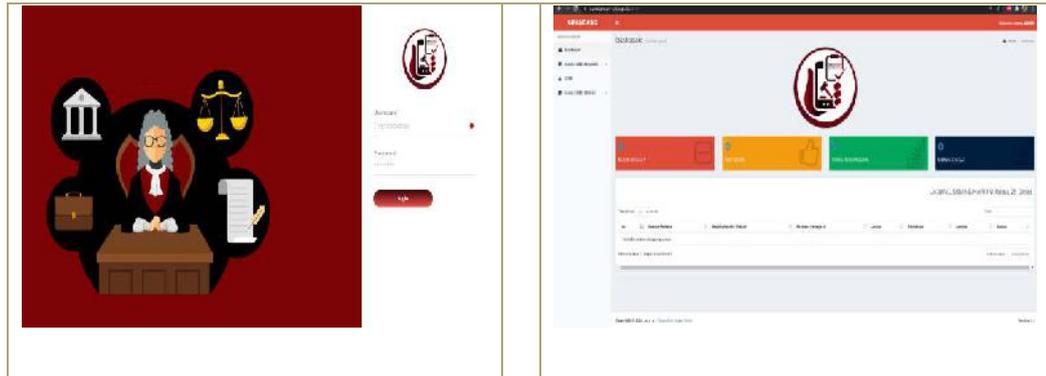
Gambar 5.44 Aplikasi ERATERANG

f. Aplikasi SIPANDANG

Sistem Informasi Persiapan Sidang atau disingkat sebagai Si-Pandang ini merupakan suatu bentuk optimalisasi proses persidangan di Pengadilan Negeri Koba.

Si-Pandang merupakan jawaban agar proses persidangan bisa sesuai dengan agenda persidangan. Selain itu, Si-Pandang akan memberikan beberapa manfaat:

- Panitera Pengganti tidak perlu melaporkan sidang kepada Majelis Hakim secara manual;
- Proses persidangan bisa sesuai dengan agenda sidang;
- Majelis Hakim dapat mengetahui proses persidangan sudah siap dimulai dengan lebih mudah;
 - Ketua Pengadilan bisa langsung memantau perkembangan proses persidangan dengan lebih mudah;



Gambar 5.45 Aplikasi SI-PANDANG

g. Aplikasi AKSI SIJAKA

Aplikasi AKSI SIJAKA merupakan aplikasi informasi publik mengenai sisa panjar biaya perkara baik perkara yang masih berjalan ataupun perkara yang sudah putus/minutati dan juga sebagai media untuk menginformasikan pengembalian sisa panjar yang dikirim melalui email pihak yang **terdaftar**.



Gambar 5.46 Aplikasi AKSI SIJAKA

h. Aplikasi PANGSID

Aplikasi PANGSID merupakan sebuah inovasi Pengadilan Negeri Koba yang berupa aplikasi sidang terintegrasi dengan SIPP yang digunakan untuk memberikan informasi panggilan sidang atas jadwal sidang yang sudah siap dimulai melalui *Sound System* pada gedung Pengadilan Negeri Koba.

Selain digunakan untuk panggilan sidang, aplikasi PANGSID juga berfungsi untuk melakukan panggilan Rapat dan Apel pada Pengadilan Negeri Koba. Sehingga lebih memudahkan dan mempercepat

k. Aplikasi e-COURT Mahkamah Agung

Aplikasi e-COURT merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.



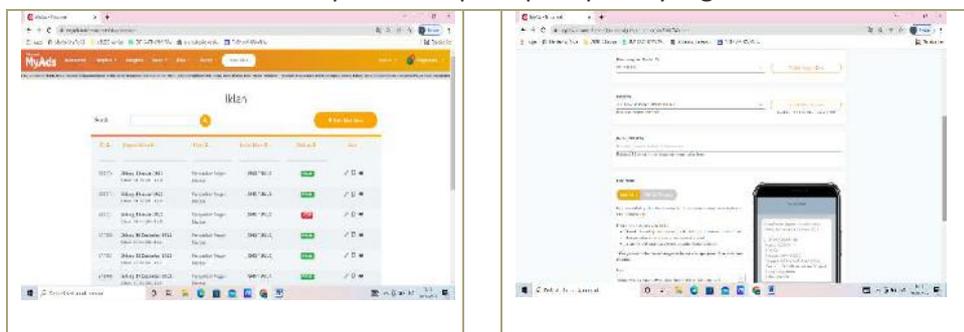
Gambar 5.50 Aplikasi E-COURT

6. Pengadilan Negeri Mentok

Pengadilan Negeri Mentok sudah memiliki Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi akan membuat peluang pelaksanaan fungsi peradilan untuk menjadi lebih sederhana, transparan, dan akuntabel. Hal ini menunjukkan komitmen sekaligus semangat pembaruan peradilan guna mempercepat pencapaian menuju peradilan yang modern.

a. Aplikasi SMS Gateway

Pengadilan Negeri Mentok menggunakan aplikasi MyAds Telkomsel sebagai Aplikasi SMS Gateway. Aplikasi SMS Gateway tersebut digunakan oleh administrator Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan sms untuk memberitahukan info persidangan misalnya berupa kapan jadwal sidang pertama setelah Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang di SIPP sehingga begitu dicantumkan tanggal sidang di SIPP, aplikasi ini akan memberitahukan jadwal sidang melalui sms kepada para pihak yang berkaitan, juga digunakan untuk memberitahukan info perkara kepada para pihak yang berkaitan.



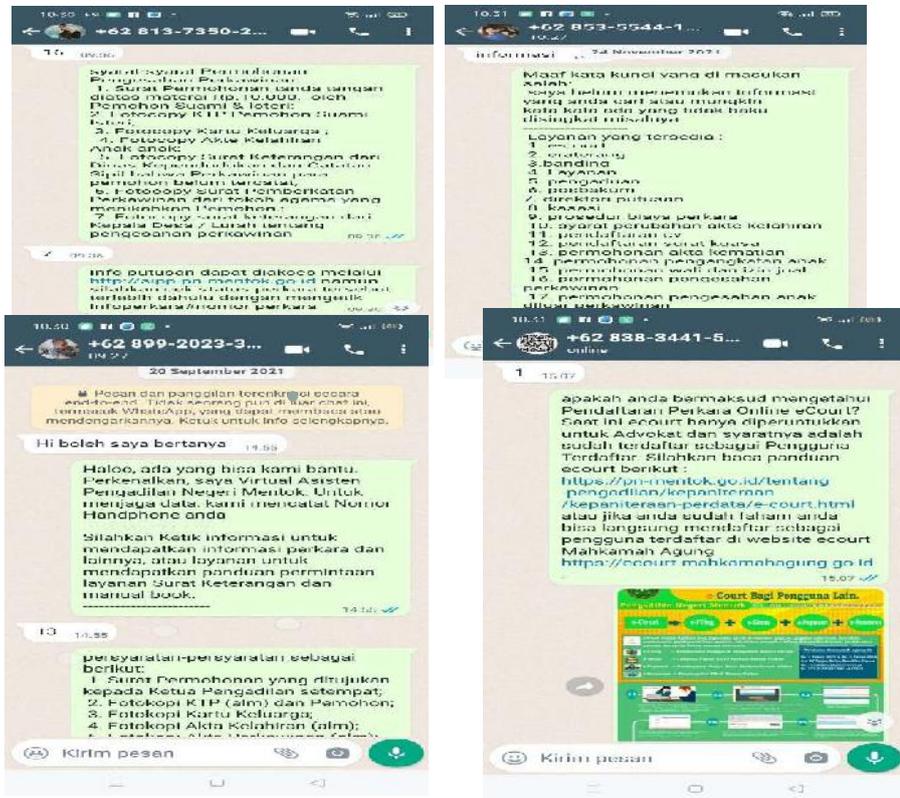
Gambar 5.51 Aplikasi SMS GATEWAY Pengadilan Negeri Mentok

b. WhatsApp

Karena SMS Gateway yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Mentok bersifat satu arah, sehingga Pengadilan Negeri Mentok mempersiapkan

nomor WhatsApp untuk berkomunikasi dua arah dengan pengguna layanan Pengadilan Negeri Mentok. Para pengguna layanan Pengadilan Negeri Mentok dapat mengirimkan pertanyaan, tanggapan ataupun saran kepada Pengadilan Negeri Mentok melalui nomor WhatsApp Pengadilan Negeri Mentok dan akan dibalas oleh admin WhatsApp dalam jam kerja.

Tangkapan Layar dari WhatsApp



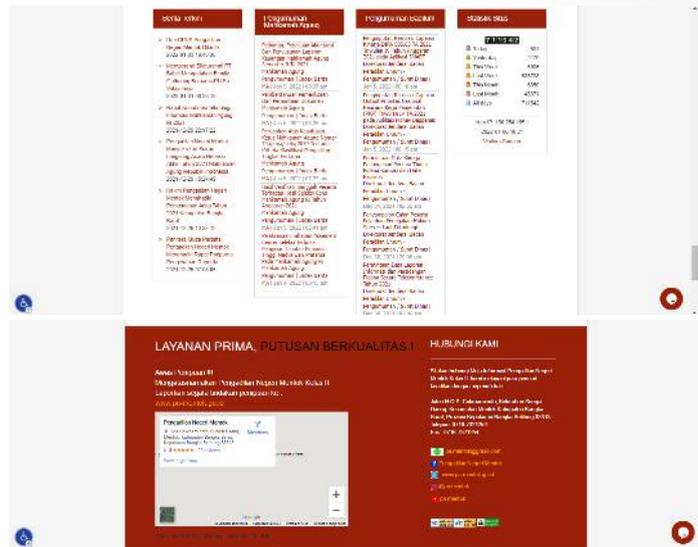
Gambar 5.52 Aplikasi Whatsapp GATEWAY

c. Website

Pengadilan Negeri Mentok juga menyediakan informasi pengadilan melalui website resmi di www.pn-mentok.go.id yang sudah sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

Tangkapan Layar dari Website Resmi Pengadilan Negeri Mentok





Gambar 5.53 Website PN Mentok

d. Media Sosial

Pengadilan Negeri Mentok sudah menggunakan media sosial sebagai salah satu media untuk menyampaikan program, kebijakan, dan informasi yang berkaitan dengan Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Mentok. Adapun media sosial yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Mentok adalah Instagram dan Facebook.

- **Instagram (@pn.mentok)**

Tangkapan Layar dari Instagram Pengadilan Negeri Mentok



- **Facebook (www.facebook.com/pn.mentok)**

Tangkapan Layar dari Facebook Pengadilan Negeri Mentok



Gambar 5.54 Media Sosial PN Mentok

e. SIJATI (Sistem Pengecekan Denda Tilang dan Jadwal Sidang)

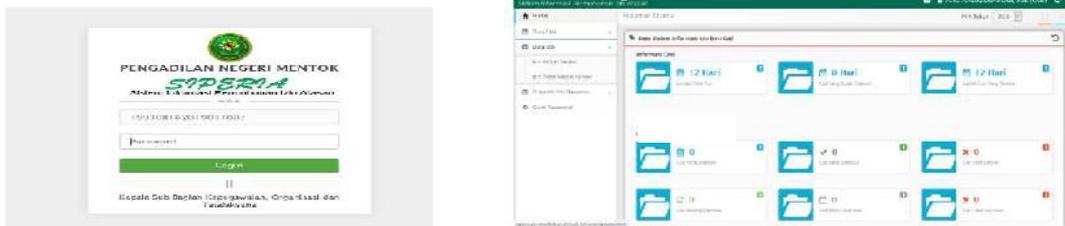
Sistem Pengecekan Data Tilang dan Jadwal Sidang (SIJATI) bertujuan sebagai sebuah sistem yang membantu menyediakan informasi data tilang dan jadwal sidang dalam genggaman di lingkungan Pengadilan Negeri Mentok. Sistem Pengecekan Data Tilang dan Jadwal Sidang (SIJATI) merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan di era pandemi mengingat adanya pembatasan mobilitas yang mengharuskan masyarakat khususnya para pencari keadilan untuk memanfaatkan media informasi yang ada semaksimal mungkin.



Gambar 5.55 Aplikasi SIJATI PN Mentok

f. SIPERIA (Sistem Informasi Ijin Atasan)

Aplikasi Permohonan Izin Atasan yang penggunaannya hanya untuk internal pegawai negeri sipil Pengadilan Negeri Mentok yang hendak melakukan Izin. Melalui aplikasi ini, pengajuan terhadap izin dapat dilakukan melalui web tanpa harus melakukan surat izin secara manual.



Gambar 5.56 Aplikasi SIPERIA PN Mentok

g. DO-ENTRY

Merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan Antrian Pengadilan Negeri mentok, sehingga masyarakat dapat mendaftarkan antrian secara online. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memilih langsung antrian untuk bagian Perdata, Pidana, Hukum dan juga Umum. Hal ini akan dapat mempermudah dan memperlancar pelayanan terhadap masyarakat di PTSP.



Gambar 5.57 Aplikasi Do-Entry PN Mentok

BAB VI

PENGAWASAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



BAB VI PENGAWASAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

Peningkatan Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak disertai dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya mempunyai hakim pengawas bidang yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan kepada setiap bagian kesekretariatan dan kepaniteraan. Pemeriksaan bidang ini dilakukan setiap awal bulan, kemudian dilanjutkan dengan rapat bulanan. Selain itu, terdapat juga sosialisasi mengenai siwas, *whistle blowing system* dan sistem pengendalian intern pemerintah.

Ketua Pengadilan Tinggi juga menunjuk hakim pengawas daerah yang akan melakukan pengawasan ke daerah setiap tahunnya, atau melakukan *conference* dengan Pengadilan Negeri yang menjadi tanggungjawabnya. Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : W7-U/0979/KPT/PS.03/SK/6/2022, tanggal 22 Juni 2022, tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, maka tugas hakim pengawas daerah maupun bidang antara lain :

1. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan perkara dan hasil evaluasi, pengawasan tahun 2022 baik teknis maupun administrasi peradilan sebagai bahan aplikasi pembinaan.

2. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeliharaan dan pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan.
3. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan serta tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung ke daerah pengawasan maupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

1. Pengawasan Internal Bidang

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

- Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu.

Pengawasan secara internal pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan, meliputi:

1. Semua tingkah laku para Hakim, Panitera/Sekretaris para pejabat struktural dan fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.
2. Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga menunjuk hakim pengawas masing-masing bidang dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Apabila terjadi suatu kendala, hakim pengawas bidang akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan;
3. Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera/Sekretaris, para pejabat struktural dan fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya;
4. Evaluasi kepada Panitera Pengganti apakah semua perkara ditanganinya yang telah incracht sudah diminutasi;
5. Panitera dan Sekretaris juga melakukan pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Panitera muda dan Kasubbag yang bertanggung jawab atas staf yang bertug
6. Pengawasan Internal Bidang dilaksanakan pada setiap awal bulan, sesuai dengan Tugas masing-masing Hakim Pengawas Bidang pada bagian Sub Bagian yang ada di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Hasil pengawasan bidang yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

2. Pengawasan Daerah

Pengawasan Daerah telah dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Daerah, pengawasan dilakukan di seluruh Pengadilan Negeri yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Berikut ini tabel pelaksanaan Pengawasan Daerah pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung :

Tabel 6.1.
Jadwal Pengawasan Ke Pengadilan Negeri Se-Wilayah Bangka Belitung

NO	TANGGAL PENGAWASAN	PENGAWASAN
PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG		
1	18 s.d. 19 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Peradilan. - Administrasi Perkara. - Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. - Administrasi Umum - Kinerja Pelayanan Publik.
2	29 s.d. 30 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Peradilan. - Administrasi Perkara. - Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. - Administrasi Umum. - Kinerja Pelayanan Publik.
PENGADILAN NEGERI SUNGAIL AT		
1	04 sd 05 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Peradilan. - Administrasi Perkara. - Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. - Administrasi Umum - Kinerja Pelayanan Publik
2	01 sd 02 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Peradilan. - Administrasi Perkara. - Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. - Administrasi Umum. - Kinerja Pelayanan Publik.
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN		
1	14 s.d 16 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Peradilan. - Administrasi Perkara. - Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. - Administrasi Umum. - Kinerja Pelayanan Publik.
2	05 s.d 07 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Peradilan. - Administrasi Perkara. - Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. - Administrasi Umum. - Kinerja Pelayanan Publik.
PENGADILAN NEGERI KOB A		
1	11 s.d. 12 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Peradilan. - Administrasi Perkara. - Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. - Administrasi Umum. - Kinerja Pelayanan Publik.
2	03 s.d 04 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Peradilan. - Administrasi Perkara. - Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. - Administrasi Umum. - Kinerja Pelayanan Publik.
PENGADILAN NEGERI MENTOK		
1	06 s.d 08 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Peradilan. - Administrasi Perkara. - Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. - Administrasi Umum.

NO	TANGGAL PENGAWASAN	PENGAWASAN
		- Kinerja Pelayanan Publik.
2	08 s.d. 09 November 2022	- Manajemen Peradilan. - Administrasi Perkara. - Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan. - Administrasi Umum. - Kinerja Pelayanan Publik.

B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung baik dalam pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja peradilan dan kualitas pelayanan publik dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung atau pejabat yang berkompeten untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja baru dengan cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Adapun evaluasi atas hasil pengawasan terhadap bidang-bidang di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maupun satuan kerja di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat dinas setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
2. Melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pimpinan Pengadilan Negeri Se-Bangka Belitung dengan melakukan sosialisasi Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya., Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penangana Pengaduan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Memeriksa semua laporan pengawasan bidang yang telah dibuat oleh hakim-hakim pengawas bidang sub bidang Sub Sub Bagian dan semua harus di tindaklanjuti.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri dibawahnya selama Tahun 2022 pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Untuk realisasi anggaran di tahun 2022 DIPA 01 untuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung beserta seluruh satuan kerja dibawahnya mencapai 99,36 % dari total anggaran senilai Rp. 60.289.623.000,-. Dan realisasi anggaran DIPA 03 untuk Pengadilan Tinggi Bangka Belitung beserta seluruh satuan kerja dibawahnya mencapai 97,66 % dari total anggaran senilai Rp.1.268.594.000,00,-.
4. Telah banyaknya inovasi yang diciptakan oleh Aparatur Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk memudahkan dalam pelayanan publik dan Internal Pengadilan
5. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah menerapkan aplikasi E-Court dengan fitur efilling (pendaftaran perkara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara) dan E-Litigasi.
6. Seluruh pengadilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah menerapkan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

7. Dengan telah adanya Akreditasi Penjaminan Mutu maka pengadilan menjalankan tupoksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dukungan dari supporting unit.
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung baik internal maupun terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
9. Dimasa perkembangan pandemi Covid-19 Tupoksi Pengadilan se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar protokol kesehatan.

B. SARAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maka perlu :

1. Jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan seluruh satuan kerja dibawahnya perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan beban kerja di tiap-tiap satuan kerja, khususnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai koordinator wilayah masih dirasa kurang. Upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik untuk pengelolaan administrasi peradilan dan administrasi umum juga perlu ada pelatihan-pelatihan yang secara terus menerus, dimana pelatihan dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi dengan penambahan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana gedung dirasa sangat diperlukan, dimana antara kebutuhan penyediaan hal tersebut harus seimbang dengan ketersediaan anggaran. Pada tiap tahunnya terjadi pengurangan alokasi anggaran yang cukup signifikan yang berakibat pada berkurangnya pengalokasian penyediaan sarana infrastruktur padahal sarana dan prasarana gedung merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan badan peradilan yang agung.



PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
Nomor W7-U/1936/KPT/SK/OT.01.2/12/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG,

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor W7-U/1936/KPT/SK/OT.01.2/12/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka dipandang perlu disusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor W7-U/1936/KPT/SK/OT.01.2/12/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- KEDUA : Membentuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- KETIGA : Melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
- KEEMPAT : Mengirim hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI paling lambat pada minggu pertama bulan Februari 2023;

KELIMA

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 19 Desember 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG,

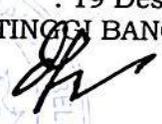


MAS HUSHENDAR ✓

TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Dr. ARTHA THERESIA, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua	
2.	TANWIMAN SYAM, S.H.	Panitera	Koordinator bagian Kepaniteraan	
3.	Drs. TAJUDIN NUR, S.H.	Sekretaris	Koordinator bagian Kesekretariatan	
4.	LUKI PUDI ASMARA, S.E., M.H.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	
5.	MAHFUD WIDI PRIYONO, S.T., M.H.	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota	
6.	Drs. ZULMIADI, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota	
7.	BINTAR ASLI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	
8.	RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
9.	SURYATI, S.IP.	Plt. Panitera Muda Hukum	Anggota	
10.	YUS YULI, S.H.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
11.	FITRIYANTI UTARI, S.E.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
12.	SITI KOMARI, S.E.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
13.	IRHANSYAH, S. Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan TI	Anggota	
14.	MERI KARTIKA SARI, S.I.P., S.Pd.I., S.Pd.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Petugas Input Bahan Laporan	

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 19 Desember 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG,


MAS HUSHENDAR

